

DISERTASI

**MODEL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
(STUDI : UPAYA MENDUKUNG PRODUKTIVITAS PERTANIAN DI KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG)**

***REGIONAL GOVERNMENT CAPACITY DEVELOPMENT MODEL
(STUDY: EFFORTS TO SUPPORT AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN SIDENRENG
RAPPANG REGENCY)***

ABDUL JABBAR

E013202010



**PROGRAM DOKTORAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2024

**MODEL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
(STUDI : UPAYA Mendukung Produktivitas Pertanian di
Kabupaten Sidenreng Rappang)**

***REGIONAL GOVERNMENT CAPACITY DEVELOPMENT MODEL
(STUDY: EFFORTS TO SUPPORT AGRICULTURAL PRODUCTIVITY
IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY)***

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor
Program Studi Administrasi Publik

Disusun dan diajukan oleh

ABDUL JABBAR
E013202010

Kepada

**PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI

MODEL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH (STUDI : UPAYA Mendukung Produktivitas Pertanian Di Kabupaten Sidenreng Rappang)

Disusun dan Diajukan oleh:

ABDUL JABBAR

E013202010

Menyetujui
Komisi Penasehat

Prof. Dr. H. Sangkala, MA
(Promotor)

Prof. Dr. Hj. Hasniati, M.Si.
(Co-Promotor)

Dr. Muhammad Rusdi, M.Si.
(Co-Promotor)

Mengetahui:
Ketua Program Studi
S3 Administrasi Publik

Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah:

Nama : ABDUL JABBAR

Nomor Poko Mahasiswa : E013202010

Program Studi : S3 Administrasi Publik

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul “**Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (Studi : Upaya Mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang)**” benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Oktober 2024

Yang menyatakan,



ABDUL JABBAR

ABSTRAK

ABDUL JABBAR, 2024. Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (Studi : Upaya Mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang). Disertasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. (Disupervisi oleh Sangkala, Hasniati dan Muhammad Rusdi).

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Menganalisis Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Level Individu, Level Organisasi dan Level Sistem. 2). Menemukan Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian adalah eksploratif kualitatif dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta menggunakan alat bantu pengolahan data dengan aplikasi N-VIVO.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Pengembangan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya mendukung produktivitas pertanian pada level individu, level organisasi dan level sistem masih mengalami berbagai permasalahan, namun upaya dalam pengembangan kapasitas telah dilakukan dengan berbagai program kegiatan. Pada level individu, iklim lingkungan kerja yang kondusif dan dukungan anggaran yang memadai dapat meningkatkan motivasi kerja Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian. Pada level organisasi, penguatan kepemimpinan dan pengembangan *networking* (jaringan) pemerintahan dengan berbagai *stackholder* dapat menjadi langkah dalam mendukung produktivitas pertanian. Pada level sistem, komitmen dalam mengintegrasikan visi misi, program kerja dan kebijakan serta adanya keterbukaan akses untuk petani dalam mendorong produktivitas pertanian. 2). Model *UNDP Capacity Development Framework* dapat dijadikan sebagai strategi adaptif pemerintah daerah dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor pertanian yang bertujuan untuk pengembangan kapasitas dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dan tercapainya visi sebagai daerah agrobisnis yang maju.

Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas, Produktivitas Pertanian

ABSTRACT

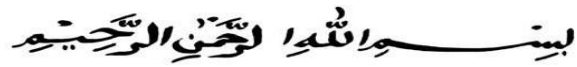
ABDUL JABBAR, 2024. *Regional Government Capacity Development Model (Study: Efforts to Support Agricultural Productivity in Sidenreng Rappang Regency).* Dissertation, Department of Public Administration, Postgraduate Program, Hasanuddin University, Makassar. (Supervised by Sangkala, Hasniati and Muhammad Rusdi).

This research aims to : 1). Analyzing Regional Government Capacity Development in an effort to support agricultural productivity in Sidenreng Rappang Regency at the Individual Level, Organizational Level and System Level. 2). Finding a Regional Government Capacity Development Model in an effort to support agricultural productivity in Sidenreng Rappang Regency. The type of research is qualitative exploratory using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions as well as using data processing tools with the N-VIVO application.

The research results show that: 1). Developing the capacity of the regional government of Sidenreng Rappang Regency in an effort to support agricultural productivity at the individual level, organizational level and system level is still experiencing various problems, however efforts to develop the capacity of the regional government have been carried out with various activity programs. At the individual level, a conducive work environment and adequate budget support can increase the work motivation of agricultural Human Resources (HR). At the organizational level, strengthening leadership and developing government networking with various stakeholders can be a step in supporting agricultural productivity. At the system level, commitment to integrating vision and mission, work programs and policies as well as open access for farmers to encourage agricultural productivity. 2). The UNDP Capacity Development Framework model can be used as an adaptive strategy for local governments in responding to changes occurring in the agricultural sector which aims to develop capacity in an effort to support agricultural productivity in Sidenreng Rappang Regency and achieve its vision as an advanced agribusiness area.

Keywords : Capacity Development, Agricultural Productivity

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya-Nya serta salam dan shalawat tercurah kepada Muhammad Rasulullah SAW. Sang teladan bagi umat manusia, yang mengantarkan dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul **“Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (Studi : Upaya Mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar doktor pada Program Studi S3 Administrasi Publik, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulisan disertasi ini tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Kedua Orang Tua tercinta, Bapak H. Abdul Rahman, BA (Almarhum) dan Ibu Hj. Nurhaedah K. atas semua kasih sayang, doa, bimbingan dan dukungannya. Orang yang spesial dalam hidup saya, Istri tercinta Asmi Nasruddin, S.KM.,M.Kes yang tidak henti-henti selalu sabar dan setia memberikan motivasi dan doanya dalam menyelesaikan disertasi ini. Anak tercinta, Muhammad Abidzar Al Ghifari AJB yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan disertasi ini.

Begitupula, penulis mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Prof. Dr. Phil. Syukri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Muhammad Akmal Ibrahim, M.Si. selaku Ketua Program Studi S3 Doktor Ilmu Administrasi Publik atas pembinaan dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan studi.
4. Prof. Dr. H. Sangkala, M.A. selaku Promotor, Prof. Dr. Hj. Hasniati, M.Si. selaku Kopromotor I dan Dr. Muhammad Rusdi, M.Si. selaku Kopromotor II atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing penulis dan memberikan masukan dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Alwi, M.Si. selaku Penguji I, Dr. Syahribulan, M.Si. selaku Penguji II dan Dr. Muh. Tang Abdullah, M.A.P. selaku Penguji III yang telah banyak memberi saran dan masukan demi kesempurnaan disertasi ini.
6. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Bambang Supriono, M. Si., selaku Penguji Eksternal yang telah banyak memberi saran dan masukan demi kesempurnaan disertasi ini.
7. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen pengasuh mata kuliah atas curahan ilmu pengetahuannya selama masa studi dan seluruh staf yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan S3 Program Doktor di Universitas Hasanuddin.
8. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Bapak Prof. Dr. H. Jamaluddin, S.Sos., M.Si., yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doanya selama penulis menempuh pendidikan doktor ini.
9. Bapak H. Rusdi Masse Mappasessu dan Ibu Hj. Fatmawati Rusdi,

Kakanda H. Syaharuddin Alrif dan Hj. Haslindah Hasan yang selalu memberikan dorongan moril dan materil dalam penyelesaian pendidikan doktor ini.

10. Segenap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, seluruh Dosen dan Staf atas dukungan moril dan doanya selama penulis menempuh pendidikan doktor ini.
11. Saudara Kandung dan Ipar, Zulkifli Rahman, S.Pdi.,M.Pdi dan Raisyah Utami Ridwan, S.Gz, Sitti Rahmah, S.Pd dan Abdul Azis, SE atas dorongan semangat selama ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik Program Doktor Pascasarjana Administrasi Publik angkatan 2020 atas dukungan moral dan persaudaraan yang selalu berbagi canda tawa dan suka dukanya selama menempuh studi hingga sekarang, terimakasih atas bantuan, semangat dan kebersamaan selama ini yang takkan terlupakan.
13. Kakanda, Adinda, Saudara dan Sahabat dari berbagai Lembaga Organisasi : Persyarikatan Muhammadiyah, KAPSIPI, AIPPTM, KNPI, Angkatan Muda Muhammadiyah, Pemuda Tani, Relawan Muda Sulsel, Yayasan FORMASI Mallomo, FORMASI Institute, HIPMI, RMS Community, TIM SAR, LAKOSTE, Partai NasDem, Tim Warkop Triple 3 dan organisasi lainnya yang selama ini turut memberikan support dan doa.
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan-Nya dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan disertasi ini. Amin.

Makassar, 02 Oktober 2024

ABDUL JABBAR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian.....	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 19
A. Pengembangan Kapasitas dalam Administrasi Publik	21
B. Konsep dan Teori Pengembangan Kapasitas.....	25
1. Teori Pengembangan Kapasitas <i>oleh United Nations</i> <i>Development Programme (UNDP)</i>	31
2. Teori Pengembangan Kapasitas oleh Bank Dunia.....	32
3. Teori Pengembangan Kapasitas oleh <i>Organisation for</i> <i>Economic Co-operation and Development (OECD)</i>	33
4. Teori Pengembangan Kapasitas oleh Peter Morgan.....	34
5. Teori Pengembangan Kapasitas oleh Brown.....	34
6. Teori Pengembangan Kapasitas oleh Grindle.....	36
7. Teori Pengembangan Kapasitas oleh Morison.....	37

8. Relevansi Teori Pengembangan Kapasitas dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian.....	38
C. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah.....	40
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas.....	43
2. Unsur-Unsur Pengembangan Kapasitas.....	45
3. Eleme-Element Pengembangkan Kapasitas dalam Otonomi Daerah.....	47
4. Pengembangan Kapasitas sebagai Strategi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.....	48
5. Hambatan-Hambatan dalam Pengembangan Kapasitas.....	57
6. Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung Produktivitas Pertanian.....	59
a) Pengembangan Kapasitas pada Level Individu.....	63
b) Pengembangan Kapasitas pada Level Organisasi.....	65
c) Pengembangan Kapasitas pada Level Sistem.....	68
D. Penelitian Terdahulu	72
E. Kerangka Pemikiran.....	81
BAB III METODE PENELITIAN	84
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	84
B. Lokasi Penelitian.....	84
C. Fokus Penelitian	85
D. Sumber Data.....	87
E. Teknik Pengumpulan Data.....	89
F. Teknik Analisis Data.....	90
G. Pengecekan Validitas Temuan	93
H. Tahap-Tahap dan Jadwal Penelitian	94

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	98
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	98
B. Hasil Penelitian	123
1. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang	123
a) Tingkat Pendidikan	124
b) Keterampilan dan Profesionalisme	129
c) Rekrutmen	137
d) Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.	146
2. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	148
a) Manajemen Organisasi	149
b) Budaya Kerja Organisasi	158
c) Pengembangan SDM.....	166
d) Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.	172
3. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang	174
a) Visi Misi dan Program Kerja.....	175
b) Perbaikan Kebijakan	193
c) Sistem Tata Kelola Pertanian	200
d) Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.	211
4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan aplikasi N Vivo	212

C. Pembahasan	215
1. Program Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Daerah dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang	217
2. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu	223
3. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi	234
4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem	248
5. Rekomendasi Kebaruan (Novelty) Hasil Penelitian Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang	261
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	273
A. Simpulan	273
B. Saran	275
DAFTAR PUSTAKA	277

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	<i>Capacity Building</i> 59
Gambar 2.2	<i>UNDP Capacity Development Framework</i> 60
Gambar 2.3	Siklus Pengembangan Kapasitas menurut <i>UNDP</i> 61
Gambar 2.4	Kerangka Pengembangan Kapasitas menurut <i>UNDP</i> 62
Gambar 2.5	Analisis <i>CiteSpace</i> 80
Gambar 2.6	Kerangka Pemikiran 83
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Sidenreng Rappang 98
Gambar 4.2	Luas Daerah Menurut Kecamatan 99
Gambar 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 99
Gambar 4.4	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 104
Gambar 4.5	Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Sidrap 117
Gambar 4.6	Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya 122
Gambar 4.7	Dokumentasi Penyuluh Berprestasi 136
Gambar 4.8	Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Sidrap 152
Gambar 4.9	Dokumentasi Tudang Sipulung Kab. Sidrap Tahun 2023 186
Gambar 4.10	Dokumentasi RDP Pemuda Tani HKTI dan DPRD Kab. Sidrap 195
Gambar 4.11	Hasil Olahan Data menggunakan aplikasi N VIVO 213
Gambar 4.12	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang 215
Gambar 4.13	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang 231
Gambar 4.14	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang 244
Gambar 4.15	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang 257
Gambar 4.16	Pengembangan Model <i>UNDP Capacity Development Framework</i> 267

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Sidrap Tahun 2016 – 2022	7
Tabel 1.2 Luas Panen Tanaman Padi di Kabupaten Sidrap Tahun 2016 – 2022	9
Tabel 2.1 Matriks Dimensi Pengembangan Kapasitas Menurut Para Ahli	39
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	78
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	86
Tabel 3.2 Data Informan	87
Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Kab. Sidrap	102
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	103
Tabel 4.3 Jumlah Laju Penduduk di Kab. Sidrap	105
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk diatas 15 Tahun Berdasarkan Kegiatan dan Jenis Kelamin	106
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk diatas 15 Tahun Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin	107
Tabel 4.6 Pengamatan Unsur Iklim	115
Tabel 4.7 Angka Kemiskinan berdasarkan Indikator Kemiskinan di Kab. Sidrap	117
Tabel 4.8 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kab. Sidrap	118
Tabel 4.9 Jumlah Guru Sekolah Negeri dan Swasata di Kab. Sidrap	119
Tabel 4.11 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Frekuensi Penanaman di Kab. Sidrap	121
Tabel 4.12 Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023	125
Tabel 4.13 Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Golongan Tahun 2023	125
Tabel 4.14 Klasifikasi PNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	126

Tabel 4.15	Klasifikasi PPT-TK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	126
Tabel 4.16	Produksi Tanaman Padi di Kab. Sidrap tahun 2016 - 2022	139
Tabel 4.17	Luas Panen Tanaman Padi di Kabupaten Sidrap Tahun 2016 – 2022	199
Tabel 4.18	Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023	218
Tabel 4.19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis	222
Tabel 4.20	Matriks Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang	232
Tabel 4.21	Matriks Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang	245
Tabel 4.22	Matriks Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang	258
Tabel 4.23	Kesimpulan Reduksi Data Pengembangan Kapasitas Model <i>UNDP Capacity Development Framework</i>	266

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai wujud organisasi yang mengelola sumber daya dan kehidupan sosial kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai garda terdepan negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada publik. Dalam mewujudkan perannya dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip manajemen modern yang mengedepankan pada penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah sebagai sebuah organisasi mengusung cita-cita dan tujuan bersama yang diwujudkan dalam sebuah konstitusi negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan titik balik (*turning point*) paradigma pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni dari sistem pemerintahan sentralistik menjadi pemerintahan yang desentralistik. Titik balik atau perubahan pemerintahan tersebut merupakan awal era reformasi yang ditandai dengan peranan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam memegang prinsip otonomi yang seluas luasnya.

Otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimaksud dalam prinsip otonomi yang seluas luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing

daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah sejatinya merespon dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga (*steackholder*) atas pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, harus memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mampu menjalankan tugasnya, sehingga daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia didalam Pasal 18, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab telah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan kewenangan tersebut, setiap pemerintah kabupaten maupun kota dapat membuat

kebijakan dan program berdasar pada kebutuhan, keinginan dan pilihan masyarakatnya dan dapat membentuk institusi, dinas, badan, kantor maupun lembaga teknis lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya.

Menghadapi berbagai konsekuensi dari perubahan yang terjadi, lembaga pemerintah diharapkan harus mampu menyesuaikan diri dengan peliknya situasi dengan menjadi lembaga yang adaptif (*Adaptive Situation*) (Termeer et al, 2015). Dalam konteks fenomena perubahan, terdapat berbagai jenis ambiguitas dan ketidakpastian, dan peran pemerintah yang signifikan disini tidak hanya dalam mengatasi masalah perumusan dan implementasi solusi, tetapi juga dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas melalui suatu kebijakan.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam perspektif otonomi daerah, terkandung maksud bahwa pemerintahan daerah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang berkelanjutan, sehingga dalam memainkan peran institusi tata kelola pemerintahannya secara konkrit yang ditujukan untuk melayani kepentingan publik (*public services*). Lebih lanjut, maka eksistensi pengembangan kapasitas pemerintah daerah tentunya bisa dilihat dari sejauhmana peran pemerintah daerah yang didukung oleh prinsip-prinsip pelayanan yang nyata bagi masyarakat.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu keharusan dan hendaknya diarahkan pada kemampuan untuk menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki dengan memanfaatkan sumber daya/ faktor

pendukung yang tersedia seefektif mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat ditegaskan bahwa tingkat keberhasilan program pemerintah sangat dipengaruhi oleh pengembangan kapasitas pemerintah daerah itu sendiri.

Desentralisasi diatur di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini menjadikan pemerintah daerah sebagai lembaga yang paling menentukan pilihan tentang amanat urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah atas kabupaten/kota. Hal ini untuk merencanakan dan mengatur pembangunan skala kabupaten/kota, termasuk dalam kontribusi pemerintah daerah untuk peningkatan produktivitas pertanian.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan urutan kedua penghasil padi terbanyak setelah provinsi Jawa. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Produksi padi di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa perkembangan komoditas unggulan pertanian mampu meningkatkan perekonomian rakyat dalam sektor pertanian, dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian dalam bidang pertanian. Sektor pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam pembangunan perekonomian.

Salah satu wilayah sentra produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan yang dijuluki kota beras atau lumbung beras yaitu Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang) dengan luas areal persawahan potensial ± 90.653 Ha (Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, perkebunan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Sidrap, 2023). Sebanyak 5 juta Ton beras dihasilkan oleh Sulawesi Selatan yang tentunya tidak terlepas dari kontribusi beras dari Kabupaten Sidrap sebanyak 18-20 persen (BPS, 2023).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2023 maka ditetapkan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemerintahan Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si yakni Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai **Daerah Agribisnis yang Maju** dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera". Dengan Misi : 1). Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja) dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka peningkatan indeks kualitas hidup (kesejahteraan) masyarakat. **2). Memajukan usaha agrobisnis, UMKM, dan pengembangan industri pengolahan hasil usaha pertanian dengan penerapan konsep petik, olah, kemas, dan jual.** 3). Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama (*net working*) dalam rangka peningkatan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah. 4). Mengembangkan dan meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, pasar dan telekomunikasi) untuk memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. 5). Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep *good governance* dan *electronic governance* (gg+e gov). 6). Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui

penerapan konsep desa cerdas (*smart village*) sehat, mandiri, serta pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 7). Mewujudkan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama yang religius, serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang, aman, kondusif dan harmonis.

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang termaktub dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 hingga tahun 2023 diantaranya 1). Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan. 2). Penguatan perekonomian daerah. 3). Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah. 4). Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah. 5). Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik. 6). Pengembangan kawasan pedesaan. 7). Peningkatan aktivitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman. Dalam RKPD tersebut, calon peneliti mencermati tidak adanya program yang secara spesifik mengarah pada peningkatan produktivitas pertanian. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian tidak konsisten dalam menindaklanjuti visi misi yang telah dicanangkan terkait agrobisnis yang maju.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Resia,O. (2019) dengan judul “Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Potensial di Kabupaten Kutai Timur” mendeskripsikan bahwa terdapat keterbukaan ruang kerjasama dengan unsur swasta dalam pemanfaatan sumber daya potensial khususnya pada bidang pertanian dan perkebunan. Selanjutnya

dari tinjauan dimensi *learning capacity* ditemukan kendala dalam hal kekurangan SDM profesional terutama dalam bidang perencanaan, masih membutuhkan tenaga profesional yang mampu memaksimalkan potensi daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Potensial.

Perkembangan produksi padi sawah daerah Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

**Tabel. 1.1 Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Sidrap
Tahun 2016 – 2023**

No	Tahun	Produksi (Ton GKG)
1.	2016	587.983
2.	2017	665.287
3.	2018	536.050
4.	2019	515.012
5.	2020	443.799
6.	2021	480.002
7.	2022	535.316

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Pada Tabel 1 menunjukkan tingkat produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang bergerak fluktuatif, pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan produksi dalam setiap tahunnya. Ditahun 2020, tingkat penurunan produksi padi sangat signifikan hanya 443.779 Ton GKG. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan dan langkah adaptif pemerintah daerah dalam merespon perubahan tingkat produktivitas pertanian secara tepat dan berkelanjutan agar hasil produksi padi bisa ditingkatkan kembali. Dan pada

tahun 2022, produksi tanaman padi mengalami peningkatan menjadi 535.316 Ton GKG.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti, penurunan tingkat produksi padi di Kabupaten Sidrap disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 1). Dampak perubahan iklim global, yaitu perubahan pola dan intensitas curah hujan yang menyebabkan terjadinya kekeringan dan banjir, 2). Meningkatnya alih fungsi lahan, 3). Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian berbasis teknologi tepat guna, 4). Degradasi kualitas lahan yang disebabkan oleh penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan, 5). Ketersediaan benih/bibit unggul bermutu yang belum tercukupi, 6). Rendahnya kapasitas kelembagaan petani dan SDM pertanian, 7). Kelangkaan dan pengurangan jumlah pupuk bersubsidi ke petani, 8). Tingginya harga obat-obat pertanian, serta 9). Kurangnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celcius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun. Di sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama penyakit serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian.

Tabel. 1.2 Luas Tanam Panen Tanaman Padi di Kabupaten Sidrap Tahun 2016-2022

No	Tahun	Hektar (Ha)
1.	2016	103.591
2.	2017	106.328
3.	2018	91.997
4.	2019	93.080
5.	2020	88.296
6.	2021	89.434
7.	2022	90.653

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa luas tanam panen tanaman padi di Kabupaten Sidenreng Rappang secara signifikan berkurang, ditahun 2017 paling tertinggi seluas 106.328 Ha, sementara pada tahun 2020 luas lahan panen tanaman padi tersisa 88.296 Ha, dan pada tahun 2022 luas tanam panen 90.653 Ha. Hal ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan produktif pertanian menjadi non pertanian seperti bangunan pemukiman penduduk, fasilitas umum dan industri. Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani.

Dalam aspek ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian berbasis teknologi tepat guna, masih kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Kerusakan

terutama diakibatkan banjir dan erosi serta desakan pemukiman dan campur tangan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Selain itu, prasarana usahatani seperti Jalan Usaha Tani masih sangat terbatas. Padahal, jalan usaha tani menjadi jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan.

Dari sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas disentra produksi. Pupuk yang juga merupakan sarana produksi yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternative juga masih sangat kurang.

Berdasarkan hasil wawancara pada saat peneliti melakukan observasi. Salah satu petani di wilayah Kecamatan Panca Rijang bernama Muhammad Yusuf mengatakan bahwa *“Rappang dan Baranti, Sidrap. Pupuk bersubsidi sudah sangat langka. Padahal petani sangat membutuhkan”* (Wawancara Langsung, 18 Juni 2022).

Kondisi organisasi petani seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian.

Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi *on-farm* dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian.

Adapun kebijakan dan regulasi yang selama ini berkaitan erat dengan program peningkatan produktivitas pertanian antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007.
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Talangan Stabilitasasi Harga Produk Strategis Sektor Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016.

11. Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang 2018 – 2023.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sidenreng Rappang 2018 – 2023.
13. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

Dari kebijakan yang ada, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Sidrap ternyata belum mampu mendorong produktivitas pertanian terutama tanaman padi naik secara signifikan, bahkan justru terjadi penurunan tingkat produksi tanaman padi di Kabupaten Sidrap selama beberapa tahun. Penurunan tingkat produksi padi sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil studi pendahuluan peneliti juga mengasumsikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum mampu mengoptimalkan kapasitas kelembagaan petani dan SDM pertanian dalam hal ini penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat petani, dibuktikan dengan adanya satu penyuluh yang mendampingi dua sampai tiga desa. Lemahnya dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap peningkatan SDM pertanian, sarana dan prasarana infrastruktur pertanian dan kurangnya akses informasi bagi petani juga berdampak pada penurunan tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Data dan fakta diatas menunjukkan jika pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan memiliki kapasitas atau kemampuan dalam hal pengembangan sistem, penguatan organisasi dan sumber daya manusia yang responsif dalam pembuatan kebijakan pada sektor pertanian sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Milen dalam Andi Samsu Alam (2015) menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas adalah kegiatan atau bisa disebut juga dengan tahapan dimana suatu individu, kelompok, organisasi, lembaga dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dan nanti dapat digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan masalah dan paham terhadap masalah kebutuhan yang diperlukan.

Berbagai persoalan yang diuraikan mendorong pemerintah daerah untuk memiliki model pengembangan kapasitas dalam mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pertanian di Kabuptaen Sidenreng Rappang sangat dibutuhkan, karena pertanian menjadi pendapatan mayoritas masyarakat dan konstribusi pertanian sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Konsep pengembangan kapasitas (*capacity building*) yang diuraikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) akan digunakan untuk mengukur seberapa besar upaya pemerintah daerah untuk menjadikan organisasinya efektif, lebih terarah dan meningkat dari segi kinerja. Sebagai program yang banyak berhubungan langsung dengan proyek pembangunan Negara dunia ketiga, pengembangan kapasitas (*capacity building*) ini telah

menjadi bagian sangat penting dalam pembahasan lembaga internasional; *united nations* yang memberi rujukan “*capacity building*”. Pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) menurut UNDP (1998) bermuara pada tiga level pengembangan kapasitas yakni : 1) level individu, 2) level organisasi, dan 3) level sistem.

1. Level Individu, yaitu pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki keterampilan, pendidikan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja sehingga memiliki kemampuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
2. Level Organisasi, yaitu pada penataan manajemen dan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, budaya kerja organisasi, dan hubungan atau jaringan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.
3. Level Sistem, yaitu pada pengembangan visi misi, program kerja dan perbaikan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

Urgensi penelitian ini memfokuskan pada pengembangan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendorong produktivitas pertanian khususnya tanaman padi, dapat diartikan bahwa kemampuan pemerintah untuk merespon tantangan dan mencari solusi

baik pada level individu, level organisasi, dan level sistem dengan menformulasikan pendekatan model pengembangan kapasitas yang efektif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan berangkat dari berbagai argumen, fakta empirik dan sumber kepustakaan, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : **“Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (Studi Kasus : Upaya Mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam pengembangan kapasitas baik dari level sistem, organisasi maupun individu dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya pada tanaman pangan padi yang notabene menjadi potensi utama daerah dan pendapatan mayoritas masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga dapat diidentifikasi dan dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
2. Bagaimana Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang ?

3. Bagaimana Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang ?
4. Bagaimana Model Ideal Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 4) Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan Model Ideal Pengembangan Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran intelektual kearah pengembangan bidang kajian administrasi publik dan pengembangan konsep teori pengembangan kapasitas pemerintah.
- b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada objek yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi pedoman bagi para penentu dan pelaksana kebijakan terkait pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan saran dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengembangan Kapasitas dalam Ilmu Administrasi Publik

Pengembangan kapasitas dalam administrasi publik merupakan konsep yang penting dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas pelayanan publik. Menurut Holzer (2017), pengembangan kapasitas dalam administrasi publik mengacu pada upaya untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan sistem dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan, kinerja organisasi serta layanan publik.

Dalam Ilmu Administrasi Publik, seringkali mengalami perkembangan dan menemui problematika keilmuan, dan juga dihadapkan adanya anomali sehingga diperlukan suatu paradigma baru. Beberapa pakar secara komprehensif menjelaskan tentang pergeseran paradigma dalam Administrasi Publik melalui sudut pandang masing-masing. Perubahan-perubahan paradigma penting tersebut dapat dilihat dari pengkajian yang dikemukakan oleh Frederickson (1976, 2003), Henry (1986), Denhardt & Denhardt (2003, 2007), Dwiyanto (2004) dan Osborne (2010). Dalam perubahan paradigma perlu juga dipahami bahwa munculnya paradigma baru bukan berarti menghapus sama sekali keberadaan dari paradigma yang berlaku sebelumnya, paradigma yang sudah berlaku tetap berlaku sesuai dengan cara pandang, nilai-nilai atau metode-metode yang dipakai oleh sekelompok masyarakat ilmiah tertentu dan juga tergantung dari permasalahan atau problematika keilmuan yang dihadapi.

Pemikiran pertama sebagai hasil kajian yang mendalam pada Teori Administrasi Publik dikemukakan oleh Frederickson (1976, 2003:27-47) yang membagi perkembangan paradigma Administrasi Negara menjadi 6 (enam) paradigma yang lebih menekankan pada fokus, lokus dan nilai yang akan dicapai oleh Administrasi Negara, paradigma tersebut meliputi : 1) Birokrasi Klasik, Dalam paradigma ini disebutkan secara jelas mengenai fokus dan lokus dari administrasi publik, fokus meliputi struktur organisasi dan fungsi atau prinsip- prinsip manajemen, sedangkan lokusnya adalah birokrasi pemerintahan dan organisasi bisnis. Nilai yang ingin dicapai oleh paradigma ini adalah efisiensi, efektivitas, ekonomis dan rasionalitas; 2) Neobirokrasi, yang menjadi fokus dari paradigma ini adalah proses pembuatan keputusan dengan menerapkan pendekatan ilmu perilaku, ilmu manajemen, analisis sistem, dan riset operasi; sedangkan lokusnya adalah keputusan birokrasi pemerintah; dan nilai yang akan diwujudkan masih sama dengan paradigma klasik, yaitu efisiensi, efektivitas, ekonomis dan rasionalitas, 3) Kelembagaan, paradigma ini memusatkan perhatiannya pada pemahaman terhadap perilaku birokrasi, termasuk dalam perilaku pembuatan keputusan yang bersifat gradual dan inkremental, 4) Hubungan Kemanusiaan, pada paradigma ini yang menjadi fokusnya adalah dimensi-dimensi hubungan kemanusiaan dan aspek sosial psikologis; sedangkan lokusnya adalah organisasi atau birokrasi; dan nilai yang ingin dicapai adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan, minimalisasi perbedaan status dan hubungan pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan peningkatan kepuasan kerja, 5) Pilihan Publik, paradigma ini sangat kental hubungannya dengan politik

karena menyangkut pilihan-pilihan publik, yang menjadi fokus dari paradigma ini adalah pilihan-pilihan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik), dan 6) Administrasi Negara Baru, paradigma terakhir yang dikemukakan oleh Frederickson ini untuk menanggapi isu yang berkembang menyangkut nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, fokus dari paradigma ini adalah berkaitan dengan desain organisasi yang dibangun berdasar desentralisasi, demokrasi, responsif, partisipatif, dan memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemikiran kedua yang berhubungan dengan paradigma dalam Administrasi Publik dikemukakan oleh Henry (2008), yang membagi pembabakan paradigma berdasarkan pada periodisasi waktu. Paradigma 1 (1900-1929), dikenal sebagai paradigma dikotomi antara politik dan administrasi publik, berfokus pada organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran pada birokrasi pemerintah, sedangkan lokusnya adalah masalah pemerintahan, politik dan kebijakan. Paradigma 2 (1927-1937), dikatakan sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi karena berfokus pada prinsip-prinsip administrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaporan dan anggaran.

Paradigma ini kurang jelas dalam lokusnya karena prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku pada organisasi apapun. Paradigma 3 (1950-1970), paradigma ini melihat bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik karena fokusnya adalah perumusan kebijakan publik yang sarat dengan nilai-nilai politik dan lokusnya adalah birokrasi. Paradigma 4 (1956-1970) menganggap bahwa administrasi publik sebagai bagian dari ilmu administrasi. Dalam

paradigma ini manajemen dan organisasi dikembangkan secara ilmiah, fokus tidak hanya pada administrasi publik juga pada administrasi bisnis. Paradigma 5, (1970-, sekarang) pada paradigma ini dinyatakan bahwa administrasi publik sebagai administrasi publik. Pada paradigma ini administrasi publik dianggap sudah mempunyai fokus dan lokus yang jelas, fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Pada perkembangan lebih lanjut muncul Paradigma 6 (1990-sekarang), bahwa administrasi publik sebagai tata kelola atau pemerintahan (*governance*). Pada paradigma ini digunakan pendekatan yang multi dimensi, lokus dari studi administrasi publik sudah meliputi sektor publik, *private* dan *civil society*, sedangkan fokusnya adalah urusan-urusan publik yang memerlukan peran-peran dari pihak swasta dan masyarakat.

Perkembangan paradigma yang dikemukakan oleh kedua pakar tersebut seiring dengan perkembangan ilmu dan problematika yang dihadapi masih membuka peluang bagi pakar berikutnya untuk mengkaji tentang paradigma dalam administrasi publik. Denhardt & Denhardt (2003), Dwiyanto (2004) dan Osborne (2010) adalah para pakar yang menganggap bahwa paradigma yang dikembangkan tersebut masih menunjukkan adanya dominasi pemerintah yang masih besar dan perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai peran dari pemerintah. Hal ini dikarenakan bahwa aspirasi dari masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bermutu semakin mengemuka dengan diiringi oleh kemampuan dan kapasitas pemerintah yang semakin menurun untuk memenuhinya.

Sehubungan dengan hal itu, dominasi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik mulai diragukan keberadaannya, apalagi ketika aspirasi dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi semakin tinggi. Menurut Dwiyanto (2012:90) keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi menjadi sekedar kebutuhan, tetapi telah menjadi sebuah keharusan. Demikian juga yang dikemukakan oleh Cole (2006) tentang perlu adanya model baru untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang tinggi di sektor publik. “Kunci” yang harus dibuka untuk meningkatkan pelayanan yang berkinerja tinggi antara lain dengan berorientasi pada hasil, terjadi dinamika yang kompetitif, mengubah aturan main dan menumbuhkan kreativitas dalam memberikan pelayanan.

UNDP (*United Nations Development Programme*), menguraikan bahwa pengembangan kapasitas adalah proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan manusia, institusi, dan masyarakat untuk memahami dan memecahkan masalah secara efektif dalam konteks pembangunan. Strategi utama dalam pengembangan kapasitas dalam administrasi publik, termasuk pelatihan dan pembinaan, pertukaran pengetahuan, peningkatan sistem manajemen kinerja, dan reformasi kelembagaan. Pendekatan yang efektif mencakup penguatan kapasitas individual melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan kapasitas organisasi melalui perbaikan proses dan kebijakan, serta penguatan kapasitas sistem melalui reformasi struktural dan penggunaan teknologi informasi.

Sharma dan Shrestha (2019), implementasi pengembangan kapasitas dalam administrasi publik sering kali melibatkan pendekatan yang terintegrasi antara berbagai level (individu, organisasi, dan sistem) serta dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah dan mitra pembangunan. Menurut Varela et al. (2021), evaluasi yang efektif dari pengembangan kapasitas melibatkan pengukuran hasil yang jelas, seperti peningkatan layanan publik, peningkatan kepuasan masyarakat, dan perubahan dalam tata kelola dan manajemen publik.

OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), mempertegas bahwa pengembangan kapasitas dalam administrasi publik penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Implementasi pengembangan kapasitas administrasi publik yang berhasil dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan akses layanan publik, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan daya saing ekonomi.

Pengembangan kapasitas sebagai upaya dalam menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan serta mereformasi struktur kelembagaan dan budaya organisasi, memodifikasi mekanisme prosedur dan koordinasi, meningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumberdaya manusia, dan merubah sistem nilai dan sikap individu sebagai suatu cara untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih demokratis dalam mensejahterakan masyarakat. Pengembangan kapasitas dalam administrasi publik merupakan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam

menyediakan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Konsep dan Teori Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas berarti “proses individu, organisasi, dan sistem dalam masyarakat memperoleh, memperkuat, dan mempertahankan kemampuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan pembangunan mereka sendiri dari waktu ke waktu” (UNDP, 2009 : 5). Setelah perdebatan bertahun-tahun dalam komunitas pembangunan, “pengembangan kapasitas” disarankan untuk digunakan daripada “peningkatan kapasitas” karena mengacu pada sejumlah kelemahan konseptual dari “peningkatan kapasitas”. Pertama, hal ini mendefinisikan suatu proses yang dimulai dari bawah ke atas yang melibatkan pembuatan struktur baru dengan desain yang telah ditentukan sebelumnya, yang berarti tidak ada kapasitas yang ada untuk memulainya (OECD, 2008). Kedua, peningkatan kapasitas biasanya merupakan intervensi satu kali yang hanya mendukung langkah awal dalam menciptakan kapasitas (UNDP, 2009).

Pergeseran konseptual ini sejalan dengan evolusi kebijakan pembangunan secara keseluruhan dari bantuan pembangunan yang berfokus pada pemberian pinjaman uang kepada negara-negara berkembang, bantuan teknis berdasarkan keahlian asing dalam proyek-proyek yang tidak berhubungan dengan tujuan lokal, dan kerja sama teknis yang didorong oleh kekuatan eksternal yang mengabaikan pengembangan kapasitas lokal (UNDP , 2009). Pengembangan kapasitas lebih menekankan

pentingnya pengetahuan dan kapasitas lokal yang lebih kuat untuk memastikan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan (De Montalvo dan Alaerts, 2013).

Pengembangan kapasitas memiliki multi makna, dan interpretasinya tergantung pada siapa yang menggunakan dan dalam konteks apa. Secara umum, yang dipahami adalah bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu konsep yang terkait erat dengan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia. Namun, pemahaman konvensional mengenai konsep pengembangan kapasitas telah berubah selama beberapa tahun terakhir, dimana pengembangan kapasitas dipahami secara lebih luas dan holistik, yang mencakup aspek sosial, organisasi dan pendidikan (Enemark, 2006).

UNDP menawarkan definisi dasar: "sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan". Definisi ini memiliki tiga aspek penting, yakni: (1) kapasitas bukan merupakan suatu keadaan pasif, tetapi merupakan bagian dari suatu proses yang berkelanjutan; (2) menekankan pada SDM dan bagaimana SDM tersebut didayagunakan; dan (3) konteks keseluruhan di mana organisasi melakukan fungsifungsinya merupakan pertimbangan kunci dalam strategi pengembangan kapasitas (Enemark, 2006).

World Bank menekankan perhatian *capacity building* pada: (1) pengembangan SDM ; training, rekrutmen dan pemutusan pegawai

profesional, manajerial dan teknis; (2) keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumberdaya dan gaya manajemen; (3) jaringan kerja (network), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal; (4) lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang (*legislation*) yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi *development tasks*, serta dukungan keuangan dan anggaran; dan (5) lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja (Edralin, 1997).

Menurut Milen (2004: 12), kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi dan sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. Morgan (dalam Haryanto, 2014: 14) mengartikan kapasitas sebagai kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan.

Berbagai ahli mengembangkan ruang lingkup yang berbeda-beda terkait konsep pengembangan kapasitas (*capacity building*), Misalnya Grindle (1997:1-28) memasukkan perhatian kepada dimensi (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) penguatan organisasi; (3)

reformasi kelembagaan. Deborah Eade (1998) memusatkan perhatian pada tiga dimensi yaitu; (1) individu; (2) organisasi; (3) *network*. World Bank menfokuskan perhatian pada dimensi (1) pengembangan SDM; (2) organisasi; (3) jaringan kerja interaksi organisasi; (4) lingkungan organisasi; (5) lingkungan kegiatan yang luas.

Dalam beberapa literatur pembangunan, konsep *capacity building* sebenarnya masih menyisakan sedikit perdebatan dalam pendefinisian. Sebagian ilmuwan memaknai *capacity building* sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*), keduanya memiliki karakteristik diskusi yang sama yakni analisa kapasitas sebagai inisiatif lain untuk meningkatkan *government performance*.

Merilee S.Grindle (1997:6-22) "*Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance*". Jadi *capacity building* (pengembangan kapasitas) merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan *efficiency, effectiveness*, dan *responsiveness* kinerja pemerintah. Yakni *efficiency*, dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome, effectiveness* berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan dan *responsiveness* yakni

bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Pengembangan kapasitas didefinisikan oleh Brown (2001:25) sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Morison (2001:42) melihat *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok- kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Menurut Riyadi Soeprapto (2006:16) dapat dikemukakan tingkatan-tingkatan pengembangan kapasitas sebagai berikut :

- 1) Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.
- 2) Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi.
- 3) Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku,

pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Pengembangan Kapasitas mencakup tiga level sebagaimana ditegaskan oleh UNDP (1998), yaitu:

- a. Level individu, yaitu pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja sehingga berkemampuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Level organisasi, yaitu intervensi pada penataan manajemen dan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan atau jaringan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.
- c. Level sistem, yaitu intervensi pada pengaturan visi misi, program kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui intervensi pada level individu, level organisasi dan level sistem adalah suatu upaya dengan pendekatan multi- dimensi. Oleh karena itu, perencanaannya mesti ditentukan dalam tahapan waktu yang rasional : pendek, menengah, dan

panjang. Setiap tahapan harus ditetapkan prioritas-prioritasnya. Prioritas pertama dari semua tahapan tersebut adalah membuat kebijakan dan peraturan pendukung yang dapat menciptakan sistem yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Kebijakan dan peraturan pendukung dimaksud adalah penjabaran secara lebih operasional dari *framework* otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang wujudnya adalah penyesuaian dan modifikasi semua perangkat peraturan perundangan organik berupa kebijakan daerah seperti perda, keputusan kepala daerah, dan keputusan pimpinan DPRD. Semua kebijakan dan peraturan tersebut harus jelas menggambarkan sistem dan mekanisme prosedural yang melibatkan semua level tersebut. Prioritas berikutnya adalah menangani permasalahan yang terjadi dalam hubungan antar unit dan antar sektor di lingkungan pemerintah daerah.

Beberapa pendapat ahli yang berkaitan dengan teori pengembangan kapasitas sebagai berikut :

1. Teori Pengembangan Kapasitas oleh *United Nations Development Programme (UNDP)*

United Nations Development Programme (UNDP) adalah salah satu organisasi yang paling berpengaruh dalam mengembangkan dan mempopulerkan konsep pengembangan kapasitas. UNDP mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai "proses melalui mana individu, organisasi, dan masyarakat memperoleh, memperbaiki, dan mempertahankan keterampilan, pengetahuan, peralatan, dan

sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan."

Teori pengembangan kapasitas oleh UNDP menekankan tiga level kapasitas :

1. Kapasitas Level Individu : Melibatkan tingkat pendidikan, keterampilan dan pengetahuan individu melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional.
2. Kapasitas Level Organisasi : Berfokus pada peningkatan manajemen, struktur, proses, dan kultur organisasi untuk meningkatkan kinerja.
3. Kapasitas Level Sistem : Mencakup pengembangan visi misi, program kerja, kebijakan, kerangka regulasi, dan kelembagaan yang mendukung pengembangan kapasitas pada tingkat individu dan organisasi.

2. Teori Pengembangan Kapasitas oleh Bank Dunia

Bank Dunia juga memainkan peran penting dalam mengembangkan teori pengembangan kapasitas, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial di negara berkembang. Bank Dunia mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kemampuan individu dan institusi dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Menurut Bank Dunia, elemen kunci dari pengembangan kapasitas mencakup:

1. Lingkungan yang Kondusif : Menciptakan kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung.

2. Organisasi yang Efektif : Memperkuat struktur organisasi, proses, dan kultur kerja.
3. Sumber Daya Manusia yang Kompeten : Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu melalui pelatihan dan pendidikan.

3. Teori Pengembangan Kapasitas oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga berkontribusi pada teori pengembangan kapasitas, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan dan administrasi publik. OECD mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam pengembangan kapasitas:

1. Kepemimpinan dan Visi : Pemimpin yang mampu mengarahkan dan menginspirasi.
2. Sistem dan Proses Efektif : Struktur dan mekanisme yang mendukung kinerja.
3. Keterlibatan Stakeholder : Partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan.
4. Pembelajaran dan Inovasi : Kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi.

OECD menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup berbagai tingkat kapasitas dan melibatkan berbagai aktor dalam proses pengembangan kapasitas.

4. Teori Pengembangan Kapasitas oleh Peter Morgan

Peter Morgan adalah seorang ahli terkemuka dalam bidang pengembangan kapasitas yang bekerja dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA) dan berbagai organisasi internasional lainnya. Morgan mengusulkan konsep "kinerja kapasitas" yang menekankan lima dimensi kapasitas:

1. Keterampilan dan Pengetahuan : Kompetensi teknis dan manajerial individu.
2. Sistem dan Struktur : Proses dan mekanisme organisasi yang mendukung kinerja.
3. Sumber Daya : Akses keuangan, teknologi, dan sumber daya lainnya.
4. Kepemimpinan : Kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan perubahan.
5. Motivasi dan Komitmen : Tingkat dedikasi dan semangat individu dan organisasi.

Morgan menekankan bahwa pengembangan kapasitas harus dilihat sebagai proses dinamis dan kontekstual yang memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari konteks yang bersangkutan.

5. Teori Dimensi Pengembangan Kapasitas Menurut Brown

Teori dimensi pengembangan kapasitas menurut Brown mengacu pada konsep bahwa pengembangan kapasitas tidak hanya melibatkan peningkatan keterampilan individu, tetapi juga memperhatikan transformasi yang lebih luas di tingkat organisasi dan sistem. Berikut adalah penjelasan singkat tentang dimensi pengembangan kapasitas menurut Brown:

1) Dimensi Individu

- Keterampilan dan Kompetensi : Fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan manajerial yang diperlukan oleh individu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif.
- Pengembangan Pribadi : Termasuk pengembangan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan pemecahan masalah yang mendalam.

2) Dimensi Organisasi :

- Budaya Organisasi : Mendorong terciptanya budaya kerja yang mendukung inovasi, belajar berkelanjutan, dan kolaborasi di antara anggota organisasi.
- Struktur dan Proses: Memastikan bahwa struktur organisasi mendukung pengembangan kapasitas, termasuk adanya proses manajemen yang efektif dan mekanisme tata kelola yang transparan.

3) Dimensi Sistem :

- Kebijakan dan Regulasi : Menyelaraskan kebijakan dan regulasi untuk mendukung pengembangan kapasitas dalam konteks yang lebih luas.
- Sumber Daya dan Infrastruktur : Memastikan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi strategi pengembangan kapasitas.

Teori ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang holistik dalam pengembangan kapasitas, yang tidak hanya menekankan pada aspek individu, tetapi juga mempertimbangkan transformasi yang diperlukan di tingkat organisasi dan sistem untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dan berdampak luas.

6. Teori Pengembangan Kapasitas Menurut Grindle

Grindle mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas (*capacity development*) tidak hanya mencakup aspek teknis atau administratif semata, tetapi juga melibatkan transformasi dalam kemampuan, pengetahuan, dan kemauan dari individu, organisasi, dan sistem untuk menangani tugas-tugas yang diperlukan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pemerintahan daerah dan produktivitas pertanian, dimensi pengembangan kapasitas dapat dibagi menjadi beberapa aspek kunci:

- 1) Kapasitas Institusional : Menyangkut kekuatan dan kemampuan lembaga pemerintahan daerah untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan yang mendukung pertanian secara efektif. Ini mencakup kemampuan untuk merancang regulasi yang tepat, mengelola sumber daya dengan efisien, dan memberikan layanan yang berkualitas kepada petani.
- 2) Kapasitas Manajerial : Fokus pada kemampuan manajemen dalam mengatur sumber daya dan operasi sehari-hari untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dalam sektor pertanian. Hal ini meliputi kemampuan untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengontrol sumber daya secara efektif.
- 3) Kapasitas Teknis : Merujuk pada pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan oleh pejabat pemerintah daerah, petani, dan stakeholders lainnya dalam menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pertanian. Ini termasuk pemahaman tentang teknologi pertanian

terkini, pengelolaan tanah dan air, teknik pemupukan, dan penanganan hama.

- 4) Kapasitas Finansial : Kemampuan untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola anggaran dengan efektif untuk mendukung kegiatan-kegiatan pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Ini melibatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta kemampuan untuk mendapatkan sumber daya tambahan melalui pembiayaan eksternal atau kemitraan.

7. Teori Pengembangan Kapasitas menurut Morison

Menurut Morison (2001), pengembangan kapasitas dapat dijelaskan dalam beberapa dimensi yang penting untuk memahami bagaimana kapasitas dapat diperkuat dan dikembangkan dalam konteks organisasi atau lembaga. Berikut adalah penjelasan teori tentang dimensi pengembangan kapasitas menurut Morison :

1. *Technical Capacities* (Kapasitas Teknis) :

Kemampuan organisasi atau individu untuk menguasai dan mengimplementasikan teknik, metode, atau prosedur tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau mengatasi tantangan spesifik.

2. *Managerial Capacities* (Kapasitas Manajerial) :

Kemampuan untuk merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengawasi berbagai aspek operasional dan administratif dalam sebuah organisasi. Manajerial capacities mencakup keahlian dalam manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang mendukung tujuan jangka panjang organisasi.

3. *Institutional Capacities* (Kapasitas Institusional) :

Kemampuan organisasi atau institusi untuk membangun dan mempertahankan struktur, proses, dan budaya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Kapasitas institusional mencakup pengembangan kebijakan yang efektif, prosedur operasional standar yang jelas, dan budaya organisasi yang mempromosikan inovasi dan kinerja tinggi.

4. *Political Capacities* (Kapasitas Politik) :

Kemampuan organisasi atau individu untuk memahami, berpartisipasi dalam, dan memanfaatkan proses politik dan kebijakan publik untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup keterlibatan dalam advokasi kebijakan, diplomasi, dan keterampilan untuk membangun dan memelihara jejaring politik yang kuat.

5. *Financial Capacities* (Kapasitas Keuangan) :

Kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan dengan efektif dan efisien. Kapasitas keuangan mencakup pengelolaan anggaran, perencanaan keuangan jangka panjang, serta kemampuan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya keuangan eksternal.

- **Relevansi Teori Pengembangan Kapasitas dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian**

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, kajian pengembangan kapasitas secara umum ditentukan berdasarkan pada 3 (tiga) level, yaitu level individu, level organisasi dan level sistem dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, *output*, *outcome* yang telah ditentukan, walaupun pada dimensi yang lebih luas mengalami sedikit perbedaan.

Namun, jika diteliti secara seksama, konteks sistem, organisasi dan individu diuraikan oleh (UNDP, 1998; Brown, 2001; Morgan, 2006), Lingkungan (Bank Dunia, 2005 ; OECD, 2008), Institusi (Grindle, 1997; Morison, 2001) semuanya memiliki orientasi yang sama yakni bagaimana dimensi individu dan organisasi dapat berinteraksi dengan lingkungan dalam mengembangkan kapasitasnya, dan sistem merupakan lingkungan organisasi dan individu di dalam organisasi tersebut. Sehingga pengembangan kapasitas memiliki fokus pada level individu bersifat mikro, level organisasi bersifat meso dan level sistem sebagai struktur yang bersifat makro.

Tabel 2.1
Matriks Dimensi Pengembangan Kapasitas Menurut Para Ahli

Dimensi Pengembangan Kapasitas			
Pendapat Ahli	Dimensi Kajian		
	Mikro	Meso	Makro
UNDP (1998)	Individu	Organisasi	Sistem
Bank Dunia (2005)	Individu/Sumberdaya	Organisasi	Lingkungan
OECD (2008)	Individu/Innovasi	Organisasi/Kepemimpinan	Sistem
Morgan (2006)	Individu/Keterampilan/Motivasi	Organisasi/Kepemimpinan	Sistem
Brown (2001)	Individu/Kelompok	Organisasi	Sistem
Morison (2001)	Individu/Teknis	Organisasi/Manajerial	Institusional
Grindle (1997)	Individu	Organisasi	Reformasi Institusi

Sumber : UNDP (1998), Bank Dunia (2005), OECD (2008), Morgan (2006), Brown (2001), Morison (2001), Grindle (1997)

Dalam konteks produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, teori-teori pengembangan kapasitas ini sangat relevan. Peningkatan kapasitas individu, seperti pelatihan petugas lapangan dalam teknologi pertanian terbaru, rekrutmen tenaga penyuluh, rekrutmen petani

milennial, pemberian *reward* (penghargaan) dapat secara langsung mempengaruhi produktivitas petani. Peningkatan kapasitas organisasi, seperti penguatan struktur dan proses pada pemerintah daerah, manajemen organisasi, budaya kerja organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada petani. Peningkatan kapasitas sistem, seperti pengembangan visi misi dan reformasi kebijakan yang mendukung inovasi serta peningkatan akses ke sumber daya dan sarana prasarana pertanian, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas pertanian secara keseluruhan.

C. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah berarti upaya menyesuaikan, mereformasi, dan memodifikasi semua kebijakan, peraturan, prosedur, mekanisme kerja, koordinasi; meningkatkan keterampilan dan kualifikasi aparatur pemerintah daerah; dan merubah sistem nilai dan sikap yang dijadikan acuan aparatur pemerintah daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah tidak lepas dari eksistensi dari birokrasi itu sendiri yang cenderung berubah. Miftah Thoha (2005) menegaskan bahwa kalau birokrasi tidak melakukan perubahan atau revitalisasi dirinya, maka birokrasi akan digulung oleh perubahan itu sendiri. Artinya, kalau rakyat secara keseluruhan sudah banyak mengalami perubahan dan dinamis, sementara itu birokrasi publik tidak berubah dan

senantiasa mempertahankan stabilitasnya, maka rakyat akan meninggalkannya atau paling tidak akan berpaling mencari alternatif pelayanan birokrasi lain dan tidak mepedulikan lagi yang diperbuat birokrasi publik. Pada gilirannya birokrasi publik akan mengalami kesulitan untuk membangkitkan partisipasi rakyat atau masyarakat yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan itu.

Terdapat sembilan bidang yang perlu ditangani dalam pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Kerangka aturan Pemerintah Daerah
2. Pengembangan kelembagaan pemerintah daerah.
3. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.
4. Manajemen keuangan pemerintah daerah.
5. Mendukung dan memperkuat DPRD dan BPD/pemberdayaan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
6. Sistem perencanaan.
7. Pembangunan ekonomi daerah.
8. Manajemen proses transisi/peranan kepegawaian daerah.
9. Program-program sektoral untuk mendukung desentralisasi yang mencakup bidang-bidang:
 - a. Pendidikan.
 - b. Permukiman dan prasarana wilayah.
 - c. Pertanian (termasuk perkebunan dan peternakan)
 - d. Penanaman modal.
 - e. Industri dan perdagangan.

- f. Perhubungan.
- g. Kelautan dan perikanan.
- h. Sektor-sektor lain seperti lingkungan hidup, pariwisata, arsip, koperasi, dan lain-lain.

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014 menganut prinsip keragaman, partisipasi masyarakat secara aktif, demokratisasi, dan keadilan. Melalui prinsip-prinsip tersebut pemerintah daerah diberi wewenang sangat luas dengan harapan supaya mampu mengembangkan daerahnya sendiri menjadi daerah dengan masyarakatnya yang sejahtera.

Agar pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya menjadi daerah dengan masyarakatnya yang sejahtera tersebut maka pemerintah daerah harus melakukan *capacity building*. Dengan pengembangan kapasitas pada ketiga level pengembangan, maka pemerintah daerah akan dapat mengembangkan diri sebagai organisasi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah yang kapabel dan kredibel akan efektif dan efisien pula mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Pemerintah daerah yang demikian adalah pemerintah daerah yang melaksanakan fungsinya secara benar. Fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik yang *excellen/prima*. Pelayanan publik mencakup *public services*, *development for economic growth*, dan *public protective* (pelayanan masyarakat baik perorangan maupun kelompok, pembangunan sarana dan prasarana untuk pertumbuhan ekonomi daerah

dan nasional, dan pemberian ketentraman/keamanan/ketertiban kepada masyarakat). pemerintah daerah harus dapat memberikan pelayanan publik yang meliputi tiga bidang tersebut dengan kualitas pelayanan yang bagus/*better*, cepat/*faster*, dan murah/*cheaper*.

1) **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kapasitas**

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan daerah. Namun secara khusus dapat disampaikan bahwa dalam konteks otonomi daerah, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas menurut Riyadi Soeprapto (2006:19) meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Pertama, komitmen bersama. *Collective commitments* dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi (termasuk pemerintahan daerah) sangat menentukan sejauh mana pembangunan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staff yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pembangunan kapasitas bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.

Kedua, kepemimpinan. Faktor *conducive leadership* merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pembangunan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik (sebagaimana pemerintahan daerah), harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan juga realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan.

Ketiga, reformasi peraturan. Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal-formal-prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pembangunan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi (atau dapat dibaca penyelenggaraan peraturan yang kondusif) merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.

Keempat, reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan

iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pembangunan kapasitas dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

Kelima, pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Oleh karena pembangunan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia (*existing capacities*). Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.

2) Unsur-Unsur dalam Pengembangan Kapasitas

Ada beberapa aspek yang perlu diketahui sebelum sebuah program pengembangan kapasitas pemerintahan (khususnya pemerintahan daerah) dilakukan. Persyaratan itu antara lain partisipasi, inovasi, akses informasi, akuntabilitas dan kepemimpinan (Yuwono, 2003). Partisipasi merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting karena menjadi dasar seluruh rangkaian kegiatan pembangunan kapasitas. Partisipasi dari semua level, tidak hanya level staf atau pegawai saja, tetapi juga level pimpinan atas, menengah dan bawah sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan program pembangunan kapasitas pemerintahan daerah. guna mewujudkan hal ini,

maka sudah semestinya inisiatif partisipasi ini dibangun sejak awal hingga akhir program pembangunan kapasitas dalam rangka menjamin kontinuitas program.

Inovasi juga merupakan persyaratan lain yang tidak kalah penting mendesak. Harus diakui bahwa inovasi adalah bagian dari program pembangunan kapasitas, khususnya dalam kerangka menyediakan berbagai alternatif dan metode pembangunan kapasitas yang bervariasi, dan menyenangkan. Hampir tidak mungkin terjadi pembangunan kapasitas tanpa diikuti oleh inovasi (karena *capacity building* merupakan bentuk dari sebuah inovasi). Pembangunan mengabaikan, menghambat ataupun tidak memberikan ruang terhadap inovasi. Inovasi penting karena pekerjaan bukanlah sesuatu yang statis sifatnya, tetapi justru dinamis sesuai dengan tuntutan publik yang kian tinggi.

Kemudian, akses terhadap informasi merupakan persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan program pembangunan kapasitas. Pada bentuk organisasi yang tradisional dan birokratis, semua informasi dipegang dan dikuasai oleh pimpinan. Kondisi seperti ini jelas tidak memungkinkan pembangunan kapasitas. Sebaliknya, pembangunan kapasitas salah satunya harus dimulai dengan memberikan akses dan kesempatan untuk memperoleh informasi secara cukup baik dan efektif guna mendukung program yang akan dilaksanakan.

Akuntabilitas juga merupakan persyaratan lain yang tidak kalah urgennya. Akuntabilitas penting untuk menjaga bahwa program pembangunan kapasitas juga harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga

menuju pada suatu hasil yang diinginkan. Dengan kata lain akuntabilitas dibutuhkan dalam rangka penjaminan bahwa program pembangunan kapasitas pemerintahan daerah merupakan kegiatan yang *legitimate*, *kredibel*, *akuntabel* dan bisa dipertanggungjawabkan.

Unsur yang terakhir adalah kepemimpinan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas kepemimpinan memegang peranan penting dalam kesuksesan program pembangunan kapasitas organisasi. Kepemimpinan yang dipersyaratkan dalam pembangunan kapasitas antara lain adalah keterbukaan (*openness*), penerimaan terhadap ide-ide baru (*receptivity to new ideas*), kejujuran (*honesty*), perhatian (*caring*), penghormatan terhadap harkat dan martabat (*dignity*) serta penghormatan kepada orang lain (*respect to people*). Semakin pemimpin memberikan kepercayaan dan suasana kondusif pada staf untuk berkembang, maka akan semakin sukseslah program pengembangan kapasitas dalam sebuah organisasi.

3) Elemen-Elemen Pengembangan Kapasitas dalam Otonomi Daerah

Dalam mewujudkan otonomi daerah, maka strategi-strategi yang perlu dipersiapkan berdasarkan dimensi-dimensi, faktor pengaruh dan persyaratan dalam capacity building sebagaimana dikemukakan di depan adalah (1) penentuan secara jelas visi dan misi daerah dan lembaga pemerintah daerah, (2) perbaikan sistem kebijakan publik di daerah, (3) perbaikan struktur organisasi pemerintah daerah, (4) perbaikan kemampuan manajerial dan kepemimpinan pemerintah daerah; (5) pengembangan sistem akuntabilitas internal dan eksternal pemerintah daerah; (6) perbaikan budaya

organisasi pemerintah daerah; (7) pengembangan SDM aparat pemerintah daerah, (8) pengembangan sistem jaringan (*network*) antar kabupaten dan kota, serta (9) pengembangan, pemanfaatan, dan penyesuaian lingkungan pemerintah daerah yang kondusif.

Semua elemen yang harus dikembangkan atau diperbaiki di atas harus dilihat sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah sistem, apabila dibenahi yang satu dapat mempengaruhi yang lain. Bila dicermati elemen- elemen ini menyangkut kemampuan pemerintahan daerah dalam penyediaan *input* (semua *resources* yang dibutuhkan), proses (penerapan teknik dan metode yang tepat), *feedback* (perbaikan input dan proses), dan lingkungan (penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif).

4) Pengembangan Kapasitas sebagai Strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

Pengembangan kapasitas pada dasarnya merupakan parameter strategi bagi terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif. Dari sekian elemen *capacity building* yang telah dijelaskan sebelumnya, khususnya dalam pengembangan otonomi daerah di Indonesia, maka elemen-elemen yang nampaknya mendesak untuk segera diperbaiki menurut Soeprapto adalah sebagai berikut ;

- 1) Pengembangan Visi dan Misi Daerah dan Institusi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk saat ini nampaknya belum ada kejelasan mengenai ke mana kabupaten/kota sebagai daerah dan institusi dikembangkan.

Dengan kata lain, visi dan misi kabupaten/kota sebagai daerah dan institusi belum terumuskan secara tegas dan jelas. Visi dan misi masih disalah artikan sebagai motto, sesanti atau slogan pembangunan seperti tertulis di spanduk-spanduk pemerintah atau di atap-atap genting penduduk, dan walaupun tidak, masih berhenti dalam tataran filosofis saja. Padahal visi pada dasarnya merupakan mental model masa depan, cara pandang ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Demikian pula visi juga tidak boleh terlalu abstrak, tetapi benar-benar bisa dibayangkan bentuknya (*imaginable*), bisa dijangkau dan terukur (*tangible*) dan lebih penting benar-benar diinginkan (*desirable*). Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah harus punya misi yang jelas pula. Pernyataan misi membawa organisasi pada sebuah fokus, misi menjelaskan bagaimana melakukannya (LAN, 2000:1). Ibarat jalan, misi merupakan jalur yang harus dilalui agar tujuan dan sasaran organisasi dapat dilaksanakan, misalnya mempertimbangkan apa (*what*) yang akan dilakukan dan kapan (*when*) dilakukan.

Agar bidang-bidang strategis yang akan dikembangkan oleh daerah dalam rangka mencapai kejelasan visi dan misi tersebut nampak jelas, maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu;

- a) Menggali sebanyak mungkin informasi mengenai *capacity* dan *resources* yang dimiliki daerah, baik informasi dari dalam maupun luar organisasi,
- b) Menyusun Rencana Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dan Rencana Strategis Insitusi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Di samping dua hal di atas, yang tidak kalah penting adalah mewujudkan kepemimpinan yang 'visioner'. Yakni pemimpin yang mampu melihat jangkauan ke depan yang berskala lokal, nasional maupun global. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa visi dan misi merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

2) Penguatan Kelembagaan Pemerintahan (*Institutional Strengthening*)

Dalam Rencana Strategis Institusi Pemerintah, bidang-bidang strategis yang harus dikembangkan sangat menentukan jenis dan jangkauan kebijakan tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan yang perlu dikembangkan. Dalam perencanaan strategis formal berkaitan dengan tiga tipe perencanaan; *strategic plans*, *medium-range programs*, *short-range budgets and operating plans*. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini antara lain tipe, jumlah serta kualitas institusi pemerintahan yang diperlukan, jenis dan tingkat *managerial skills* yang dibutuhkan termasuk tipe kepemimpinannya, dan sistem akuntabilitas publik serta budaya

organisasi pemerintahan. Dengan demikian dimensi yang perlu dikembangkan dalam penguatan kelembagaan meliputi : (1) pengembangan kebijakan, (2) pengembangan (*network*) organisasi, (3) pengembangan manajemen, (4) pengembangan sistem akuntabilitas publik, dan (5) pengembangan budaya organisasi.

3) Pengembangan SDM Aparat Pemerintahan.

Banyak bentuk yang bisa dipilih dalam model pengembangan SDM pemda. Namun demikian perlu adanya framework pengembangan yang relevan bagi setiap aktifitas yang ada. Misalnya, bidang-bidang strategis dalam Rencana Strategis pemda juga seharusnya menentukan jenis, jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan di daerah khususnya bagi keperluan lembaga/institusi pemerintah daerah. Pengalaman menunjukkan bahwa seringkali pengembangan SDM tidak dikaitkan dengan kebutuhan strategis daerah, bahkan terkesan kurang memberikan kontribusi bagi pemerintahan daerah itu sendiri. Dalam konteks SDM ini hendaknya difokuskan pada pengembangan (1) ketrampilan dan keahlian, (2) wawasan dan pengetahuan, (3) bakat dan potensi, (4) kepribadian dan motif bekerja, dan (5) moral dan etos kerjanya.

Agar pengembangan SDM di daerah lebih mengenai sasaran, maka dalam *capacity building* perlu diperhatikan empat

fase dasar yang akan dilalui Trostle, dalam Grindle,(1997) dalam Soeprapto (2006:29); pertama, fase desain (*a design phase*), meliputi keterlibatan pihak-pihak atau donor constituency tertentu yang bisa menghasilkan masukan (*resulting in*) bagi strategi pengembangan SDM, baik dari dalam maupun luar lembaga pemerintah Grindle misalnya, para administrator, komisaris, anggota dewan, yayasan swasta dll. Kedua, fase implementasi proyek (*project implementation phase*) dimana menyeleksi kontraktor pelaksana atau unit- unit administratif tertentu untuk memulai dan mengimplementasikan suatu program. Ketiga, fase akuisisi kemampuan (*a capacity acquisition phase*), dari berbagai kegiatan dan training yang terjadi serta pengalaman informal yang didapat akan membentuk keahlian- keahlian baru termasuk mengasah wawasan, bakat, potensi dan etos kerja. Keempat, fase pencapaian/kinerja (*performance phase*) dimana kemampuan (*capacity*) individu akan termanifestasikan dalam peraihan tugas dan hasil evaluasi akhir. Hal lain yang perlu diperhitungkan dari setiap fase-fase tersebut adalah adanya pengaruh lain berupa kejadian-kejadian (*events*) yang mungkin tidak bertalian dengan program misalnya, rotasi jabatan, perubahan politik, peristiwa force majeure seperti bencana alam, konflik sosial dan sebagainya, yang seringkali menyebabkan program pengembangan SDM terkesan tambal sulam serba instant dan mengalami stagnasi.

4) Pengembangan *Network* Pemerintahan.

Pengembangan network disini mungkin memiliki kedekatan makna dengan membangun kemitraan (*partnership*), *joint ventures* atau aliansi strategis. Pada intinya merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling pengertian dan membesarkan. Meskipun Rencana Strategis telah memberikan arah pengembangan SDM dan kelembagaan yang ada di daerah, untuk melakukan berbagai pengembangan tersebut daerah pasti memiliki berbagai keterbatasan. Karena itu harus dimungkinkan proses belajar sendiri dan kolaborasi dengan pihak lain (misalnya, *public-private partnership*). Seperti diuraikan Edward J. Blakely (1994) dalam Soeprapto (2006:30) “..No matter what organizational structure is selected, public agencies and private firms have to enter into new relationship to make the development process work...”. Disamping itu daerah juga punya kebebasan untuk belajar atau saling belajar dan membagi pengalaman (*action and learning by doing*) dengan; (1) Kabupaten atau Kota lain baik dari dalam maupun dari luar negeri. mengembangkan model sister city dengan kota di negara lain, sehingga akan terjadi *spillover* pengalaman dari tempat lain, (2) organisasi-organisasi profesional atau bisnis yang ada, dan (3) pusat- pusat studi dan pengembangan seperti perguruan tinggi, lembaga riset swasta,

dan LSM yang sesuai dengan kebutuhan, melalui suatu “jaringan kerja” yang terencana. Kolaborasi antara mereka sangat membantu proses belajar cepat di daerah, menciptakan keterkaitan (*linkage*) kepentingan yang lebih luas (*broad-base*) namun dengan tetap memperhatikan prinsip “duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”.

5) Pengembangan dan Pemanfaatan Lingkungan Pemerintahan.

Kinerja pengembangan kapasitas pemerintah daerah secara signifikan dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tindakannya (*action environment*). Karena pemda sebagaimana sebuah organisasi tidak berada dalam situasi vakum. Artinya banyak faktor-faktor eksternal-internal lain yang mempunyai unsur-unsur kekuatan langsung dan kekuatan tidak langsung, disamping memberi kontribusi bagi munculnya *capacity gap* atau situasi *uncertainty* dalam pengembangan kapasitas. Dengan kata lain pemerintah daerah sangat membutuhkan suatu lingkungan yang kondusif, yang dari padanya dapat dimanfaatkan untuk berbuat terbaik baik daerah. Disini yang harus dilakukan adalah (1) memanfaatkan segala *resources* fisik dan non-fisik yang dimiliki secara terukur dan bertanggung jawab, 2) untuk menjamin kemampuan yang berkelanjutan maka perlu dihindari adanya peraturan perundangan yang tumpang tindih yang menjadi sumber kesimpang siuran, ketidakjelasan interpretasi dan rawan

penyalahgunaan (*wanprestasi*), dan (3) memantapkan keamanan dan ketertiban di daerah secara mandiri, menegakkan kepatuhan kepada peraturan, pengawasan dan penegakkan hukum. Peraturan perundangan yang mendukung pembangunan lokal harus dimanfaatkan sementara keamanan dan ketertiban harus diciptakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Dalam penyelenggaraan *capacity building* dalam pemerintahan daerah tersebut nampak dibutuhkan pendekatan yang tepat. Pendekatan yang digunakan meliputi (1) intervensi strategis, (2) *institution building*, (3) aksi langsung, dan belajar melalui aksi tersebut, dan (4) perbaikan berkesinambungan. Intervensi strategis merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada intervensi titik-titik strategis, yang menentukan nasib suatu lembaga pemerintahan atau daerah. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, perhatian hendaknya diberikan kepada titik yang paling strategis sebagaimana diungkapkan sebagai dimensi-dimensi pengembangan, dan kepada bidang-bidang strategis yang ditetapkan dalam Renstra.

Pendekatan *institution building* diarahkan kepada mengubah cara berpikir, sikap dan kebiasaan lama yang telah berurat akar dan memberikan wawasan baru atau nilai-nilai baru seperti nilai-nilai yang terdapat dalam *reinventing government* dan tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu, pendekatan ini ditujukan

untuk melakukan pembenahan-pembenahan organisasi, manajemen dan kebijakan serta sistem akuntabilitas publik dan pembinaan moral dan etos kerja. Dalam konteks otonomi daerah pendekatan ini diarahkan kepada pengurangan hambatan-hambatan struktural, memberi ruang untuk melakukan terobosan (*deregulasi, debirokrasi*) atau keleluasaan untuk bertindak, memberikan penghargaan terhadap prestasi, dan memberi kewenangan lebih luas kepada unit organisasi atau jabatan yang lebih rendah.

Pendekatan aksi dan belajar langsung diarahkan untuk mendorong kebiasaan empiris, menjadikan kinerja sebagai ajang pembelajaran, dan melakukan perubahan berdasarkan hasil belajar. Diharapkan dengan aksi dan belajar langsung tersebut, profesionalisme dan kemampuan belajar sekaligus kemandirian akan terus meningkat. Kegagalan dan kesalahan masa lalu harus dapat ditolerir karena akan digunakan sebagai bahan pembelajaran. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah pasti mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi pengalaman ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerjanya menuju otonomi yang dikehendaki.

Pendekatan perbaikan berkesinambungan berkenaan dengan upaya untuk terus melakukan tindakan koreksi melalui proses *feedback* dari program-program yang telah selesai dikerjakan. Pada waktu yang lampau, tradisi evaluasi dan koreksi

ini jarang dilakukan. Melalui pendekatan berkesinambungan ini, kekurangan-kekurangan pada input, proses, dan feedback serta kegagalan dalam menyesuaikan dengan lingkungan, dapat dikoreksi. Dalam pendekatan ini, kegiatan masa mendatang harus dilihat sebagai kesinambungan masa lampau. Untuk menuju pada titik otonomi daerah yang diinginkan maka perbaikan berkesinambungan ini sangat diperlukan.

Dalam penyelenggaraan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah harus disadari banyaknya hambatan, halangan, dan rintangan yang mungkin akan dihadapi guna kesuksesan program tersebut.

5) Hambatan-Hambatan dalam Pengembangan Kapasitas

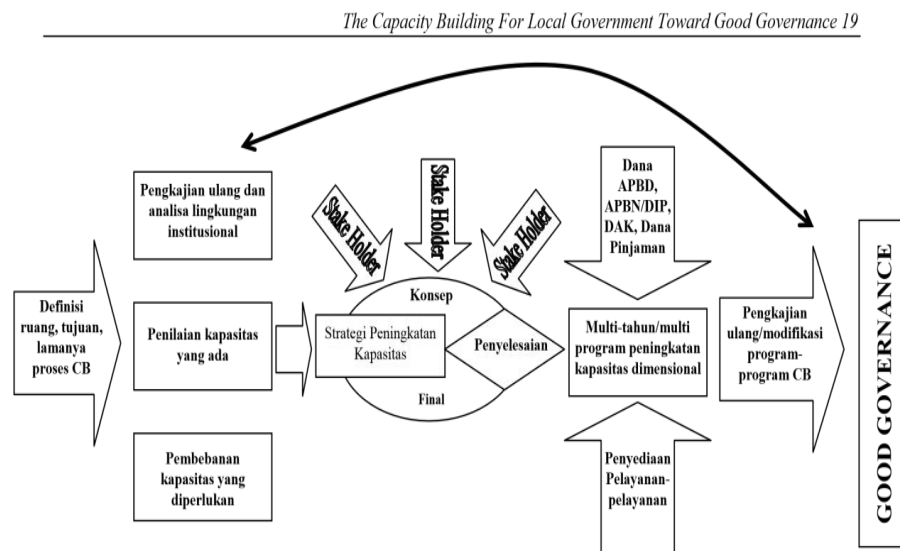
Hambatan-hambatan dalam pembangunan kapasitas ini menurut Soeparto meliputi beberapa hal, antara lain *resistensi legal-prosedural*, resistensi dari pimpinan khususnya *supervisor* (pimpinan menengah dan bawah); resistensi dari staff itu sendiri; resistensi konseptual; dan juga mispersepsi tentang pembangunan kapasitas.

1. Resistensi *legal-prosedural*, biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang kurang atau tidak mendukung program pembangunan kapasitas ini dengan berbagai alasan. Walaupun barangkali penyebab utamanya adalah rendahnya motivasi mereka untuk berinovasi, berkompetisi serta tidak mau melakukan perubahan.

Hal ini karena perubahan merupakan sesuatu yang dinamis dan jelas-jelas menolak paham dari kelompok *status-quo*.

2. Resistensi dari pimpinan, khususnya supervisor ini mendasarkan diri pada argumen bahwa dengan pembangunan kapasitas, maka mau tidak mau kemampuan staff akan meningkat dan bisa saja mengancam kedudukan struktural mereka. Ini persepsi yang berlebihan tetapi bisa dimaklumi karena aspek motivasi dan kebutuhan kekuasaan.
3. Resistensi dari staf, yang bervariasi bisa kecil ataupun besar tergantung kultur dan suasana yang ada dalam lingkungan organisasi tertentu. Hambatan yang paling utama adalah bahwa pembangunan kapasitas merupakan sebuah bentuk inovasi atau perubahan sehingga mereka mesti melakukan perubahan atau usaha-usaha inovatif lainnya. Mungkin ada sebagian staff yang kurang dinamis dan tidak positif menyambut perubahan sehingga berdampak negatif terhadap program pembangunan kapasitas tersebut.
4. Resistensi konseptual terhadap konsep pembangunan kapasitas muncul karena program pembangunan kapasitas menimbulkan pekerjaan dan beban yang harus ditanggung oleh semua elemen dalam organisasi tertentu. Mereka berpendapat bahwa dengan lebih aktif akan menambah beban kerja mereka, padahal beban kerja ini belum tentu berkolerasi dengan penambahan upah.

Menurut Soeprapto (2006:19) *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas) jika dilihat dari prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:



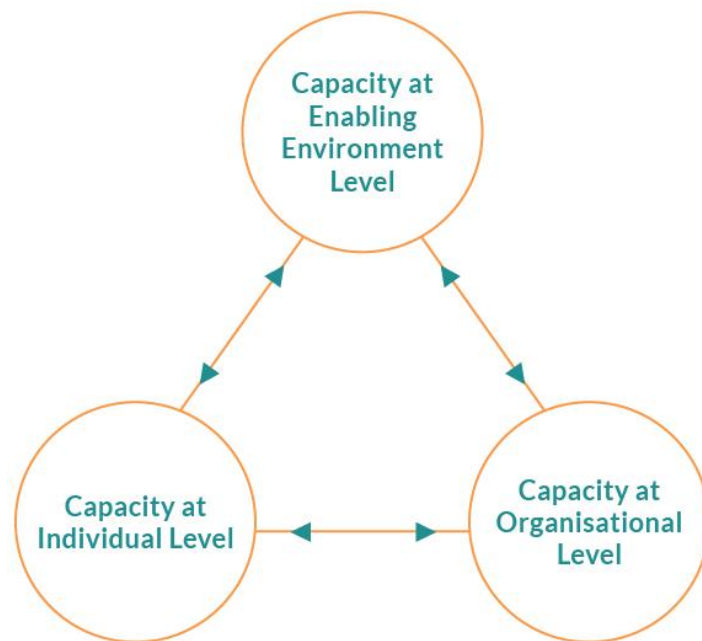
Gambar 2.1 *Capacity Building*

6) Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung Produktivitas Pertanian

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah adalah proses meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan berbagai fungsi dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Model pengembangan kapasitas pemerintah daerah mencakup berbagai pendekatan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas individu, organisasi, dan sistem dalam konteks pemerintahan daerah.

Pengembangan kapasitas merupakan suatu pendekatan yang penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam sektor pertanian. Salah satu kerangka kerja yang digunakan secara luas untuk memahami dan

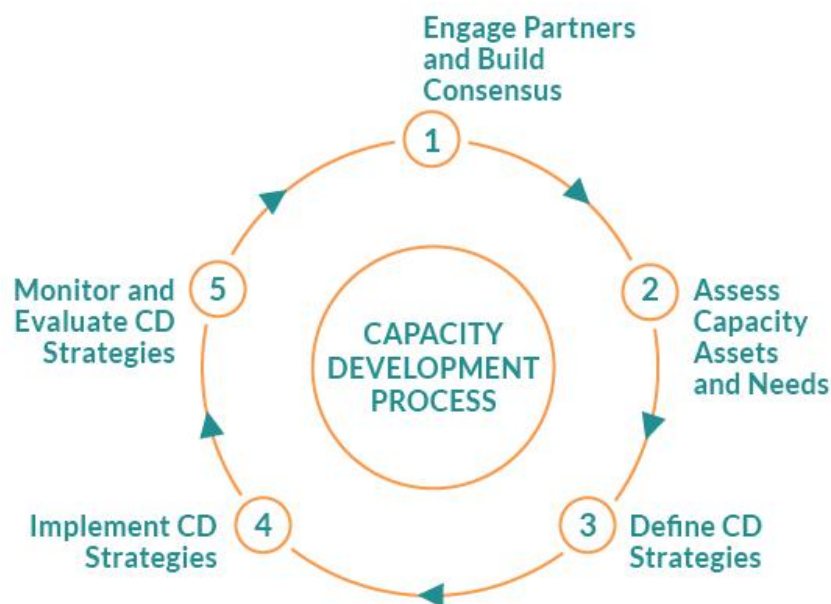
mengimplementasikan pengembangan kapasitas adalah *UNDP Capacity Development Framework*. Kerangka kerja ini memberikan pendekatan holistik dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung produktivitas pertanian.



Gambar 2.2 *UNDP Capacity Development Framework*

Kerangka ini menekankan pada pendekatan holistik dan sistematis dalam mengembangkan kapasitas. UNDP (1998) mengartikan *Capacity Building* sebagai kemampuan individu, kelompok, organisasi, institusi dan masyarakat untuk melaksanakan fungsi mereka, termasuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan mereka. Mengikuti pengertian tersebut, maka capacity building dapat dianalisis dari tiga level, yaitu: (1) tingkat individu (2) tingkat organisasi; dan (3) tingkat sistem, yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Pembagian level ini

hanya untuk memudahkan analisis terhadap kapasitas tersebut. Pada tingkat sistem, masalah yang dijadikan ukuran kapasitas adalah “*enabling environment*”, yaitu satu kemampuan dari sebuah sistem dalam memberikan dukungan kepada elemen-elemen sistem, yang menjadi sub sistemnya untuk menjalankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Pada tingkatan organisasi atau institusi, masalah yang dijadikan ukuran adalah dukungan aspek-aspek yang ada dalam organisasi dalam menyumbang kapasitas organisasi tersebut. Sedangkan pada tingkatan individu adalah menyangkut kapasitas atau kemampuan individu dan hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasinya.

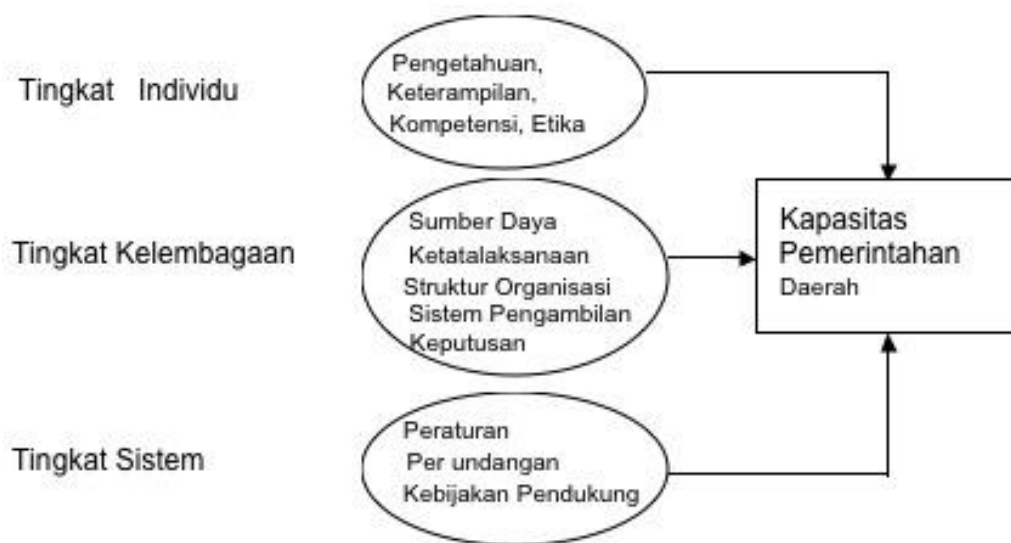


Gambar 2.3. Siklus Pengembangan Kapasitas menurut *UNDP*

Upaya pengembangan kapasitas bagi aparatur penyelenggara pemerintahan di daerah dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, dapat diidentifikasi dalam tiga level sebagai satu kesatuan yang utuh sebagaimana digunakan oleh UNDP sebagai

pedoman dalam program peningkatan kapasitas, yaitu: Level Individu, Level Organisasi, dan Tingkat Sistem.

Keseluruhan upaya pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya mendukung produktivitas pertanian dari ketiga level tersebut, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2.4. Kerangka Pengembangan Kapasitas menurut *UNDP*

Berdasarkan kerangka tersebut di atas, maka dalam pengembangan kapasitas dalam upaya mendukung produktivitas pertanian jelas tidak hanya terbatas kepada upaya-upaya atau program-program pelatihan bagi para aparatur pelaksana pelayanan publik semata-mata, melainkan termasuk strategi kebijakan pengembangan sistem hukum dan perundang-undangan daerah yang mendukung pelaksanaannya, serta penataan sistem kelembagaan organisasi penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud termasuk dalam upaya mendukung produktivitas pertanian.

a. Pengembangan Kapasitas pada Level Individu

Pengembangan kapasitas pada level individu di pemerintah daerah merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian karena setiap individu memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perubahan dan inovasi. Memiliki SDM yang profesional, memiliki kemampuan beserta skill yang dibutuhkan, seperti pembelajaran, praktek dan rekrutmen. Konteks yang disampaikan oleh Grindle dalam mengembangkan sumber daya manusia berfokus pada menghadirkan serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pekerjaan.

Teori Pembelajaran dan Pengembangan Individu (*Individual Learning and Development Theory*) menjelaskan bagaimana individu dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Teori pembelajaran dan pengembangan individu menekankan bahwa individu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi mereka melalui interaksi langsung dengan pengalaman, baik itu dalam bentuk aktivitas fisik maupun mental. Pendekatan ini dikenal sebagai pembelajaran berbasis pengalaman atau *experiential learning*, yang diperkenalkan oleh David A. Kolb dalam karyanya yang terkenal "*Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*" (1984).

Teori Motivasi (*Motivation Theory*) befokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu untuk meningkatkan kinerja dan keterlibatan mereka dalam proses pengembangan kapasitas. Teori motivasi merupakan landasan penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu untuk meningkatkan kinerja dan keterlibatan mereka dalam proses pengembangan kapasitas. Salah satu teori motivasi yang signifikan adalah teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow, yang diuraikan dalam makalah seminalnya berjudul "*A Theory of Human Motivation*" yang diterbitkan pada tahun 1943 di *Psychological Review*. Abraham Maslow mengemukakan bahwa motivasi individu dipengaruhi oleh berbagai tingkat kebutuhan yang tersusun secara hierarkis. Teori ini dikenal sebagai Hierarki Kebutuhan Maslow, yang terdiri dari lima tingkat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi individu secara berurutan diantaranya Kebutuhan Fisiologis, Kebutuhan Keamanan, Kebutuhan Sosial, Kebutuhan Penghargaan dan Kebutuhan Aktualisasi Diri.

Untuk mewujudkan dan menciptakan SDM yang unggul maka dihadirkanlah latihan pendidikan, serta pemberian hadiah berupa pembayaran gaji bulanan, memberikan bonus sesuai dengan ketentuan instansi, manajemen lingkungan kerja dan rekrutmen pegawai yang tepat untuk menyaring para pegawai dalam bekerja. Pengembangan kapasitas pada level individu dalam penelitian ini akan berfokus pada : tingkat pendidikan SDM Pertanian,

keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian serta rekrutmen SDM pertanian.

Pengembangan kapasitas pada tingkat individu di pemerintah daerah sangat penting karena individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang adaptif akan menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Kemampuan individu dalam beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci dalam mempercepat perbaikan dan kemajuan di sektor pertanian secara keseluruhan.

b. Pengembangan Kapasitas pada Level Organisasi

Pengembangan kapasitas pada level organisasi pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian karena organisasi ini memiliki peran kunci dalam mengelola kebijakan, sumber daya, dan dukungan bagi sektor pertanian di tingkat lokal.

Dalam Teori Kapasitas Organisasi (*Organizational Capacity Theory*) berfokus pada peningkatan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan mereka melalui pengembangan manajemen, struktur, proses, budaya, sumber daya manusia, dan teknologi. Teori Kapasitas Organisasi (*Organizational Capacity Theory*) merupakan kerangka konseptual yang mempertimbangkan bagaimana organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan strategisnya. Fokus utamanya adalah pada

pengembangan berbagai aspek internal organisasi yang mendukung efektivitas dan kinerja jangka panjang.

Organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan. Oleh karena itu koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi. Sebelum mengkoordinasikan setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program-program yang dilakukan pada organisasi, maka terlebih dahulu ketua atau tim penggerak mengkomunikasikan dengan anggota.

Teori Pengembangan Organisasi (*Organizational Development Theory*) menekankan pada proses perubahan terencana dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan karyawan/pegawai. Teori ini menggunakan pendekatan sistematis terhadap perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan karyawan melalui perubahan terencana. Pendekatan ini mengakui bahwa organisasi adalah sistem kompleks yang memerlukan penyesuaian dan pengembangan kontinu agar tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Organisasi adaptif merupakan organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan *stakeholder* dengan cepat dan *flexible*. Organisasi adaptif adalah proses pertumbuhan, perkembangan dan klimaks serta anti

klimaks dalam sebuah daur hidup. Organisasi adaptif mampu mendesain organisasi dan dapat mengakomodasi perubahan dengan dengan cepat dan mudah. Galbraith, J (Yuliani et al., 2020). Untuk itu organisasi harus mengarahkan seluruh sumber dayanya untuk mengikuti harapan-harapan dari lingkungannya. Konsep Adaptif Organisasi muncul bukan karena kebetulan, tetapi merupakan tuntutan kepada organisasi untuk melakukan perubahan dalam lima area perubahan seperti *people*, proses, strategi, struktur organisasi dan teknologi. Organisasi adaptif dapat memahami segala perubahan lingkungann organisasinya baik internal maupun eksternal, perubahan yang terjadi merupakan suatu yang alami Kenney dan partner (Yuliani, 2020).

Penguatan organisasi yang merupakan *middle theory* yakni menurut Agus Dwiyanto (Rifan et al., 2019), kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauhmana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa kinerja organisasi mencakup lima aspek, yaitu (1) produktivitas, (2) kualitas layanan, (3) responsivitas, (4) responsibilitas, dan (5) akuntabilitas.

Pengembangan kapasitas pada level organisasi yang dimaksud adalah berfokus kepada bagaimana tata manajemen yang bagus dan sesuai untuk meningkatkan dan menjadikan tujuan awal

berhasil dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintah daerah, dengan fokus : manajemen organisasi, budaya kerja dan pengembangan SDM pemerintah daerah pada sektor pertanian.

Dengan meningkatkan kapasitas adaptif pada tingkat organisasi pemerintah daerah, akan terbentuk lingkungan yang mendukung untuk inovasi, pengembangan teknologi, dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan dalam sektor pertanian. Hal ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih adaptif dan efisien dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

c. Pengembangan Kapasitas pada Level Sistem

Pengembangan kapasitas pada level sistem pemerintah daerah merupakan upaya untuk memperkuat kemampuan entitas pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan lingkungan dan situasi yang terus berubah, terutama dalam konteks meningkatkan produktivitas pertanian. Ini melibatkan serangkaian strategi dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi, teknologi, dan kebijakan yang terjadi dalam sektor pertanian.

Teori Sistem (*Systems Theory*) mengkaji bagaimana komponen-komponen dalam suatu sistem saling berinteraksi dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan. Dalam konteks pengembangan kapasitas pemerintah daerah, ini mencakup interaksi antara kebijakan, regulasi, sumber daya, dan teknologi.

Dalam konteks pengembangan kapasitas pemerintah daerah, Teori Sistem dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis interaksi antara berbagai komponen yang berkontribusi pada kinerja keseluruhan pemerintah daerah. Beberapa komponen kunci yang harus dipertimbangkan meliputi kebijakan, regulasi, sumber daya, dan teknologi. Kebijakan dan regulasi harus saling mendukung dan konsisten satu sama lain untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kapasitas. Pada aspek kebijakan, ketidakkonsistenan atau konflik antara kebijakan dapat menghambat kinerja pemerintah daerah. Kebijakan dan regulasi harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal, seperti perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada aspek sumber daya, Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam sistem pemerintah daerah. Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kinerja. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung program dan inisiatif pengembangan kapasitas. Ini mencakup alokasi anggaran yang tepat, pengawasan, dan akuntabilitas. Infrastruktur yang memadai dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian dan pengembangan kapasitas.

Pada aspek teknologi, penggunaan teknologi baru dan inovatif dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah daerah. Teknologi informasi, misalnya, dapat digunakan untuk mengelola data pertanian, memantau kinerja, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Teknologi harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik daerah. Penyesuaian teknologi yang tepat dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas.

Teori Sistem menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengelola kompleksitas dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Dengan menganalisis interaksi antara kebijakan, regulasi, sumber daya, dan teknologi, pemerintah daerah dapat merancang dan melaksanakan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kinerja keseluruhan. Pendekatan holistik dan interdisipliner dari Teori Sistem membantu dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Pengembangan kapasitas pada level sistem menyangkut juga kemampuan untuk melembagakan keseluruhan kapasitas individu dan organisasional sebagai sebuah prosedur, mekanisme, dan standar baku dalam kerja pemerintah daerah. Hal ini akan terlihat dari produk-produk kebijakan, misalnya Perda, *Standard Operating Procedure* (SOP), keputusan dan edaran bupati, ataupun

keputusan pimpinan DPRD pada semua tingkatan pemerintahan. Pada tingkat yang paling tinggi, pelembagaan dapat dilihat dari adanya kesepakatan semua stake-holders di tingkat lokal mengenai nilai, mekanisme, prosedur yang bersifat baku dan mengikat bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Kepastian hukum dan kejelasan regulasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan visi dan misinya. Daerah yang memiliki regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten dan adil membuat birokrasi dapat bekerja dengan baik untuk mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.

Pengembangan Kapasitas pada level sistem menjadi hal sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi mencapai visi dan misinya. Ketersediaan dokumen proses operasional menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari, sekaligus menjadi panduan dalam memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pengembangan kapasitas sistem (ketatalaksanaan) dalam penelitian ini terdiri atas pengembangan kapasitas visi misi dan program kerja, perbaikan kebijakan pada sektor pertanian, serta sistem manajemen dan tata kelola pertanian.

Pengembangan kapasitas adaptif pada level sistem pemerintah daerah merupakan langkah yang krusial dalam meningkatkan

produktivitas pertanian, karena membantu memastikan bahwa pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menyokong petani dan menjawab tantangan yang terus berubah dalam sektor pertanian.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Dengan kata lain, dengan menelaah penelitian terdahulu, seseorang akan dengan mudah melokalisasi kontribusi yang akan dibuat. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2016) dengan judul: "Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian", tempat terbit: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 2, No. 1, hlm. 1-10. Fokus meneliti dimensi kebijakan, organisasi, individu, teknologi, dan kerjasama dalam konteks pengembangan kapasitas

pemerintah daerah di sektor pertanian. Perbedaan penelitian ini lebih mengarah pada penyusunan dan implementasi kebijakan serta struktur organisasi dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2018) dengan judul "Evaluasi Program Pengembangan Kapasitas di Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian", terbit pada Jurnal Pengembangan Wilayah, Vol. 4, No. 2, hlm. 45-60. Fokus penelitian ini mengkaji program-program pengembangan kapasitas yang telah dilaksanakan di pemerintah daerah, dengan penilaian terhadap dampaknya terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode evaluasi program yang lebih aplikatif dengan fokus pada hasil dan dampak yang diukur secara kuantitatif.

Ketiga, Penelitian oleh Wulandari (2020) dengan judul: "Kolaborasi Antarlembaga dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah di Sektor Pertanian. Terbit pada Jurnal Kolaborasi dan Pembangunan, Vol. 6, No. 1, hlm. 78-92. Fokusnya, menganalisis peran kolaborasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di sektor pertanian. Perbedaan penelitian ini lebih menonjolkan aspek kolaborasi dan kerja sama antar berbagai pihak sebagai kunci dalam pengembangan kapasitas.

Keempat, Resia,O. (2019) dengan judul "Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Potensial di Kabupaten Kutai Timur". Penelitian ini mendeskripsikan bahwa terdapat keterbukaan ruang kerjasama dengan unsur swasta dalam pemanfaatan Sumber Daya

Potensial khususnya pada bidang pertanian dan perkebunan. Selanjutnya dari tinjauan dimensi *learning capacity* ditemukan kendala dalam hal kekurangan SDM profesional terutama dalam bidang perencanaan sumber daya potensial masih membutuhkan tenaga profesional yang mampu memaksimalkan potensi daerah. Selain itu kebijakan pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan hal ini menjadi kendala dalam optimalisasi sumber daya potensial. Pelaksanaan program-program pendukung Sumber Daya Potensial terbatas karena adanya defisit anggaran di Kabupaten Kutai Timur beberapa tahun ini. Sehingga program pemerintah yang mendukung pengembangan sumber daya potensial tidak dapat dilakukan secara maksimal. Peran pemimpin menonjol dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya potensial terlihat dari arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan melalui visi yang berfokus pada sektor agribisnis menunjukkan komitmen untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syamsu Alam dan Ashar Prawitno (2015) dengan Judul “Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan kapasitas organisasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone dan menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone dalam pengembangan kapasitas organisasi pemerintahnya guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang difokuskan pada tiga aspek yaitu pengembangan sumber daya fisik, pengembangan

proses operasional dan pengembangan sumber daya manusia. Hasil temuan dari penelitian diketahui: (1) pengembangan kapasitas sumber daya fisik secara umum cukup baik, indikatornya yaitu sumber daya fisik, struktur organisasi, keuangan, perangkat hukum (aturan), dan sarana dan prasarana, hanya satu indikator yang mendapat penilaian kurang baik, yaitu kapasitas perangkat hukum; (2) pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) secara umum baik dengan indikatornya yaitu prosedur kerja, budaya kerja, dan kepemimpinan; (3) pengembangan kapasitas sumber daya manusia, indikatornya yaitu pengetahuan pegawai, keterampilan pegawai, serta perilaku dan etika kerja.

Keenam, Penelitian yang dilakukan Mohd. Riswan Bin Jamal (2021) dengan Judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Padi menuju Sidenreng”. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah daerah dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian padi menuju Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis. Namun, kebijakan peningkatan produksi pertanian padi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2017-2019) masih saja mengalami penurunan produksi dan pendapatan yang dipengaruhi oleh berbagai hambatan. Padahal Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah lumbung pangan padi dan telah menjadi visi RPJMD 2018-2023 sebagai pusat agribisnis. Sehingga peneliti bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian padi menuju Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan pertanian, teori implementasi kebijakan dan teori peran. Adapun metode

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif dan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, studi pustaka dan dokumentasi sebagai pendukung informasi, kemudian data tersebut dianalisis.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Ardito Atmaka Aji (2014) dengan judul “Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Padi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember”. Fokus peneliti dengan melakukan analisis *SWOT* untuk mengembangkan komoditas padi, melakukan analisis rumusan alternatif strategi yang tepat untuk mengembangkan komoditas padi, dan menentukan prioritas strategi yang seharusnya dipilih, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah pusat/daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Metode penelitian tersebut menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis *SWOT*. Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa motivasi petani merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember. Kelemahan utama yang harus diperbaiki adalah kondisi finansial yang lemah, peluang utama yang dimiliki adalah peningkatan permintaan beras, dan ancaman utamanya berupa serangan organisme pengganggu tanaman.

Dari berbagai penelitian terdahulu diatas, maka dapat dikatakan jika penelitian dengan Judul “Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah (Studi : Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang) memiliki perbedaan mendasar, hal tersebut dapat dilihat pada fokus penelitiannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa

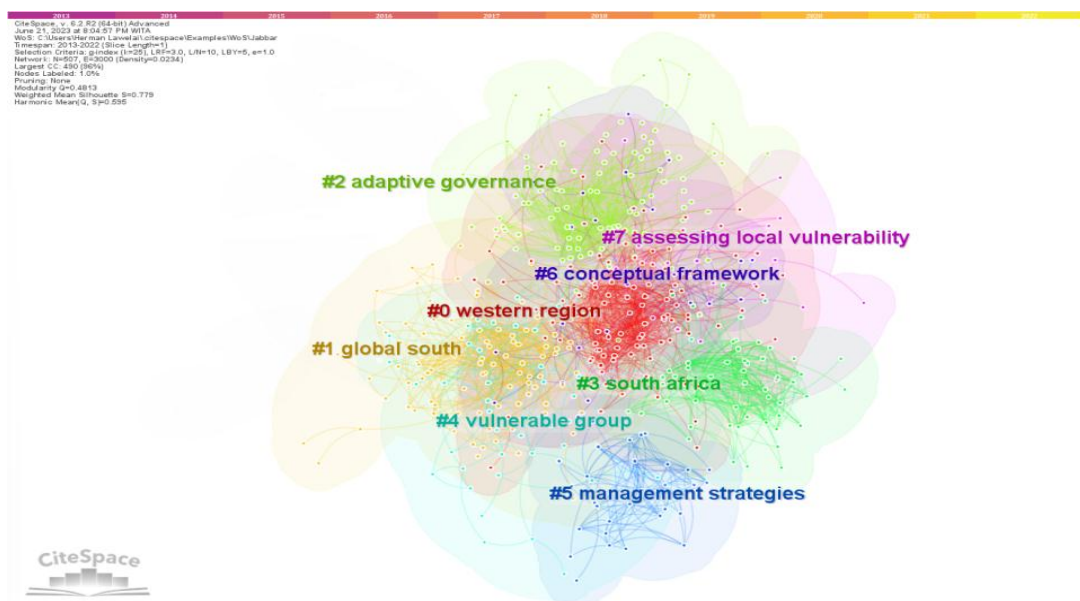
pengembangan kapasitas harus dilakukan secara holistik dan integratif ditinjau dari 3 level dimensi berdasarkan teori pengembangan kapasitas UNDP (1998), yaitu pengembangan kapasitas level individu, level organisasi dan level sistem. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan yang komperhensif dalam menemukan model baru tentang pengembangan kapasitas pemerintah terutama dalam upaya mendukung produktivitas pertanian.

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Fokus	Perbedaan Penelitian
1.	Irawan (2016)	"Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian"	Meneliti dimensi kebijakan, organisasi, individu, teknologi, dan kerjasama dalam konteks pengembangan kapasitas pemerintah daerah di sektor pertanian.	Penelitian ini lebih mengarah pada penyusunan dan implementasi kebijakan serta struktur organisasi dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian.
2.	Adi (2018)	"Evaluasi Program Pengembangan Kapasitas di Pemerintah Daerah untuk Sektor Pertanian"	Mengkaji program-program pengembangan kapasitas yang telah dilaksanakan di pemerintah daerah, dengan penilaian terhadap dampaknya terhadap peningkatan produktivitas pertanian.	Menggunakan metode evaluasi program yang lebih aplikatif dengan fokus pada hasil dan dampak yang diukur secara kuantitatif.
3.	Wulandari (2020)	"Kolaborasi Antarlembaga dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah di Sektor Pertanian"	Menganalisis peran kolaborasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di sektor pertanian.	Menonjolkan aspek kolaborasi dan kerja sama antar berbagai pihak sebagai kunci dalam pengembangan kapasitas.
4.	Resia,O., 2019	"Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Potensial di Kabupaten Kutai Timur"	Fokus penelitian dari artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kapasitas adaptif pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur dalam mengelola sumber daya potensial yang dimiliki, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pengelolaan sumber daya tersebut secara efektif dan berkelanjutan.	Penelitian ini mendeskripsikan bahwa dimensi <i>learning capacity</i> ditemukan kendala dalam hal kekurangan SDM profesional terutama dalam bidang perencanaan sumber daya potensial masih membutuhkan tenaga profesional yang mampu memaksimalkan potensi daerah. Selain itu kebijakan pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan hal ini menjadi kendala dalam optimalisasi sumber daya potensial

5.	Andi Syamsu Alama dan Ashar Prawitno, 2015	"Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone".	Penelitian ini memfokuskan pada konteks spesifik Kabupaten Bone, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal seperti kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi strategi pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan.	Hasil temuan dari penelitian diketahui: (1) pengembangan kapasitas sumber daya fisik secara umum cukup baik, indikatornya yaitu sumber daya fisik, struktur organisasi, keuangan, perangkat hukum (aturan), dan sarana dan prasarana, hanya satu indikator yang mendapat penilaian kurang baik, yaitu kapasitas perangkat hukum; (2) pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) secara umum baik dengan indikatornya yaitu prosedur kerja, budaya kerja, dan kepemimpinan; (3) pengembangan kapasitas sumber daya manusia, indikatornya yaitu pengetahuan pegawai, keterampilan pegawai, serta perilaku dan etika kerja.
6.	Mohd. Riswan Bin (2021)	"Peran Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian Padi menuju Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis"	Fokus penelitian ini pada peran pemerintah daerah dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan produksi pertanian padi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi, kebijakan, dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendorong Sidenreng Rappang untuk menjadi pusat agribisnis.	Penelitian ini menunjukkan bahwasanya peran pemerintah daerah dalam kebijakan peningkatan produksi pertanian padi dilakukan dengan menggunakan dua peran. Peran tersebut yaitu peran aktif pemerintah daerah berupa program perbenihan dan perlindungan serta produksi tanaman pangan, dan program penyuluhan dan kelembagaan. Sedangkan peran partisipatif berupa program penyediaan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, jalan tani, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin tani, dan program tudang sipulung.
7.	Ardito Atmaka Ajii, 2014	"Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Padi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember"	Fokus penelitian ini berusaha memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah, petani, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal melalui pengembangan agribisnis padi yang lebih baik.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi petani merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember. Kelemahan utama yang harus diperbaiki adalah kondisi finansial yang lemah, peluang utama yang dimiliki adalah peningkatan permintaan beras.

Selanjutnya, peneliti menganalisis pengembangan kapasitas adaptif pemerintah menggunakan CiteSpace sebagai *state of the art* dari penelitian ini, CiteSpace merupakan sebuah alat analisis yang mengidentifikasi kelompok penelitian berdasarkan analisis kutipan. Delapan kelompok (Gambar 2.2) mewakili topik-topik utama dalam pengembangan kapasitas pemerintah, memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah dalam menanggapi perubahan. Adaptasi yang cepat dan efisien sangat penting bagi keberhasilan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang responsif dan menerapkan kebijakan yang efektif. Memahami topik-topik utama dalam penelitian kapasitas adaptasi pemerintah membantu merumuskan strategi perbaikan dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi pemerintah. Dengan meningkatkan kapasitas adaptasi, pemerintah dapat mengatasi perubahan masyarakat dan menanggapi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.



Gambar 2.5 : Analisis CiteSpace

Berdasarkan analisis CiteSpace, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ditemukan delapan kelompok yang menjelaskan topik-topik utama dalam penelitian tentang kemampuan adaptasi pemerintah. Kelompok penelitian terbesar ini menekankan pentingnya kerangka kerja, seperti kapasitas adaptasi lokal, serta mendorong peningkatan operasionalisasi kerangka kerja, kerja sama yang lebih baik antar pemangku kepentingan, dan pengembangan strategi adaptasi dan ketahanan yang efektif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

E. Kerangka Pemikiran

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu keharusan dan hendaknya diarahkan pada kemampuan untuk menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki dengan memanfaatkan sumber daya/ faktor pendukung yang tersedia seefektif mungkin. Sehubungan dengan hal ini dapat ditegaskan bahwa tingkat keberhasilan program pemerintah sangat didukung oleh kapasitas pemerintah daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengalami berbagai permasalahan pengembangan kapasitas dalam upaya mendukung produktivitas pertanian. Pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan kapasitas kelembagaan petani dan SDM pertanian dalam hal ini penyuluh pertanian dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat petani, kurangnya minat generasi milenial dalam mengemangkan sektor pertanian. Lemahnya dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap peningkatan

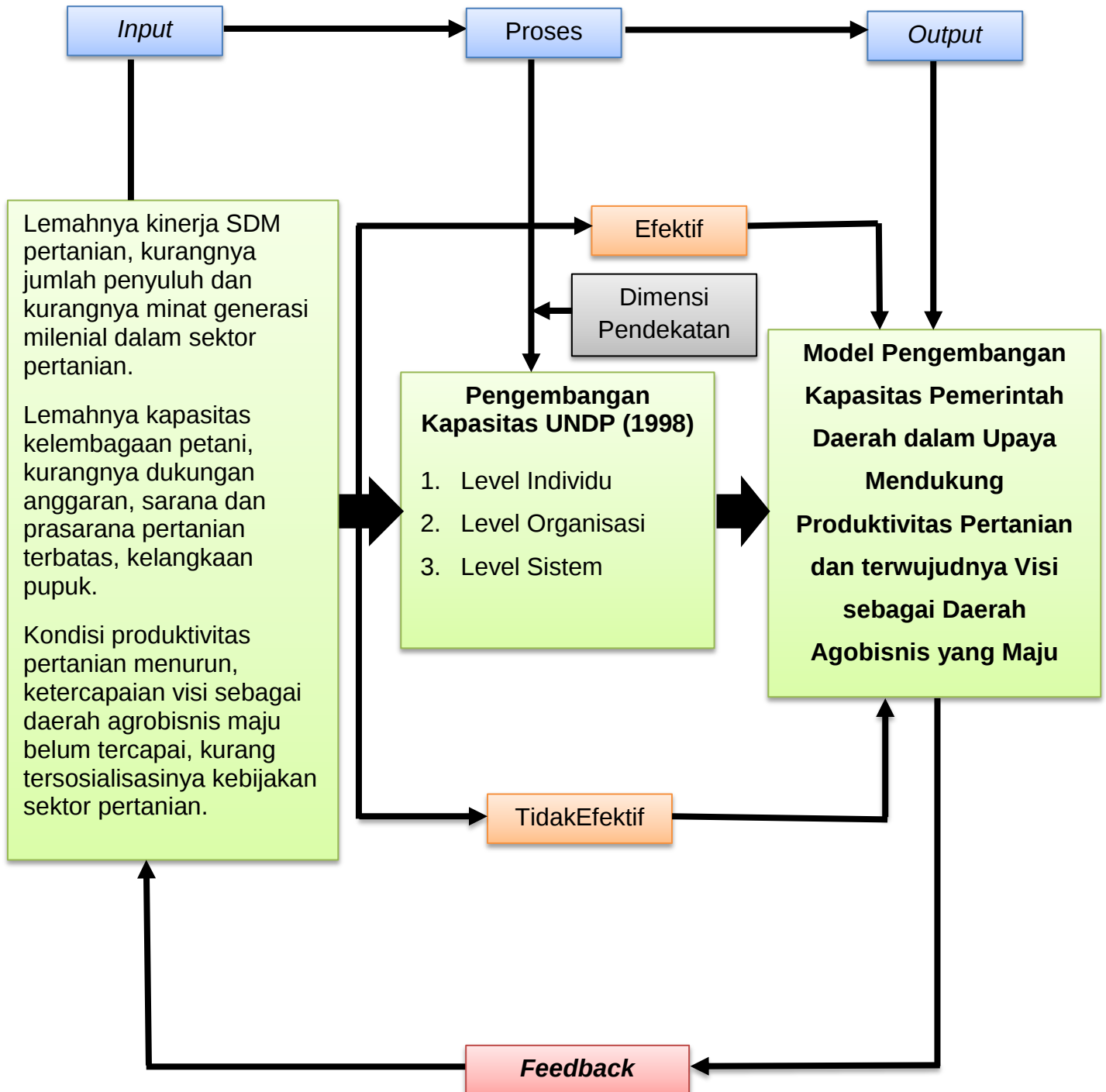
SDM pertanian, sarana dan prasarana infrastruktur pertanian dan kurangnya akses informasi bagi petani juga berdampak pada penurunan tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Terjadinya penurunan tingkat produksi padi di Kabupaten Sidrap juga disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : 1). Dampak perubahan iklim global, 2). Meningkatnya alih fungsi lahan, 3). Ketersediaan benih/bibit unggul bermutu yang belum tercukupi, 4). Kelangkaan dan pengurangan jumlah pupuk bersubsidi ke petani.

Alasan peneliti menggunakan teori dari UNDP (1998), yaitu bahwa teori tersebut sangat representative dan relevan untuk dijadikan parameter atau alat ukur dalam membedah pengembangan kapasitas pemerintah daerah khususnya dalam upaya mendukung produktivitas pertanian yang notabene sebagai pendapatan utama masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dan upaya dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah yaitu Mewujudkan Daerah Agrobisnis yang Maju.

Teori pengembangan kapasitas menurut UNDP (1998) bermuara pada tiga level pengembangan kapasitas yakni : 1). Level individu, yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah melalui tingkat pendidikan SDM pertanian, keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian serta rekrutmen SDM pertanian. 2). Level organisasi, yaitu intervensi pada manajemen organisasi, budaya kerja organisasi dan pengembangan SDM pada sektor pertanian. 3). Level sistem, yaitu intervensi pada pencapaian visi misi dan program kerja, perbaikan kebijakan pada sektor pertanian, serta sistem tata kelola pertanian.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.6. Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan, menganalisis dan mengeksplorasi data yang berupa tulisan serta mengamati perilaku orang yang diamati. Penelitian ini akan diarahkan untuk mendalami fenomena turunnya tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui teori organisasi (*governance*) dan secara spesifik dengan pendekatan teori pengembangan kapasitas.

Tujuan utama penelitian ini akan mendeskripsikan objek yang diteliti, dan mengeksplorasi fakta serta data objek di lapangan sebagaimana adanya. Dengan demikian, pendekatan penelitian yang dianggap relevan untuk penelitian ini adalah eksploratif kualitatif. Calon peneliti akan mengeksplorasi kenyataan suatu pokok masalah yang diselidiki terkait pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dan diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat serta mencoba menganalisa kebenaran masalah berdasarkan data yang berbentuk kata, tabel, skema dan gambar yang terkait dengan masalah penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang, berfokus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selanjutnya untuk memperkaya informasi dalam menggali makna yang lebih mendalam fenomena turunnya tingkat produktivitas pertanian melalui pendekatan teori pengembangan kapasitas pemerintah daerah, maka penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi dan kelompok masyarakat yang dianggap relevan dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis model pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) menurut UNDP (1998) bermuara pada tiga level pengembangan kapasitas yakni : 1). Level individu, yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja melalui aspek tingkat pendidikan SDM pertanian, keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian serta rekrutmen SDM pertanian. 2). Level organisasi, yaitu intervensi pada penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan atau jaringan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya melalui manajemen organisasi, budaya kerja organisasi dan pengembangan SDM pada sektor pertanian. 3). Level sistem, yaitu intervensi pada pengaturan program kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan melalui

pencapaian visi misi dan program kerja, perbaikan kebijakan pada sektor pertanian, serta sistem tata kelola pertanian.

Adanya fokus penelitian ini diharapkan agar penelitian memiliki fokus yang tepat, sehingga mampu mengumpulkan data dan melakukan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

Fokus	Level	Indikator
Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu	1. Tingkat Pendidikan 2. Keterampilan dan Profesionalisme 3. Rekrutmen
	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi	1. Manajemen organisasi 2. Budaya kerja organisasi 3. Pengembangan SDM
	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem	1. Visi Misi dan Program Kerja 2. Perbaikan Kebijakan 3. Sistem Tata Kelola Pertanian

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada 2 (dua) yakni:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan kunjungan langsung dengan melakukan wawancara dengan orang atau instansi yang dianggap bisa menjadi informan pada lokasi penelitian. Data primer ini adalah data yang diambil untuk mengetahui perkembangan yang ada di dalam penelitian.

Aktor-aktor yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Informan

No	Instansi
1.	Bupati Kabupaten Sidrap
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap
3.	Bappelitbangda Kabupaten Sidrap
4.	Anggota DPRD Kabupaten Sidrap
5.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidrap
6.	Kepala Bidang Tanaman Pangan
7.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
8.	Kepala Bidang Penyuluhan
9.	Kelompok Tani
10.	Organisasi Profesi Petani

Alasan memilih aktor-aktor di atas sebagai informan dalam penelitian ini, disebabkan karena semua instansi tersebut memiliki

peranan, relevansi dan keterkaitan yang sangat besar dalam hal peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Data Sekunder

Data sekunder menjadi data pendukung yang diperoleh dari dokumen resmi internal dan dokumen resmi eksternal yang relevan dengan tujuan penelitian. Dokumen resmi internal yang dimaksud berupa dokumen kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, serta Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Dokumen resmi eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini berupa undang-undang, peraturan dan keputusan pemerintah pusat dan provinsi, peraturan atau instruksi dari kementerian yang berkaitan dengan sektor pertanian serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data sekunder ini dapat juga diperoleh melalui studi bahan kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian seperti buku, berita surat kabar, dokumen hasil riset dan sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian. Data sekunder ini diambil untuk mengetahui perkembangan yang ada di dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Pada metode pengamatan ini peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke lokasi yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang jelas. Jenis observasi ini juga dilakukan dengan cara terbuka, cara ini dilakukan agar mampu mengetahui kejujuran informan yang sebenar-benarnya dalam memberikan keterangan dan informasi mengenai fenomena perubahan dan dampak tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan yang signifikan, bahkan itu terjadi selama beberapa tahun terakhir. Sementara, Pemerintah Daerah belum menunjukkan upaya serius dalam merespon perubahan tersebut, sehingga dibutuhkan upaya pengembangan kapasitas adaptif, baik dari level sistem, level organisasi maupun level individu.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan kepada informan

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti, buku tulis, pulpen dan alat perekam agar proses wawancara dapat berjalan dengan lancar untuk memudahkan peneliti mengingat dan menalar kembali hasil wawancara saat penelitian dalam suatu bentuk karya ilmiah.

3. Dokumentasi

Bebagai fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa RPJMD, Renstra, RKPD dan PERDA yang berkaitan dengan sektor pertanian, SOP dan Program kegiatan di sektor pertanian yang berhubungan dengan produktivitas pertanian. Selain itu, Data sekunder yang didapatkan oleh peneliti yang berkaitan dengan objek peneliti bisa didapatkan dari sumber buku, berita surat kabar, dokumen hasil riset dan sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data perlu digunakan di dalam penelitian ini, dan akan dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data penelitian dengan wawancara mendalam,

observasi, dokumentasi serta beberapa referensi buku maupun penelusuran *online*.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal yang penting memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari juga tema dan polanya. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang sangat lebih jelas.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian dalam menyajikan data selain data dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan dan yang berkaitan dengan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasi.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*).

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan yang dilaksanakan pada aktifitasnya saat pengumpulan data yang sudah cukup dan selesai. Langkah ini berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang matang apabila kesimpulan dirasakan kurang lengkap, maka akan dilakukan pengumpulan data kembali dilapangan sasaran yang sudah fokus. Penelitian melakukan uji kebenaran terhadap kata yang muncul dari

data, melalui pengecekan ulang kepada informan pendukung terhadap setiap data yang didapat. Selain itu, peneliti melakukan diskusi terhadap inteprestasi pada pihak-pihak lain baik yang ada dilapangan maupun diluar lapangan, sehingga dapat memperoleh kesimpulan mengenai Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Analisis pengolahan data dalam penelitian ini juga akan menggunakan alat bantu dengan aplikasi NVivo. Aplikasi NVivo merupakan perangkat lunak (*software*) untuk pengembangan, dukungan, dan manajemen proyek analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, penggunaan aplikasi NVivo hanya menyajikan data-data mentah yang sudah terorganisir sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Dengan menggunakan Nvivo, peneliti akan mengimpor dan mengelola berbagai jenis data kualitatif, termasuk transkrip wawancara, catatan lapangan, artikel, dan dokumen kebijakan. Hal ini memudahkan peneliti dalam menyimpan semua data yang relevan dalam satu tempat yang terorganisir. Peneliti juga akan membuat "node" untuk tema atau kategori tertentu yang relevan dengan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan produktivitas pertanian. Setiap kali tema tersebut muncul dalam data, peneliti dapat menandai atau mengodekannya, yang memudahkan analisis tematik.

NVivo menyediakan alat untuk visualisasi data seperti word clouds, charts, dan models. Visualisasi ini dapat membantu dalam menyajikan temuan penelitian secara lebih jelas dan menarik. Misalnya, peneliti dapat membuat diagram yang menunjukkan hubungan antara inisiatif pemerintah daerah dan peningkatan produktivitas pertanian.

G. Pengecekan Validitas Temuan

Salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam pengujian kredabilitas data adalah dengan 3 (tiga) triangulasi. Triangulasi yaitu sebagai pengecekan suatu data penting dari berbagai sumber dengan berbagai tahap dan berbagai waktu. Lebih lanjut lagi dibagi triangulasi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek berulang-ulang derajat kepercayaan dari suatu informasi yang ada dan diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dari informan kemudian membandingkan apa yang dikatakan oleh informan yang satu dengan informan lainnya dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada untuk melihat perbedaan dan kesamaan pendapat yang akan dilihat dari hasil wawancara dan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Teknik data untuk memperoleh informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan teknik pengumpulan data untuk menguji akuratnya sebuah data maka penelitian menggunakan tehnik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triagulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbagai sumber yang didapat dengan semua cara dan juga berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perubahan manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan melalui empat tahapan penelitian yaitu; tahap pralapangan, tahap pelaksanaan penelitian, tahap analisa data, dan tahap pelaporan hasil penelitian. Keempat tahapan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tahap pralapangan, pada tahap ini dilakukan studi pendahuluan untuk melihat kemungkinan peneliti dapat melakukan penelitian. Dari hasil observasi, wawancara dan mempelajari dokumen-

dokumen yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis tertarik untuk mengetahui kegiatannya lebih lanjut. Ketertarikan peneliti terhadap terfokus pada produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diharapkan melalui penelitian lebih lanjut akan tergambarkan secara jelas, bagaimana latar belakang pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam merespon dampak perubahan tingkat produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berangkat dari ketertarikan dan harapan dari kegunaan penelitian yang akan dilakukan tersebut di atas, maka dirancanglah proposal penelitian dengan ruang lingkup isi adalah sebagai berikut : (1) Bagian kesatu problematika, berisi; latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. (2) Bagian kedua tinjauan pustaka dan kerangka konsep. (3) Bagian ketiga adalah metodologi penelitian meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, pengelolaan peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan validitas hasil penelitian, dan tahap-tahap penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian, pada tahap ini menurut Moleong (1996), ada tiga tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian, pertama mengenal latar penelitian dan mempersiapkan

diri. Latar penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, secara spesifik pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Kedua, adalah tahap memasuki lapangan, dalam tahap ini ada tiga hal yang dilakukan, yakni menjalin keakraban, mempelajari bahasa dan menentukan peranan peneliti. Bahasa yang digunakan peneliti dalam dialog dengan para informan yaitu menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Bugis dimana kedua bahasa tersebut baik oleh peneliti maupun oleh para informan dipahami secara baik. Sedangkan peran yang dipilih oleh peneliti selama penelitian adalah sebagai observer (observasi partisipatif), pewawancara, penemu dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Ketiga adalah tahap berperan, sambil mengumpulkan data, pada tahap ini peneliti ikut serta dalam kegiatan proses pembelajaran, produksi, pemasaran, bila dianggap perlu dan tidak melampaui peran yang dimainkan masing-masing.

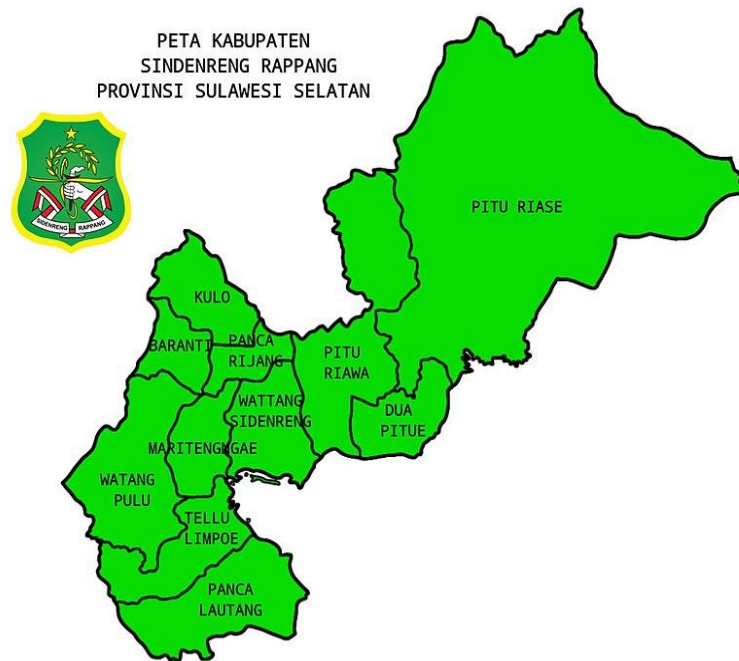
3. Tahap analisis data, sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan sekembali dari lapangan, baik sebelum penulisan laporan, maupun selama penulisannya. Proses dan analisisnya telah dikemukakan pada bagian terdahulu.

4. Tahap pelaporan hasil penelitian, penulisan draft disertasi dilakukan secara bertahap setelah tahapan pralapangan, lapangan, dan analisis data dilakukan. Penulisan ini merupakan tahapan yang bergulir terus selama penelitian dilakukan. Setelah penulisan draft disertasi selesai dilakukan, peneliti mengkonsultasikan kepada pembimbing. Di dalam proses konsultasi, dosen pembimbing terus memberikan masukan, saran perbaikan yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan draft disertasi. Setelah draft disertasi dianggap layak, dilakukan progres raport (laporan kemajuan penelitian), dan draft disertasi diberikan masukan dan perbaikan sehingga peneliti diperbolehkan mengikuti ujian tahap satu, dan seterusnya hingga promosi hasil disertasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa disingkat dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan).

Secara astronomis, Kabupaten Sidrap terletak antara 3°43'-4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10' Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan :

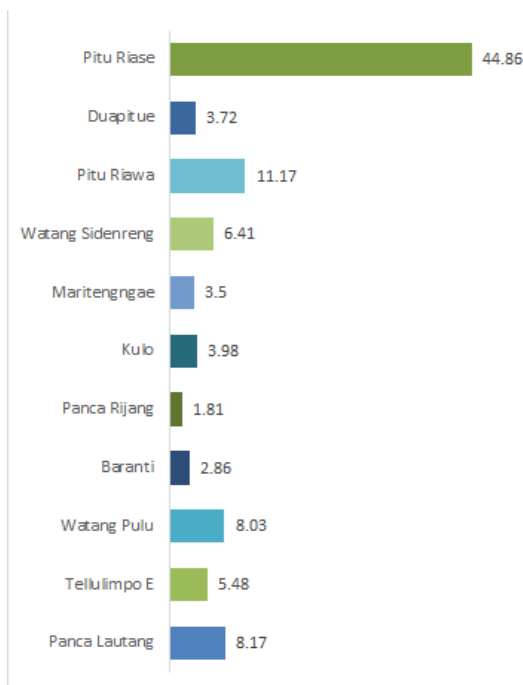
Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo

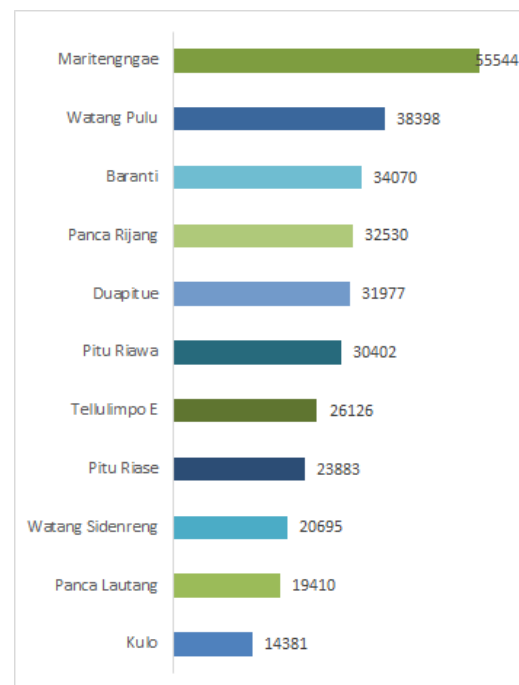
Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare

Wilayah administratif Kabupaten Sidrap terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan (68 Kelurahan dan 38 Desa) dengan luas 1883,23 Km². Adapun Kecamatan Pitu Riase merupakan kecamatan terluas dengan luas 844.76 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 sebanyak 327.416 jiwa yang terdiri dari 162.116 jiwa penduduk laki-laki dan 165.300 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Maritengngae yaitu sebesar 55.544 jiwa.



Gambar 4.2 : Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2022



Gambar 4.3 : Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, 2022

1. Pemerintahan (*Government*)

Ir. H Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang periode 2018-2023, setelah dilantik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Dr H M Nurdin Abdullah pada hari Senin, 31 Desember 2018 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumohardjo, Kota Makassar.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2023 maka ditetapkan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemerintahan Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si yakni **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”**. Dengan Misi : 1). Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja) dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka peningkatan indeks kualitas hidup (kesejahteraan) masyarakat. 2). Memajukan usaha agrobisnis, UMKM, dan pengembangan industri pengolahan hasil usaha pertanian dengan penerapan konsep petik, olah, kemas, dan jual. 3). Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama (*net working*) dalam rangka peningkatan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah. 4). Mengembangkan dan meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, pasar dan telekomunikasi) untuk memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. 5). Memajukan dan meningkatkan kinerja

birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep *good governance* dan *electronic governance* (gg+e gov). 6). Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penerapan konsep desa cerdas (*smart village*) sehat, mandiri, serta pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 7). Mewujudkan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama yang religius, serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang, aman, kondusif dan harmonis.

Pada tahun 2022, wilayah administrasi Pemerintah Daerah Sidrap dengan ibukota Pangkajene terbagi dalam 11 kecamatan yang membawahi 68 desa dan 38 kelurahan. Atau dengan kata lain, tidak terjadi pemekaran wilayah. Dari 11 kecamatan yang ada, Kecamatan Maritengngae, Pitu Riawa dan Pitu Riase merupakan tiga kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak. Kecamatan Maritengngae terdiri dari 5 desa dan 7 kelurahan, Kecamatan Pitu Riawa terdiri dari 10 desa dan 2 kelurahan, dan Kecamatan Pitu Riase terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Adapun jumlah anggota DPRD Sidrap sebanyak 35 orang, terdiri dari 32 laki-laki dan 3 perempuan. 3 partai dengan anggota DPRD terbanyak adalah Partai Nasdem 8 orang, Partai Demokrat 7 orang, dan Golkar 5 orang.

Dalam prakteknya pada pelaksanaan pemerintah daerah pada tahun 2022, di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 4.706 pegawai yang

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 1.786 orang dan yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 2.920 orang.

Pada tahun 2022 total Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sidrap mencapai Rp 162.017.049.850,00. Penerimaan tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp 45.754.955.326,00 , Retribusi sebesar Rp 11.422.651.704,00, Hasil Perusahaan Milik Daerah (Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan) sebesar Rp 5.753.407.858,00 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 99.086.034.962,00.

Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kecamatan Subdistrict	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panca Lautang	10	10	10	10	10
Tellulimpoe	9	9	9	9	9
Watang Pulu	10	10	10	10	10
Baranti	9	9	9	9	9
Panca Rijang	8	8	8	8	8
Kulo	6	6	6	6	6
Maritengngae	12	12	12	12	12
Watang Sidenreng	8	8	8	8	8
Pitu Riawa	12	12	12	12	12
Dua Pitue	10	10	10	10	10
Pitu Riase	12	12	12	12	12
Kabupaten Sidenreng Rappang	106	106	106	106	106

Ket : Data BKN dan BPS Kabupaten Sidrap, 2022

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tingkat Pendidikan Educational Level	2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar (SD) Primary School	5	1	6
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Junior High School	14	2	16
Sekolah Menengah Atas (SMA) Senior High School	274	151	425
Diploma I/Akta I Diploma I/Akta I	1	4	5
Diploma II/Akta II Diploma II/Akta II	18	30	48
Diploma III/Akta III Diploma III/Akta III	57	368	425
Diploma IV/Akta IV Diploma IV/Akta IV	37	69	106
S1/Sarjana Under Graduate/Bachelor	1167	2045	3212
S2/Pasca Sarjana Graduate	302	326	628
S3/Doktor/Ph.D Post Graduate	1	—	1
Jumlah/Total	1876	2996	4872

Ket : Data BKN dan BPS Kabupaten Sidrap, 2022

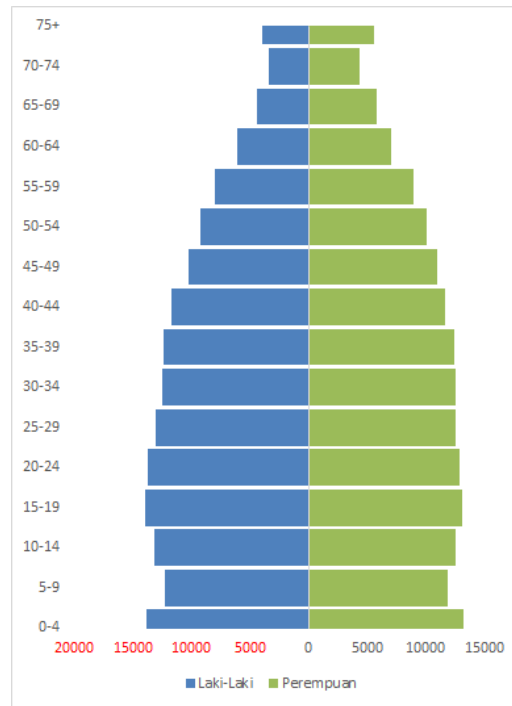
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a. Kependudukan

Dari Hasil Proyeksi Penduduk 2022 Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 sebanyak 327.416 jiwa yang terdiri dari 162.116 jiwa penduduk laki-laki dan 165.300 penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Maritengngae yaitu sebesar 55.544 jiwa.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin Kabupaten Sidenreng Rappang tahun

2022 sebesar 98. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki.



Gambar 4.4 : Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 2022

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 sekitar 174 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Panca Riajng yaitu sekitar 956 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Pitu Riase yaitu sekitar 28 jiwa/Km².

**Tabel 4.3 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>	Laju Pertumbuhan Pend uduk per Tahun (%) <i>Annual Population Growth Rate %</i>
(1)	(2)	(3)
Panca Lautang	19 410	0,75
Tellulimpoe	26 126	0,92
Watang Pulu	38 398	1,77
Baranti	34 070	1,37
Panca Rijang	32 530	1,28
Kulo	14 381	1,73
Maritengngae	55 544	1,30
Watang Sidenreng	20 695	1,37
Pitu Riawa	30 402	1,39
Dua Pitue	31 977	1,08
Pitu Riase	23 883	1,29
Kabupaten Sidenreng Rappang	327 416	1,31

Ket : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap, 2022

b. Ketenagakerjaan

Penduduk Usia Kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk kedalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022, jumlah Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 237.647 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 136.986 jiwa merupakan Angkatan Kerja atau sekitar 58 persen dari Penduduk Usia Kerja.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	92 564	44 382	136 946
1. Bekerja/ <i>Working</i>	89 401	42 668	132 069
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	3 163	1 714	4 877
II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Not Economically Active</i>	22 069	78 632	100 701
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	6 975	8 423	15 398
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	9 322	66 766	76 088
3. Lainnya/ <i>Others</i>	5 772	3 443	9 215
Jumlah/<i>Total</i>	114 633	123 014	237 647

Ket : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Sidrap sebanyak 132.069 orang dan pengangguran sebanyak 4877 orang. Yang dimaksud bekerja disini adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Status Pekerjann dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	<i>Total</i>	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tenaga Profesional, Teknisi, Dan Yang Sejenis/ <i>Professionals, Technicians, And The Similar</i>	3 529	8 317		11 846
Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan/ <i>Leadership and Management Force</i>	2 860	NA		3 235
Tenaga Tata Usaha Dan Yang Sejenis/ <i></i>	2 392	2 592		4 984
Tenaga Tata Usaha Penjualan/ <i>Sales</i>	14 773	18 996		33 769
Tenaga Usaha Jasa/ <i>Service Workforce</i>	4 332	2 759		7 091
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan Animal/ <i>Fisheries</i>	34 588	2 543		37 131
Tenaga Produksi, Operator Alat – Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar/ <i>Production Workers, Equipment Operators – Transport Equipment And Rough Workers</i>	26 180	7 086		33 266
Lainnya/ <i>Others</i>	747	NA		747
Total	89 401	42 668		132 069

Ket : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

3. Kondisi Hidrologi, Kondisi Klimatologi, Kondisi Geologi dan Kondisi Topografi.

a. Kondisi Hidrologi

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu LimpoE dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan MaritengngaE dengan panjang 5.000 M,

Kecamatan Dua PituE dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M.

b. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan klasifikasi Shcmidt dan fergusson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

Tipe Pertama : Adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Utara bagian Timur mendekati Pegunungan Latimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua : Adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3 – 4 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua PituE,

Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara).

Tipe Ketiga : Adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4 – 6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE, Panca Lautang sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Timur).

c. Kondisi Geologi

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah Alluvial meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis

tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah Regosol seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regosol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua PituE dan Pitu Riase. Jenis tanah Regosol kadang-kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regosol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah Grumosol seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan MaritengngaE yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 % dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308

Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Jenis tanah Mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks meditreran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah Podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14 %) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan

Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api bersifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

d. Kondisi Topografi

Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

1) Lereng 0 – 2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.

2) Lereng 2 – 15 % meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan,

kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.

- 3) Lereng 15 – 40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15 – 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase

seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15 – 40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua PituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.

- 4) Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04 %).

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl),

dan dataran terendah di kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0 – 25 M dpl.

Tabel 4.6 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	23.2	27.6	31.8	64.0	84.0	99.0
Februari/February	22.7	27.5	31.8	62.0	84.4	99.0
Maret/March	23.7	28.3	32.6	57.0	81.3	98.0
April/April	23.0	28.9	34.6	53.0	78.7	97.0
Mei/May	23.0	29.0	33.6	55.0	79.9	99.0
Juni/June	22.8	28.2	33.0	55.0	81.2	98.0
Juli/July	21.6	28.9	33.3	51.0	75.5	98.0
Agustus/August	21.4	29.3	33.8	43.0	69.7	96.0
September/September	22.6	29.0	33.8	50.0	75.8	96.0
Oktober/October	23.2	28.3	33.0	59.0	81.4	98.0
November/November	23.4	28.1	32.2	61.0	81.2	98.0
Desember/December	23.0	27.4	32.4	61.0	84.2	99.0

Ket : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap, 2022

Bulan Month	Kecepatan Angin (m/det) Win Velocity (m/sec)			Tekanan Udara/Atmospheric Pressure (mbar)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari/January	0.0	3.5	18.0	1002.8	1009.3	1012.4
Februari/February	0.0	3.8	22.0	1002.2	1008.5	1012.0
Maret/March	0.0	3.8	12.0	1003.7	1008.2	1012.6
April/April	0.0	4.4	12.0	1004.0	1008.1	1012.1
Mei/May	0.0	4.0	13.0	1004.2	1008.3	1012.6
Juni/June	0.0	3.7	12.0	1005.1	1008.4	1011.4
Juli/July	0.0	3.8	19.0	1004.5	1008.3	1011.2
Agustus/August	0.0	3.9	11.0	1005.3	1008.6	1012.5
September/September	0.0	3.8	13.0	1004.7	1009.1	1013.2
Oktober/October	0.0	3.3	11.0	1004.6	1008.5	1012.6
November/November	0.0	3.2	13.0	1004.7	1008.7	1013.1
Desember/December	0.0	3.5	18.0	1002.5	1007.8	1013.1

Ket : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap, 2022

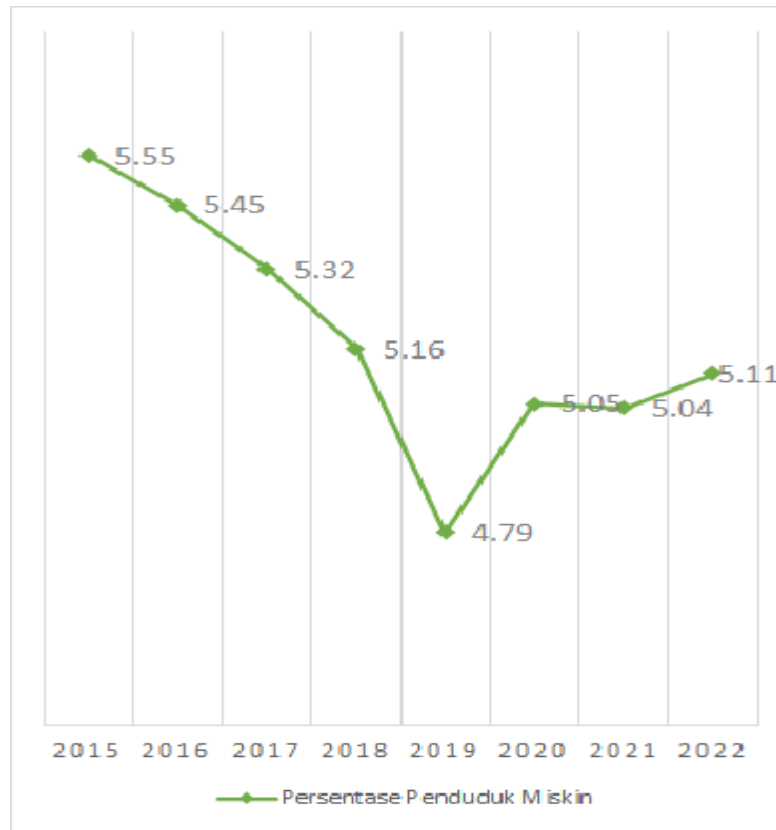
Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan(hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/January	669.7	28.0	4.2
Februari/February	834.2	27.0	3.9
Maret/March	324.2	30.0	5.0
April/April	134.7	28.0	6.9
Mei/May	340.9	25.0	6.5
Juni/June	198.7	25.0	6.0
Juli/July	34.4	25.0	6.9
Agustus/August	74.3	26.0	7.4
September/September	154.9	22.0	6.7
Oktober/October	355.0	27.0	5.3
November/November	567.2	27.0	5.1
Desember/December	962.7	30.0	4.1

Ket : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap, 2022

4. Sosial dan Ekonomi

a. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan Sidrap pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 383 134 angka ini meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp 360 591 Selain itu, persentase penduduk miskin kabupaten Sidenreng Rappang turun menjadi 5,11 persen.



Gambar 4.5 : Presentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022

Tabel 4.7 Angka Kemiskinan berdasarkan Indikator Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Indikator Kemiskinan	Angka Kemiskinan		
	2018	2019	2020
Jumlah penduduk Miskin (Ribu)	15.36	14.44	15.40
Persentase Jumlah penduduk Miskin (Ribu)	5.05	4.79	5.16
Garis Kemiskinan (Rupiah/Perkapa/Bulan)	349452.00	312800.00	299332.00
Indeks kedalaman Kemiskinan	0.63	0.60	0.94
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.14	0.13	0.23

Ket : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidrap, 2022

b. Pendidikan

Peningkatan partisipasi pendidikan merupakan sinyal yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan. Namun, hal ini harus diikuti

dengan peningkatan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai.

Pada tahun 2022 jumlah sekolah di Kabupaten Sidrap terdiri dari 237 Sekolah Dasar (SD), 49 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 16 Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari segi tenaga pengajar, seorang guru rata-rata mengajar 14 murid untuk jenjang SD, 11 murid untuk jenjang SMP dan 14 murid untuk jenjang SMA.

Tabel 4.8 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kecamatan Subdistrict	Sekolah/Schools					
	Negeri/ Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panca Lautang	1	1	9	9	10	10
Tellulimpoe	1	1	6	6	7	7
Watang Pulu	1	1	14	14	15	15
Baranti	9	9	12	13	21	22
Panca Rijang	3	3	17	17	20	20
Kulo	-		4	4	4	4
Maritengngae	3	3	17	18	20	21
Watang Sidenreng	-		6	6	6	6
Pitu Riawa	1	1	12	13	13	14
Dua Pitue	-		13	13	13	13
Pitu Riase	1	1	11	11	12	12
Kabupaten Sidenreng Rappang	20	20	121	124	141	144

Ket : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan

**Tabel 4.9 Jumlah Guru Sekolah Negeri dan Swasta
Di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Guru ^{1/Teachers}					
	Negeri/ <i>Public</i>		Swasta/ <i>Private</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Panca Lautang	4	3	29	27	33	30
Tellulimpoe	8	8	29	30	37	38
Watang Pulu	6	6	56	60	62	66
Baranti	36	37	40	40	76	77
Panca Rijang	15	17	67	67	82	84
Kulo	-		14	12	14	12
Maritengngae	27	28	86	79	113	107
Watang Sidenreng	-		20	19	20	19
Pitu Riawa	5	5	37	39	42	44
Dua Pitue	-		49	50	49	50
Pitu Riase	5	6	30	27	35	33
Kabupaten Sidenreng Rappang	106	110	457	450	563	560

Ket : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan

c. Pertanian

Pembangunan bidang pertanian dan pangan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang senantiasa menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Makarim et al., (2004), bahwa salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas padi adalah karena varietas yang ditanam petani dewasa ini tidak mampu lagi memproduksi lebih tinggi akibat terbatasnya kemampuan genetik. Pelandaian produksi padi sawah sampai tahun terakhir masih berlanjut disebabkan sulitnya menaikkan produktivitas padi di lahan sawah

terutama di wilayah intensifikasi (Hasanudin, 2004 dan Fagi et al., 2002). Pelandaian produktivitas tersebut disebabkan oleh kandungan bahan organik tanah sawah yang rendah menimbulkan rendahnya efisiensi pemupukan NPK, tidak terjaminnya keberlanjutan sistem produksi padi, dan stagnannya produktivitas padi (Sisworo, 2006 (18); dan Indriyati et al., 2007)(10).

Produksi dan produktivitas pertanian belum berjalan secara optimal, salah satunya disebabkan oleh faktor masih kurangnya prasarana dan sarana pertanian dan kurangnya sarana produksi pertanian. Selain itu faktor iklim berupa banjir dan kekeringan serta serangan organisme pengganggu tanaman juga mempengaruhi produksi pertanian. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing komoditas pertanian, hal ini disebabkan rendahnya harga sehingga perlu peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui hilirisasi pertanian.

Produksi tanaman padi di Kabupaten Sidrap pada tahun 2022 mencapai 514.202 ton yang dipanen dari areal seluas 90.653 Ha atau dengan produktivitas sebesar 5,67 ton/Ha.

Tabel 4.10 Luas Lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kecamatan Subdistrict	Irigasi Irrigation(Ha)	Non Irigasi Non Irrigation(Ha)	Rawa Lebak Swamp (Ha)	Jumlah Total(Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Panca Lautang	3 184	1 926	-	5 110
Tellu Limpoe	572	664	1 160	2 396
Watang Pulu	3 631	380	-	4 011
Baranti	2 428	730	-	3 158
Panca Rijang	1 871	598	-	2 469
Kulo	1 283	2 441	-	3 724
Maritengngae	4 831	1 006	-	5 837
Watang Sidenreng	6 848	555	-	7 403
Pitu Riawa	5 781	1 713	-	7 494
Dua Pitue	5 678	70	-	5 748
Pitu Riase	2 085	846	-	2 931
Sidenreng Rappang	38 191	10 929	1 160	50 279

Ket : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 4.11 Luas Lahan Sawah menurut Kecamatan dan Frekuensi Penanaman Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

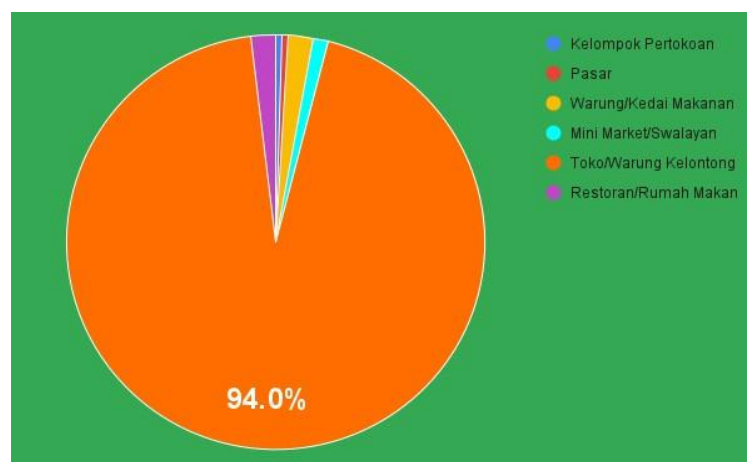
Kecamatan Subdistrict	1 Kali Once	2 Kali Twice	3 Kali 3 Times	Tidak Diusahakan Not Used	Tidak Ditanami Padi Not Planted Paddy	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panca Lautang	-	3 184	-	-	-	3 184
Tellu Limpoe	-	572	-	-	-	572
Watang Pulu	-	3 631	-	-	-	3 631
Baranti	-	2 427,6	-	-	-	2 427,6
Panca Rijang	-	1 871	-	-	-	1 871
Kulo	-	1 282,5	-	-	-	1 282,5
Maritengngae	-	4 830,9	-	-	-	4 830,9
Watang Sidenreng	543,8	6 304	-	-	-	6 847,8
Pitu Riawa	-	5 781	-	-	-	5 781
Dua Pitue	-	5 678	-	-	-	5 678
Pitu Riase	530	1 555	-	-	-	2 085
Sidenreng Rappang	1 073,8	37 117	0	0	0	38 190,8

Ket : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

d. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir, strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka lima tahun kedepan.

Hal ini dapat terlihat jumlah pasar sebanyak 18 pasar di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang terdiri dari pasar permanen sebanyak 15, dan pasar tanpa bangunan sebanyak 3. Selain itu pada tahun 2022 juga terdapat sarana perdagangan lain di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu warung sebanyak 65, mini market sebanyak 60, Toko sebanyak 99 dan restoran atau rumah makan sebanyak 56.



Gambar 4.6 : Sarana Perdagangan menurut Jenisnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022

B. Hasil Penelitian

1. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan kapasitas pada level individu di pemerintah daerah merupakan hal penting dalam mendukung produktivitas pertanian, karena setiap individu memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perubahan dan inovasi. Memiliki SDM yang profesional, berdaya saing dan skill yang memadai dapat mendorong kinerja yang optimal oleh SDM yang ada, baik dalam hal pembelajaran, praktek dan rekrutmen. Konteks yang disampaikan oleh UNDP (1998) dalam mengembangkan sumber daya manusia secara individu berfokus pada menghadirkan serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pekerjaan.

Untuk mewujudkan dan menciptakan SDM yang unggul maka dihadirkanlah pelatihan dan pendidikan, pemberian *reward* berupa pembayaran gaji bulanan, memberikan bonus sesuai dengan ketentuan instansi, manajemen lingkungan kerja dan rekrutmen pegawai yang tepat untuk menyaring para pegawai dalam bekerja. Pengembangan kapasitas pada level individu dalam penelitian ini akan berfokus pada : tingkat pendidikan SDM Pertanian, keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian serta rekrutmen SDM pertanian.

Pengembangan kapasitas pada tingkat individu di pemerintah daerah sangat penting karena individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang adaptif akan menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendukung produktivitas pertanian. Kemampuan individu dalam beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci dalam mempercepat perbaikan dan kemajuan di sektor pertanian secara keseluruhan.

1) Tingkat Pendidikan SDM Pertanian

Tingkat pendidikan aparatur pemerintah daerah cenderung hanya memenuhi syarat formal belaka tanpa mempertimbangkan kesesuaian dan relevansi antara job yang diemban. Gelar kesarjanaan dan ahli madya bukanlah sebagai bukti bahwa aparatur yang bersangkutan memiliki kompetensi teknis dan *skill* tapi cenderung bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki tidak sepenuhnya mendukung dan bahkan menambah bobot *leadership* dan manajemen *skill* dalam tata pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima) Bidang, 3 (tiga) Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2023 sejumlah 106 orang terdiri dari Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian (PTT-PK), sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	49	43	88
2	Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja	11	3	14
	Jumlah	60	46	106

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

Selanjutnya klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 berdasarkan golongan, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.13
Klasifikasi ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	28	15	43
2	Golongan III	29	27	56
3	Golongan II	3	4	7
	Jumlah	60	46	106

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024

Klasifikasi PNS dan PPT-PK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.14
Klasifikasi PNS Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	9	11	20
2	Strata 1	37	29	66
3	Diploma 3	-	2	2
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/Sederajat	3	1	4
	Jumlah	49	43	92

Tabel 4.15
Klasifikasi PPT-TK Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	11	1	12
3	Diploma 3	-	1	1
4	Diploma 1	-	-	-
5	SMA/Sederajat	-	1	1
	Jumlah	11	3	14

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian DTPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang,
Tahun 2024

Tingkat pendidikan formal aparatur baik pejabat struktural maupun non struktural pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang cukup bervariasi yakni dimulai dari tingkat SMA/Sederajat sampai dengan S2 (pasca sarjana). Berdasarkan dokumentasi data penelitian dan hasil wawancara yang diperoleh dari informan penelitian bahwa :

“Berdasarkan data pada bulan Juni 2023, tingkat pendidikan formal pejabat struktural dan fungsional yang berjumlah 106 orang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi yang terdiri dari : S2 (20 orang), S1 (78 orang), D3 (3 orang), dan SLTA (5 orang). (IB, 16 Juni 2023).

Berdasarkan dokumentasi data dan hasil wawancara di atas, maka dikemukakan bahwa tingkat pendidikan aparatur pemerintah daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu ditingkatkan, terutama yang lanjut studi untuk S2. Selanjutnya menyangkut adanya aparatur yang sementara studi lanjut dikemukakan oleh informan penelitian sebagai berikut:

“Sebagai wujud dari adanya program pengembangan kapasitas Pemerintah daerah pada level individu/aparatur di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, kami selalu mendorong aparatur untuk studi lanjut baik bagi pejabat struktural maupun bagi aparatur non pejabat struktural. (IB, 16 Juni 2023).).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan tingkat pendidikan formal aparatur dalam bentuk dorongan studi lanjut mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur pada sektor pertanian.

Pada umumnya aparatur pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang baik yang menduduki jabatan struktural maupun non jabatan struktural memiliki pendidikan formal yang relevan dengan bidang tugasnya, seperti yang dikemukakan oleh informan penelitian berikut ini:

“Sebagian besar atau sekitar 88% bidang Ilmu atau program Studi Pendidikan formal dari pejabat struktural relevan dengan bidang tugas yang diembannya. Keadaan ini telah memudahkan para pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan capaian hasil yang maksimal. Sementara itu sekitar 92% penempatan aparatur pada tugas fungsionalnya sesuai dengan bidang ilmu atau Program Studi Pendidikan formal dari aparatur tersebut, dan hal ini pula telah memudahkan aparatur dalam melaksanakan tupoksinya dengan baik dan dengan hasil capaian yang maksimal. Hanya saja memang jumlah penyuluh kita yang masih perlu ditambah” (IB, 16 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa relevansi bidang ilmu atau program studi pendidikan formal pejabat struktural dengan tugas strukturalnya sudah mencapai sekitar 88% sedang relevansi bidang ilmu atau program studi pendidikan formal staf dengan tugas fungsionalnya sudah mencapai sekitar 92%. Namun jumlah aparatur sebagai penyuluh yang perlu ditingkatkan, karena sudah ada beberapa yang pensiun sehingga ada penyuluh yang menangani 2 desa 1 penyuluh.

Berdasarkan data di atas, maka komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menduduki jabatan dapat mendukung tata pemerintahan yang baik yang dengan melakukan perbaikan sistem yang lebih terarah kepada kepentingan dan pelayanan publik terutama dalam peningkatan produktivitas pertanian, dukungan struktur organisasi yang handal dalam fleksibilitas pelayanannya, dan penggerakkan aparatur yang memiliki kapasitas individual dan skills individu sebagai aparatur yang tangguh dalam perspektif pelayanan publik untuk kemasyarakatan dan pembangunan pada sektor pertanian.

2) Keterampilan dan Profesionalisme SDM Pertanian

Organisasi pemerintah dituntut mampu meningkatkan kualitasnya, baik secara individu maupun kelembagaan. Peningkatan kualitas ini dirasakan sangat penting dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Pada sisi lain, peningkatan pelayanan produktivitas pertanian secara menyeluruh tidak bisa diabaikan mengingat tuntutan pelayanan yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Aparatur yang dibutuhkan saat ini, aparatur yang memiliki karakteristik kerja yang unggul, mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang menuntut kemampuan diri dan kualitas kerja yang diharapkan untuk mengembangkan dirinya agar dapat bekerja secara mandiri menuju profesionalisme birokrasi yang handal dan terpercaya.

Bertolak dari nilai strategis di atas, baik dalam konteks keterampilan, profesionalisme maupun strategi pengembangan sumber daya manusia, ketiganya perlu diperbaiki secara terencana dan terprogram. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat bagi peningkatan kinerja pegawai yang nyata, sehingga diperlukan adanya struktur yang memungkinkan terjadinya "*learning process*" atau proses belajar yang berkesinambungan.

Berkaitan dengan profesionalisme birokrasi, Harits (2006: 6) menyatakan bahwa profesionalisme birokrasi yang andal dimaksud aparatur atau pegawai yang bekerja pada setiap unit pelayanan pemerintahan dalam berbagai level, memiliki keahlian dan keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya dan memiliki tanggungjawab moral atau etika profesi dalam memberikan pelayanan

kepada publik dan lingkungannya sebagai bagian dari kewajiban kebijakannya.

Keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian sangat berkaitan dengan iklim lingkungan kerja yang menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan semangat kerja petani. Tanpa lingkungan kerja yang baik atau kondusif, petani akan mudah bosan dan tidak betah untuk bekerja sehingga berdampak pada tingkat produktivitas pertanian. Secara umum ada dua jenis lingkungan kerja yaitu sebagai berikut lingkungan kerja non fisik dan fisik. Lingkungan fisik merupakan suatu keadaan yang berbentuk secara fisik yang ada di sekitar tempat bekerja. Sedangkan lingkungan kerja non fisik adalah semua hubungan yang terdapat dalam urusan kerja.

Untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk bimbingan teknis kepada petani untuk membantu mereka menerapkan praktik-praktik pertanian yang lebih baik merupakan hal terpenting juga dalam memahami peningkatan keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian. Untuk menilai hal tersebut, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Setiap saat penyuluh kami dilapangan diarahkan untuk melakukan pendampingan kepada petani. Bentuk pendampingan yang dilakukan terkait beberapa aspek seperti penggunaan bibit yang bermutu, cara mengatasi hama, pendistribusian pupuk bahkan kami melakukan pelatihan secara langsung bekerjasama dengan formulator” (AN, 19 Juni 2023)

Kepala Bidang Penyuluhan menjelaskan bahwa sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian, penyuluh pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang selalu diarahkan untuk melakukan pendampingan kepada petani. Dalam pendampingan kepada petani, terdapat penekanan pada beberapa aspek yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Penggunaan bibit yang bermutu membantu petani untuk memulai dengan dasar yang kuat. Cara mengatasi hama adalah elemen penting dalam menjaga hasil panen dan mengurangi kerugian. Pendistribusian pupuk yang efisien juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Pelatihan langsung dengan formulator menunjukkan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani.

Kesadaran akan perubahan iklim dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh petani. Dengan pendampingan yang terfokus pada aspek-aspek tertentu, pemerintah daerah berusaha untuk membuat petani lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Ini adalah langkah yang sangat positif untuk memastikan bahwa pertanian tetap berkelanjutan dan menguntungkan di masa depan. Selain meningkatkan produktivitas petani, upaya pendampingan ini juga memiliki dampak positif pada ketahanan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk memastikan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada petani, khususnya program-program pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka

peneliti mewawancarai informan dari Ketua Kelompok Tani Bulcen Satu, Desa Bulu Cenrana, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang.

“Penyuluh biasanya melakukan pendampingan dalam bentuk sosialisasi saja, sangat jarang dalam bentuk praktek langsung. Padahal itu yang sangat kami butuhkan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan seperti penggunaan obat-obat pertanian, mengecek pendataan RDKK kelompok tani untuk pupuk bersubsidi dan masalah harga gabah” (AO, 23 Juni 2023).

Pernyataan Ketua Kelompok Tani diatas mengindikasikan bahwa petani merasa kurang puas dengan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Mereka lebih membutuhkan pendampingan dalam bentuk praktek langsung atau studi lapang. Kebutuhan petani akan pengalaman nyata dalam menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Pentingnya praktik lapangan untuk membantu petani dalam mengatasi tantangan pertanian sehari-hari.

Keterbatasan pendampingan dalam bentuk praktek langsung menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan pendampingan tersebut. Saat penyuluh hanya melakukan sosialisasi, petani mungkin tidak mendapatkan pengalaman yang cukup dalam menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Pernyataan Ketua Kelompok Tani juga memberikan pemahaman tentang kondisi lingkungan kerja penyuluh pertanian di lapangan. Hal tersebut dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki pendekatan dan alat kerja penyuluh, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada petani.

Peningkatan keterampilan dan profesionalisme SDM pada bidang pertanian, pemberian *reward* terhadap SDM pertanian dan petani itu sangat

penting. Untuk SDM pertanian, *reward* dapat berupa pelatihan lanjutan, beasiswa, atau pendanaan proyek pertanian. Ini akan membantu meningkatkan kualitas SDM pertanian, sehingga mereka menjadi lebih terampil dan kompeten dalam mengelola dan meningkatkan kinerja sebagai upaya memajukan sektor pertanian. Bagi petani, pemberian *reward* adalah cara untuk menghargai kerja keras dan prestasi dalam bidang pertanian. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi petani untuk bekerja lebih keras dan cerdas, karena mereka tahu bahwa usaha mereka diakui dan dihargai sehingga bisa berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Dengan memberikan *reward* kepada petani yang berhasil mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menghasilkan produk pertanian berkualitas yang lebih kompetitif di pasar untuk mendukung visi untuk mewujudkan daerah agrobisnis yang maju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait *reward* atau penghargaan yang selama ini dilakukan oleh instansi yang dipimpinnya.

“Kalau untuk *reward* atau penghargaan kepada SDM pertanian, setiap tahunnya ada di programkan oleh Kementerian Pertanian. Dan alhamdulillah tahun 2023 ini salah satu penyuluh di Sidrap mendapatkan penghargaan sebagai penyuluh berprestasi”. (IB, 13 Juni 2023)

Untuk lebih mendalami informasi terkait program Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng terkait *reward* atau penghargaan kepada SDM pertanian, peneliti kemudian mempertanyakan terkait program *reward* secara

khusus yang di inisiasi oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Pemerintah daerah selalu memberikan apresiasi kepada penyuluh yang berkinerja baik. Terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan pendampingan kepada petani. Hanya saja, bentuk reward yang diberikan sekadar apresiasi kinerja, karena kita keterbatasan anggaran”. (IB,13 Juni 2023)

Peningkatan produktivitas pertanian sering kali memerlukan adopsi teknologi baru, praktik pertanian yang lebih efisien, dan perubahan pola pikir. Dengan memberikan reward kepada individu atau kelompok yang berkinerja baik, berhasil mengadopsi inovasi dan mencapai peningkatan produktivitas, pemerintah daerah dapat merangsang budaya inovasi dan perubahan yang positif.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa program *reward* atau penghargaan kepada SDM pertanian setiap tahunnya telah diatur oleh Kementerian Pertanian. Adanya pencapaian yang diakui dan diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam upaya penyuluhan pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Program *reward* dan penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi besar bagi para penyuluh dan petani untuk berkinerja lebih baik. Pengakuan atas usaha mereka dalam meningkatkan produktivitas pertanian dapat meningkatkan semangat mereka untuk terus berkontribusi pada visi "Mewujudkan Agrobisnis yang Maju" di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bentuk *reward* yang diberikan saat ini adalah dalam bentuk apresiasi kinerja, yang kemungkinan mencakup penghargaan verbal atau sertifikat. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran untuk pemberian *reward* kepada SDM pertanian dan petani yang sumbernya dari APDB kabupaten, penting untuk dicatat bahwa apresiasi terhadap kinerja penyuluh dan petani tetap merupakan langkah positif agar dapat memotivasi mereka untuk terus berusaha lebih baik.

Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada Yanto Arbanu, yang terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan sebagai penyuluh berprestasi asal Kabupaten Sidenreng Rappang dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah.. saya mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai penyuluh berprestasi dari Kementerian Pertanian bulan Januari 2023. Penghargaan itu, saya akan dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi memberikan pendampingan kepada para petani di lapangan”. (YA,13 Juni 2023)

Lanjutan wawancara dengan Yanto Arbanu :

“Keberhasilan pertanian tidak boleh lepas dari kolaborasi antara penyuluh dan petani. Olehnya itu, kolaborasi antara Dinas Pertanian sebagai rumah aspirasi penyuluh dan petani sebagai mitra penyuluh harus tetap terjalin dengan baik. Petani kita tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Sebagai penyuluh kami akan terus selalu berdampingan dengan petani demi terwujudnya produktivitas pertanian yang lebih baik”. (YA, 13 Juni 2023)



Gambar 4.7 : Yanto Arbanu, Penyuluh Berprestasi asal Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendapatkan reward dari Kementerian Pertanian RI

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penghargaan yang diterima dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadi sumber motivasi tambahan untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai penyuluh pertanian. Ini mencerminkan pentingnya pengakuan dan penghargaan sebagai faktor pendorong dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, dalam wawancara tersebut, Yanto menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara penyuluh dan petani. Kolaborasi ini dilihatnya sebagai kunci keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Kesadaran akan peran penting yang dimainkan oleh penyuluh dalam mendampingi petani dalam menghadapi berbagai tantangan pertanian.

Hasil wawancara tersebut menegaskan jika pemberian *reward* atau penghargaan kepada SDM pertanian dan petani dapat memiliki dampak positif dalam memotivasi penyuluh serta petani untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada sektor pertanian. Peran dan motivasi SDM pertanian dan petani itu sendiri sebagai upaya dalam mencapai visi pembangunan daerah "Mewujudkan Agrobisnis yang Maju".

3) Rekrutmen SDM Pertanian

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Umumnya pemimpin mengharapkan kinerja yang baik dari masing-masing pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh institusi pemerintahan. Lembaga pemerintahan menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam proses pembangunan, oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan SDM adalah rekrutmen dan seleksi. menurut Handoko (2008:69), "Rekrutmen merupakan proses pencarian dan "pemikatan" para calon karyawan (pegawai) yang mampu untuk melamar sebagai karyawan". Rekrutmen adalah proses menarik, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan.

Untuk mendapatkan calon pegawai yang berkualitas, maka pemerintah harus dapat melakukan proses rekrutmen yang baik. Adapun manfaat dari rekrutmen adalah memiliki fungsi sebagai "*The Right Man On The Right Place*", dimana hal ini menjadi pegangan bagi para pemimpin dalam menempatkan pegawai yang ada di lembaga pemerintahan. Kinerja (*performance*) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai. Kinerja seorang pegawai akan baik apabila pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya upah/imbalan yang layak dan mempunyai harapan masa depan. Kinerja yang optimal akan terwujud bilamana organisasi dapat memilih pegawai

yang memiliki motivasi dan kecapakan yang sesuai dengan pekerjaannya serta memiliki kondisi yang memungkinkan agar dapat bekerja secara maksimal.

Salah satu aspek kunci dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah adalah rekrutmen pegawai yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Rekrutmen yang efektif dapat memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki tim yang kompeten dan berkomitmen untuk mendukung sektor pertanian dalam mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Mengenai Rekrutmen SDM pertanian khususnya penyuluh di Kabupaten Sidenreng Rappang, Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :

“Terkait SDM penyuluh pertanian, jumlah penyuluh pertanian yang diterima tidak sebanding dengan jumlah penyuluh yang sudah pensiun sehingga memang kuantitas SDM khusus di bidang pertanian jauh lebih berkurang dibanding sebelumnya. Jadi tidak sebanding luas wilayah yang mau didampingi oleh penyuluh dengan SDM yang kita miliki karena keterbatasan pengangkatan ASN atau P3K bidang pertanian” (IB, 13 Juni 2023)

Dari hasil wawancara menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penyuluh pertanian yang diterima dengan jumlah penyuluh yang sudah pensiun. Hal ini menyebabkan jumlah SDM yang khusus di bidang pertanian jauh lebih berkurang dibandingkan sebelumnya. Artinya, kuantitas SDM penyuluh pertanian yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk menangani semua kebutuhan petani di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keterbatasan dalam pengangkatan ASN atau P3K bidang pertanian menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan jumlah penyuluh pertanian. Ini menunjukkan bahwa ada hambatan struktural dalam pengembangan SDM penyuluh pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ibrahim juga menyoroti tantangan terkait dengan luasnya wilayah yang harus didampingi oleh penyuluh pertanian yang terbatas dalam jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh pertanian yang ada mungkin harus menangani banyak wilayah secara bersamaan, yang dapat memengaruhi kualitas pendampingan yang dapat mereka berikan kepada petani. Dalam konteks visi Pemerintah Daerah "Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju," tantangan pengembangan SDM penyuluh pertanian menjadi sangat relevan.

Peran penyuluh pertanian dalam upaya mendukung produktivitas pertanian sangat vital. Mereka tidak hanya memberikan informasi dan panduan praktis tetapi juga membantu petani mengembangkan keterampilan, mengelola risiko, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam produksi pertanian. Dengan demikian, penyuluh pertanian adalah aset berharga dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani. Hal itu juga dikemukakan oleh Pimpinan Komisi 2 DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang :

“Jumlah penyuluh pertanian kita masih sangat kurang di Sidrap, sehingga itu berdampak pada kurang optimalnya pendampingan yang dilakukan kepada petani yang menyebabkan turunnya tingkat produktivitas pertanian kita. Bayangkan ada penyuluh yang merangkap sebagai PPK di tingkat kecamatan dan juga merangkap sebagai BPP, padahal aturannya harus satu penyuluh satu desa. Makanya kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa dalam penerimaan

P3K kedepannya, harus memprioritaskan pengangkatan penyuluh pertanian” (B-PAS, 12 Agustus 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi masalah serius dalam hal jumlah penyuluh pertanian yang sangat kurang. Hal ini memiliki dampak signifikan pada kualitas dan optimalitas pendampingan yang diberikan kepada petani. Akibatnya, tingkat produktivitas pertanian di daerah ini mengalami penurunan. Adanya penyuluh pertanian yang merangkap sebagai PPK di tingkat kecamatan dan juga merangkap sebagai BPP, padahal aturan seharusnya memungkinkan satu penyuluh untuk satu desa. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam alokasi sumber daya manusia yang tidak efisien dan bisa berdampak pada pelayanan yang tidak optimal kepada petani.

Pimpinan Komisi 2 DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah bahwa prioritas harus diberikan pada pengangkatan penyuluh pertanian dalam penerimaan P3K. Kesadaran akan pentingnya meningkatkan jumlah dan kualitas penyuluh pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasil wawancara ini memberikan gambaran penting tentang peran penyuluh pertanian dalam mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ini juga menunjukkan perlunya upaya konkret dalam merekrut penyuluh pertanian sebagai upaya pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah untuk mengatasi kendala-kendala yang telah

diidentifikasi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada sektor pertanian dan visi pembangunan daerah yang lebih luas.

Selain rekrutmen SDM pertanian dalam hal ini penyuluh pertanian, rekrutmen kelembagaan petani seperti kelompok tani juga akan sangat mendukung pengembangan SDM pertanian. Kelompok tani tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi yang mendukung produktivitas pertanian yang lebih tinggi. Selain itu, mereka dapat berperan dalam mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan visi pembangunan daerah sebagai daerah agrobisnis yang maju.

Kelembagaan petani memungkinkan kolaborasi antara petani dalam pengembangan pertanian. Mereka dapat berbagi sumber daya seperti alat pertanian, benih, pupuk, dan lainnya. Ini akan membantu petani yang mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber daya untuk tetap berproduksi dengan efisien. Kelompok tani juga dapat berperan dalam mewakili kepentingan petani di tingkat pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Mereka dapat berbicara dengan suara bersama untuk mengadvokasi kebijakan yang mendukung pertanian dan petani. Dengan adanya kelompok tani, petani cenderung lebih terorganisasi dan berorientasi pada keberlanjutan. Kelompok tani juga menciptakan rasa solidaritas dan dukungan antarpetani. Mereka dapat membantu satu sama lain dalam mengatasi tantangan dan krisis yang mungkin terjadi dalam pertanian, seperti bencana alam atau penyakit tanaman.

Terkait pembentukan kelompok tani di Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa :

“Untuk pembentukan kelompok tani di dasari pada hasil musyawarah kelompok tani dan anggotanya itu sendiri, dihadiri oleh petugas misalnya dari penyuluh, dan juga aparat desa. Kemudian dirapatkan nama kelompok tani, struktur, jumlah pengurus dan dibuatkan berita acara pengukuhan. Nantinya penyuluh membuat laporan ke Kabupaten untuk dibuatkan SK Kelompok Tani. Proses rekrutmen kelompok tani dilakukan setiap tahun karena terkadang ada kelompok tani yang melakukan perubahan (*reshuffle*). Ada juga kondisi kelompok tani ini melakukan pemekaran” (AN, 16 Juni 2023).

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara diatas dikatakan bahwa proses pembentukan kelompok tani dimulai dari hasil musyawarah yang melibatkan petugas, termasuk penyuluh pertanian, dan aparat desa. Ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses tersebut. Sebagai bentuk langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kelompok tani, maka dalam proses pembentukan kelompok tani didokumentasikan dengan baik, termasuk nama kelompok, struktur internal, dan jumlah pengurus.

Proses rekrutmen kelompok tani dilakukan setiap tahun, dengan mempertimbangkan bahwa ada kelompok tani yang dapat melakukan perubahan (*reshuffle*) atau pemekaran. Fleksibilitas dalam menyesuaikan struktur kelompok tani dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Kelompok tani dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendukung

praktik pertanian yang lebih baik, berkolaborasi dalam penggunaan sumber daya, dan memperkuat komunitas petani.

Untuk memperkuat penjelasan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Kalosi Desa Kalosi, Kec. Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengatakan bahwa :

“Kelompok Tani Kalosi beranggotakan 35 orang dengan luas lahan yang berbeda-beda. Dengan adanya kelompok tani, tentu sangat bermanfaat bagi kami sebagai petani. Karena kami bisa saling tukar informasi, dan dapat pendampingan dari penyuluh. Kelompok Tani kami juga biasa mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti bibit, handsprayer dan hand taktor. SK kelompok tani kami di tanda tangani langsung oleh Bupati”. (ARM, 30 Juni 2023).

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Kalosi terkait rekrutmen dalam pembentukan kelompok tani, peran dan manfaat dalam konteks pertanian di daerah kabupaten Sidenreng Rappang. Dikatakan jika kelompok tani telah menjadi saluran penting untuk pertukaran informasi antara petani, saling berbagi informasi dan pengetahuan, serta mendapatkan pendampingan dari penyuluh pertanian yang dapat meningkatkan praktik kerja pertanian, mendukung produktivitas, dan mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Rekrutmen kelembagaan petani yang dapat menjadi sorotan di era saat ini yaitu rekrutmen petani milenial, karena petani milenial memiliki potensi besar untuk memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui inovasi, penggunaan teknologi, kesadaran lingkungan, dan semangat berwirausaha. Untuk mendukung pertumbuhan

sektor pertanian dan menjawab tantangan global terkait pangan, penting bagi pemerintah dan organisasi pertanian untuk berinvestasi dalam pelatihan, pendidikan, dan dukungan yang memungkinkan generasi milenial untuk berkembang sebagai petani yang sukses dan berkelanjutan.

Rekrutmen petani milenial yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sidenreng Rappang berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

“Jumlah peminat dari generasi muda di sektor pertanian masih tergolong rendah. Kemungkinan pemahamannya jika sektor pertanian belum menjamin untuk kesejahteraan. Padahal kalau dikelola dengan baik dan ada inovasi yang dilakukan seperti penggunaan teknologi moderen, pemanfaatan media sosial untuk pemasaran, wirausaha di sektor pertanian serta kesadaran akan pentingnya kemandirian pangan, tentu juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan. Namun kami selalu berupaya untuk bagaimana melibatkan dan memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi kepada generasi muda terutama ditingkat desa” (IB, 13 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas yang menyatakan jika jumlah peminat dari generasi muda dalam sektor pertanian masih rendah. Persepsi umum yang ada di *minsed* generasi muda kita bahwa sektor pertanian mungkin tidak menjamin kesejahteraan seperti sektor-sektor lainnya. Tantangan ini menyoroti pentingnya memperbaiki citra dan meningkatkan pemahaman tentang potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya, potensi sektor pertanian untuk menghasilkan kesejahteraan dengan mengelola pertanian secara efisien dan berinovasi bisa diprakarsai oleh generasi milenial. Penggunaan teknologi modern, seperti aplikasi pertanian untuk memantau

cuaca, dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko. Mendorong wirausaha muda pertanian dan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pertanian juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Pentingnya edukasi dan pelatihan tentang inovasi teknologi, teknik pemasaran melalui media sosial dan dorongan untuk menjadi wirausaha pertanian kepada generasi muda di Sidenreng Rappang untuk membantu mereka melihat nilai tambah dalam berkarir di bidang pertanian. Sekalipun upaya pemerintah daerah untuk melibatkan generasi muda dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi, terutama di tingkat desa menjadi langkah yang positif untuk mendekati dan membangun kesadaran generasi muda tentang potensi sektor pertanian.

Dari berbagai penjelasan hasil wawancara terkait pengembangan sumber daya manusia dalam proses rekrutmen SDM pertanian dan kelembagaan petani maka dapat disimpulkan jika peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung pengembangan SDM pertanian, kelompok tani dan petani milenial di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan mengintegrasikan upaya pengembangan SDM pertanian, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan visi pembangunan pertanian. Inisiatif ini tidak hanya akan memberdayakan petani untuk meningkatkan produktivitas mereka tetapi juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan petani secara keseluruhan. Dengan demikian, pengembangan kapasitas

pemerintah daerah akan menjadi kunci dalam mewujudkan visi "Mewujudkan Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju".

- **Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah pada level individu dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang diintervensi melalui 3 (tiga) indikator yakni tingkat pendidikan SDM pertanian, keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian, serta rekrutmen SDM pertanian.

Tingkat pendidikan SDM pertanian diintervensi melalui sub kegiatan : Pendidikan formal SDM pertanian baik pejabat struktural maupun fungsional, Relevansi pendidikan formal dengan tugas pokok dan fungsi SDM pertanian, serta Program studi lanjut SDM pertanian. Tingkat pendidikan aparatur pemerintah daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu ditingkatkan, terutama yang lanjut studi untuk S2. Relevansi bidang ilmu atau program studi pendidikan formal pejabat struktural dengan tugas strukturalnya sudah mencapai sekitar 88% sedangkan relevansi bidang ilmu atau program studi pendidikan formal staf dengan tugas fungsionalnya sudah mencapai sekitar 92%. Namun jumlah aparatur sebagai penyuluh yang perlu ditingkatkan, karena sudah ada beberapa yang pensiun sehingga ada penyuluh yang menangani 2 desa 1 penyuluh.

Keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian diintervensi melalui sub kegiatan : Pendampingan petani untuk peningkatan produktivitas pertanian dan pemberian *reward*. Pemberian *reward* atau penghargaan kepada SDM pertanian dan petani dapat memiliki dampak positif dalam memotivasi penyuluh serta petani untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada sektor pertanian.

Rekrutmen SDM pertanian diintervensi melalui sub kegiatan : Rekrutmen SDM penyuluh pertanian, Rekrutmen kelembagaan petani, serta Rekrutmen Petani Milenial. Pengembangan sumber daya manusia dalam proses rekrutmen SDM pertanian dan kelembagaan petani oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sangat penting untuk dilakukan dalam mendukung pengembangan SDM pertanian, kelompok tani dan petani milenial untuk mencapai tujuan visi pembangunan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan. Galbraith, J (Yuliani et al., 2020) mengatakan bahwa organisasi harus mengarahkan seluruh sumber dayanya untuk mengikuti harapan-harapan dari lingkungannya. Konsep adaptif organisasi muncul bukan karena kebetulan, tetapi merupakan tuntutan kepada organisasi untuk melakukan perubahan dalam lima area perubahan seperti *people*, proses, strategi, struktur organisasi dan teknologi. Organisasi adaptif dapat memahami segala perubahan lingkungan organisasinya baik internal maupun eksternal. (Yuliani, 2020).

Kinerja organisasi merupakan totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauhmana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa kinerja organisasi mencakup lima aspek, yaitu (1) produktivitas, (2) kualitas layanan, (3) responsivitas, (4) responsibilitas, dan (5) akuntabilitas.

Pengembangan kapasitas pada level organisasi yang dimaksud adalah berfokus kepada bagaimana tata manajemen yang bagus dan sesuai untuk meningkatkan dan menjadikan tujuan awal berhasil dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintah daerah, dengan fokus : manajemen organisasi,

budaya kerja dan pengembangan SDM pemerintah daerah pada sektor pertanian.

Dengan mengembangkan kapasitas pada tingkat organisasi pemerintah daerah, akan terbentuk lingkungan yang mendukung untuk inovasi, pengembangan teknologi, dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan dalam sektor pertanian. Hal ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih adaptif dan efisien dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

1) Manajemen Organisasi Pemerintah Daerah pada sektor pertanian

Manajemen organisasi adalah serangkaian aktivitas dan praktik yang dilakukan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengambilan keputusan, perencanaan strategis, alokasi sumber daya, serta pengorganisasian dan pengendalian proses-proses yang ada dalam organisasi.

Berjalannya roda organisasi tidak lepas dari fungsi manajemen yang dijalankannya. Hal ini berkaitan dengan banyak unsur, baik program, struktur organisasi, dan lain sebagainya. Dengan adanya manajemen yang baik, maka roda organisasi akan berjalan semestinya menuju tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen organisasi yang digunakan biasanya disebut POAC atau *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Pengarahan), serta *Controlling* (Pengendalian).

Manajemen organisasi dalam sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pendekatan yang penting dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan pencapaian visi pembangunan pertanian yang lebih maju. Manajemen organisasi dimulai dengan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah harus merencanakan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. Ini termasuk penetapan tujuan jangka panjang, perumusan strategi pertanian, dan rencana kerja tahunan. Perencanaan ini akan memandu upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Manajemen organisasi di sektor pertanian juga harus mendorong partisipasi aktif masyarakat, terutama petani, dalam pengambilan keputusan. Masyarakat harus merasa memiliki pembangunan pertanian dan berkontribusi pada perencanaan dan implementasi kebijakan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :

“Dalam tahap perencanaan program di dinas kami, selalu merujuk kepada pencapaian visi misi Bupati Sidrap yang termuat dalam RPJMD yaitu mewujudkan Sidrap sebagai daerah agrobisnis yang maju. Kami juga sudah tindaklanjuti dalam bentuk Renstra. Setiap tahunnya kami juga menyusun RKPD khusus untuk Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Kami secara aktif mengidentifikasi tantangan utama dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian, seperti perubahan iklim, penyakit tanaman, dan ketidakpastian harga. Kami mengelola tantangan ini melalui pemantauan, penelitian, dan pendekatan adaptif yang memungkinkan kami untuk memberikan solusi yang efektif”. (IB, 13 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam perencanaan program, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sangat menekankan pengaitan dengan visi dan misi Bupati Sidrap yang tercantum dalam RPJMD. Hal tersebut menunjukkan komitmen untuk mendukung agenda pembangunan daerah secara keseluruhan. Dinas juga telah mengambil langkah konkret dengan menyusun Renstra dan RKPD khusus yang mengakomodasi program-program yang mendukung visi agrobisnis yang maju. Selanjutnya, pentingnya pengidentifikasian tantangan utama petani, seperti perubahan iklim, penyakit tanaman, dan ketidakpastian harga, menunjukkan kesadaran akan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Identifikasi ini menjadi dasar bagi pengembangan strategi penyelesaiannya. Upaya dalam melakukan pemantauan, penelitian, dan pendekatan adaptif adalah langkah yang bijaksana dalam mengatasi tantangan yang diidentifikasi.

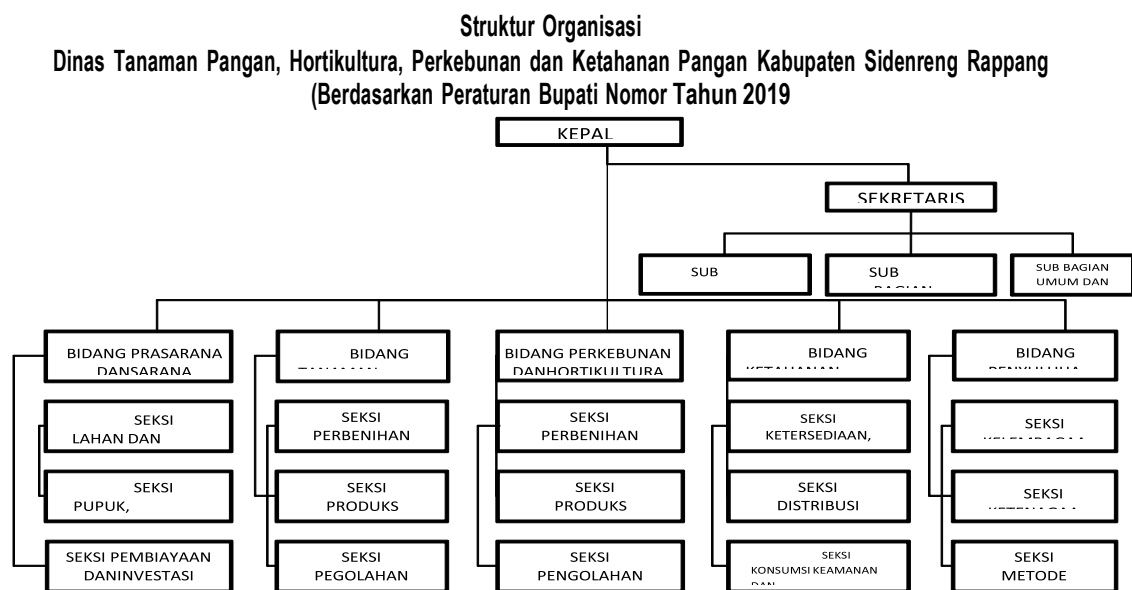
Hal yang terpenting juga dalam memaknai manajemen organisasi adalah struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki peran penting dalam konteks manajemen organisasi karena membentuk kerangka dasar yang mengatur bagaimana tugas, tanggung jawab, otoritas, dan sumber daya didistribusikan dalam suatu organisasi. struktur organisasi adalah kerangka dasar yang esensial dalam manajemen organisasi karena membantu mengorganisasi dan mengarahkan upaya kolektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan merancang dan mengelola struktur organisasi yang

tepat, organisasi dapat berfungsi lebih efisien, efektif, dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan tantangan di lingkungan yang selalu berubah.

Terkait struktur organisasi pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang berikut hasil wawancara dengan Ibrahim, SP selaku Kepala Dinas.

"Struktur organisasi Dinas kami dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Kami memiliki beberapa bidang yang fokus pada berbagai aspek pertanian, termasuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, penyuluhan, sarana dan prasarana. Setiap bidang memiliki kepala bidang, kepala seksi dan staf yang bertanggung jawab atas sektor tertentu. Selain itu, kami memiliki bagian perencanaan dan pengembangan untuk merancang program-program yang mendukung visi "Mewujudkan Sidrap sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju. Kami sudah mengatur tanggung jawab dan tugas dengan jelas dalam peran dan fungsi masing-masing bidang. Setiap bidang memiliki tanggung jawab khusus terkait sektor pertanian yang mereka layani. Kami juga memiliki pertemuan rutin antarunit dan komunikasi terbuka untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi yang baik antarbagian." (IB, 13 Juni 2023).

Adapun Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang :



Gambar 4.8 : Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Fungsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemberi dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan program dan manajemen organisasi pemerintah daerah pada sektor pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas

pertanian, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang PPSPDAPM BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa :

“Program yang dijalankan dalam pembangunan sektor pertanian adalah program perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam. Ditindak lanjuti dalam beberapa aspek kegiatan dimulai dari perencanaan karena tupoksi dari BAPPELITBANGDA adalah perencanaan. Yang pertama mengetahui isu strategis di dunia pertanian berdasarkan data beberapa tahun terakhir, berdasarkan data tersebut dilakukan pemetaan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang ada sekaligus meningkatkan potensi-potensi pertanian yang ada. Kemudian dilakukan sinkronisasi program bila memungkinkan dilakukan antar OPD atau hanya pada OPD pertanian. Selanjutnya, perencanaan tersebut disinkronkan atau diselaraskan dengan anggaran. Jadi diupayakan yang menjadi program prioritas bupati atau isu permasalahan pembangunan daerah di bidang pertanian diupayakan mendapat anggaran. Ada beberapa Isu strategis di bidang pertanian yang dijumpai di lapangan akhir-akhir ini yang banyak adalah berkurangnya lahan pertanian khususnya lahan irigasi teknis atau lahan produktif khusus di bidang pertanian. Kemudian adanya bencana alam seperti banjir dan hama penyakit yang mengakibatkan turunnya produktivitas pertanian” (ADL, 16 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Kepala Bidang PPSPDAPM BAPPELITBANGDA menjelaskan bahwa fokus utama dari untuk mendukung program dan pencapaian visi pemerintah daerah adalah perencanaan pembangunan pada sektor pertanian. Perencanaan menjadi tahap awal yang sangat penting dalam manajemen organisasi untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan mengarahkan program-program yang diperlukan. BAPPELITBANGDA melakukan pemetaan isu-isu strategis di dunia pertanian berdasarkan data beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa keputusan program didasarkan pada data dan analisis yang kuat, yang merupakan aspek penting dalam manajemen berbasis fakta lapangan.

Selanjutnya, hasil wawancara menyoroti pentingnya sinkronisasi program. Program-program yang dijalankan dalam sektor pertanian harus disinkronkan dengan baik, baik antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun dalam rangkaian perencanaan dan anggaran. Program-program yang dijalankan dalam sektor pertanian diupayakan sesuai dengan prioritas Bupati dan isu-isu permasalahan pembangunan daerah di bidang pertanian. Ini menggambarkan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam mencapai visi "Mewujudkan Sidrap sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju."

Dalam hal pengawasan terkait program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, peneliti melakukan wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Samsumarlin yang menyatakan bahwa :

"Setiap saat kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait masalah pertanian. Ini penting karena mayoritas pendapatan utama masyarakat Sidrap itu bekerja sebagai petani. Hanya saja, kami menilai pemerintah daerah belum maksimal dan belum serius menjawab kebutuhan petani. Masih banyak permasalahan yang kami temukan, seperti kurangnya pupuk, penaggulangan ham dan lainnya. Sementara, anggaran yang digelontorkan untuk pengangan hama saja hanya 19 juta tahun ini, sementara itu termasuk permasalahan utama yang dihadapi petani saat ini. Dampaknya apa, tingkat produktivitas menjadi menurun. Justru kami menilai pemerintah daerah justru banyak mengalokasikan anggaran ke sektor pariwisata, padahal itu tidak menjadi prioritas sebenarnya". (SMR, 18 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Sidrap, Samsumarlin yang mengangkat isu terkait kurangnya perhatian terhadap pertanian dalam alokasi anggaran. Dengan mayoritas pendapatan masyarakat Sidrap berasal dari pertanian, penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor ini dalam perencanaan anggaran. Tidak adanya anggaran yang memadai untuk mengatasi masalah seperti

pengendalian hama dapat berdampak negatif pada produktivitas pertanian. Anggota DPRD mencatat beberapa permasalahan utama dalam pertanian, seperti kurangnya pupuk dan penanganan hama. Identifikasi masalah ini penting dalam manajemen organisasi karena dapat menjadi landasan untuk merancang program-program yang efektif. Keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani sangat bergantung pada penyelesaian masalah-masalah ini.

Kritik terhadap alokasi anggaran yang cenderung lebih banyak untuk sektor pariwisata menunjukkan adanya perbedaan prioritas antara legislatif dan eksekutif. Hal tersebut mencerminkan tantangan dalam mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai visi pembangunan daerah yang lebih besar, dalam hal ini "Mewujudkan Sidrap sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju." Menyoroti alokasi anggaran yang rendah untuk pengendalian hama dan masalah pertanian lainnya, pihak DPRD menekankan pentingnya melakukan evaluasi anggaran secara berkala untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan bijaksana sesuai dengan prioritas.

UNDP (1999) menjelaskan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pengembangan daerah, ketersediaan sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengelola keuangan pemerintah daerah yang dapat mengelola sumber daya keuangannya dengan baik, mulai dari tahap penyusunan anggaran, pengalokasian anggaran, hingga pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan sangat membantu setiap satuan kerja di lingkup pemerintah kabupaten/kota

dalam mencapai program dan kegiatan sesuai dengan apa yang tertuang dalam rencana kerja masing- masing satker yang mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

Manajemen organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, ini termasuk aspek kunci dalam upaya pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang pertanian. Perencanaan strategis yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan perencanaan tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pertanian, merumuskan strategi dan program-program yang akan meningkatkan produktivitas pertanian. Manajemen organisasi juga membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, termasuk anggaran, personil, dan teknologi, untuk mendukung pertanian.

Dalam organisasi pemerintah daerah yang kompleks, instansi seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mesti memfasilitasi koordinasi antar bidang atau lembaga yang berbeda dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Ini penting karena berbagai lembaga seringkali terlibat dalam berbagai aspek pertanian, dan koordinasi yang baik memastikan bahwa upaya bersama dilakukan dengan efektif. Manajemen organisasi juga melibatkan evaluasi terus-menerus terhadap program dan kegiatan yang dilakukan. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak, sehingga perbaikan dapat dilakukan.

Dengan cara ini, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Salah satu aspek paling penting dari manajemen organisasi adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang terus berubah.

2) Budaya Kerja Organisasi Pemerintah Daerah pada sektor pertanian

Budaya kerja organisasi dalam pemerintahan daerah merujuk pada nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan perilaku yang mendefinisikan cara kerja dan interaksi di antara pegawai dan pemimpin dalam lingkungan pemerintahan daerah. Budaya kerja organisasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas, transparansi, dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintahan daerah. Budaya kerja organisasi yang mendorong keterbukaan dan transparansi memberikan akses terbuka kepada informasi dan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan itu akan menciptakan kepercayaan dan akuntabilitas yang lebih besar, serta meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintahan daerah yang memiliki budaya kerja yang kuat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas akan berfokus pada kepentingan masyarakat. Pegawai pemerintah daerah diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang efisien, responsif, dan profesional kepada masyarakat. Selanjutnya, Budaya organisasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat mengutamakan mendengarkan dan merespons masukan, keluhan, dan aspirasi masyarakat. Ini dapat menciptakan

pemerintahan daerah yang lebih terhubung dengan kebutuhan dan keinginan warganya.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, norma-norma atau nilai-nilai yang diharapkan dijunjung tinggi oleh seluruh aparat sebagai bentuk penerapan dari budaya kerja organisasi, hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

“Untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan program pemerintah daerah yang telah dicanangkan dalam RPJMD, maka pada setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ditetapkanlah nilai-nilai Budaya Kerja yang terdiri dari: Proaktif, Disiplin, Inovasi, Kerja sama, dan Transparan” (SDB, 17 Juni 2023).

Dalam wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menekankan pentingnya budaya organisasi sebagai salah satu elemen kunci dalam mencapai visi, misi, dan program pemerintah daerah. Ini mengindikasikan pemahaman yang baik tentang peran budaya organisasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah. Nilai-nilai Budaya Kerja yang ditetapkan, yaitu Proaktif, Disiplin, Inovasi, Kerja sama, dan Transparan, terlihat sangat relevan dengan konteks pengembangan pertanian. Proaktif dan Inovasi dapat mendorong pendekatan baru dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sedangkan Disiplin dan Transparan menciptakan tata kelola yang efektif. Kerja sama juga sangat penting dalam menggalang dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan pertanian.

Fakta bahwa nilai-nilai budaya kerja ini diterapkan dalam setiap aspek penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan sesuai dengan RPJMD menunjukkan kesinambungan dan konsistensi dalam upaya penguatan organisasi. Budaya organisasi yang ditanamkan seperti Proaktif dan Inovasi mencerminkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk dalam konteks pertanian yang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti iklim dan pasar. Oleh karena itu, pendekatan ini mendukung pengembangan kapasitas pemerintah daerah. Dengan menetapkan budaya organisasi yang mendukung produktivitas pertanian, pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap sektor ini sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Namun, implementasi budaya organisasi harus diikuti oleh sistem evaluasi dan pengukuran yang efektif untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten dan memberikan dampak positif pada produktivitas pertanian.

Selanjutnya khusus menyangkut dampak dari penerapan nilai-nilai budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan pencapaian visi sebagai daerah Agrobisnis yang Maju, dijelaskan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

“Sejak awal pemerintahan H. Dollah Mando dan H. Mahmud Yusuf, budaya kerja yang terdiri dari : Proaktif, Disiplin, Inovasi, Kerja sama, dan Transparan sudah diterapkan dalam penyelenggaraan semua aktivitas baik aktivitas pemerintahan maupun aktivitas pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk dalam upaya pencapaian visi misi pemerintahan daerah. Sekalipun terkadang, dalam implementasinya masih membutuhkan kesamaan persepsi dan gerakan dari semua stackholder yang ada. Di lingkup Dinas kami, arahan tersebut dalam setiap rapat kami sampaikan. Dampaknya, ada upaya

peningkatan kinerja dari seluruh SDM pertanian, walaupun belum berdampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian karena tantangan yang besar juga dihadapi oleh petani seperti perubahan iklim yang tidak menentu, hama dan penyakit masih seringkali ditemukan dan faktor lainnya” (IB. 16 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa budaya kerja yang terdiri dari Proaktif, Disiplin, Inovasi, Kerja sama, dan Transparan telah ada sejak awal pemerintahan H. Dollah Mando dan H. Mahmud Yusuf. Ini menunjukkan konsistensi dalam menerapkan budaya organisasi yang mendukung visi dan misi pemerintahan daerah. Kepala Dinas mencatat bahwa budaya kerja organisasi ini telah memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja seluruh SDM di bidang pertanian.

Meskipun budaya kerja organisasi telah diterapkan, ada kesadaran bahwa implementasinya belum selalu berjalan mulus. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami dan menerapkan budaya tersebut dengan konsisten. Dalam konteks pertanian, kesamaan persepsi dan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Bagi suatu organisasi, kinerja pegawai merupakan dasar dari aktivitas sumber daya lainnya, karena dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan diri pegawai, pemberian imbalan, atau bahkan memberhentikan seorang pegawai. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Kinerja ini dapat dipergunakan

manajemen untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai kinerja organisasi di lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Ibrahim SP mengatakan :

“Kami mengukur kinerja organisasi pada Dinas kami melalui berbagai indikator yang terkait dengan pencapaian visi Bupati Sidrap, dan itu sudah kami uraikan dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Termasuk dalam hal peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan pendapatan petani, dan peningkatan kualitas produk pertanian. Kami juga melihat efisiensi program-program yang kami jalankan, sejauh mana kami dapat mengalokasikan sumber daya termasuk anggaran, serta respons kami terhadap perubahan dalam kondisi lingkungan dan kebutuhan petani. Kami melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang kami jalankan. Kami mengumpulkan data tentang produktivitas pertanian, pendapatan petani, dan perkembangan sektor pertanian secara keseluruhan. Kami juga mendengarkan umpan balik dari petani dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi ini membantu kami memahami sejauh mana program-program kami berhasil dan masalah-masalah apa yang perlu perbaikan”. (IB, 13 Juni 2023).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya mengukur kinerja organisasi melalui berbagai indikator yang relevan dengan visi pembangunan daerah, yang telah diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas. Dalam renstra tersebut mencakup aspek-aspek kunci seperti masalah peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan pendapatan petani, dan peningkatan kualitas produk pertanian.

Praktik melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang dijalankan adalah bukti dari pendekatan berbasis bukti dalam mengukur kinerja organisasi. Dengan mengumpulkan data tentang produktivitas pertanian, pendapatan petani, dan perkembangan sektor pertanian secara teratur, Dinas memastikan bahwa mereka dapat mengukur dampak dari program-program yang telah dijalankan. Selanjutnya, mendengarkan umpan balik dari petani dan pemangku kepentingan lainnya, yang membantu dalam memahami secara lebih mendalam sejauh mana program-program tersebut berhasil dan masalah-masalah apa yang perlu perbaikan.

Selain memantau indikator kualitatif seperti produktivitas dan pendapatan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya, termasuk anggaran. Dalam upaya mencapai visi pembangunan daerah, efisiensi dalam penggunaan sumber daya adalah hal yang krusial, terutama di lingkungan anggaran yang terbatas.

Dalam menerima evaluasi dan masukan terkait kinerja organisasi, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa berkoordinasi dengan stackholder lainnya. Sebagaimana penjelasan lanjutan dari Kepala Dinas, Ibrahim, SP yang mengatakan bahwa :

“Evaluasi terkait kinerja kami juga berdasar kepada kerjasama dengan stackholder lainnya, seperti menerima masukan-masukan dari anggota DPRD, BPS, bahkan Bupati seringkali memberikan arahan-arahan terkait tupoksi dan kinerja kami dalam meningkatkan sektor pertanian”. (IB, 16 Juni 2023).

Salah satu poin utama yang muncul dalam wawancara diatas bahwa evaluasi kinerja organisasi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya didasarkan pada pengukuran internal, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan berbagai stackholder eksternal. Ini mencakup kerjasama dengan anggota DPRD, BPS, dan bahkan arahan-arahan dari Bupati. Pendekatan ini adalah langkah positif karena mengintegrasikan perspektif dan masukan dari berbagai pihak yang memiliki peran dalam pengembangan sektor pertanian. Kolaborasi semacam ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kinerja organisasi.

Kolaborasi antara dinas dan DPRD adalah hal yang penting dalam konteks pemerintahan daerah. Anggota DPRD memiliki pemahaman mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk petani. Dengan menerima masukan dari DPRD, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menyesuaikan program-program mereka agar lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Begitupun kolaborasi yang dilakukan dengan BPS (Badan Pusat Statistik) juga sangat penting dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi kinerja. Data statistik yang akurat dapat membantu dalam pemantauan dan pengukuran kinerja yang lebih obyektif. Ini membantu Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merancang program-program yang lebih tepat sasaran.

Peran Bupati juga dapat menjadi dorongan bagi dinas untuk meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang lebih baik. Arahan dari Bupati dapat memberikan panduan yang kuat tentang visi dan tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam upaya memastikan setiap program dan kinerja organisasi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Perekonomian, SDA & Pembangunan Manusia BAPPELITBANGDA Sidrap :

“Kami melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian setiap 3 bulannya. Rapat membahas pelaksanaan program-program yang telah dijalankan. Setelah diketahui hasilnya dilakukan evaluasi, apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Jika program tersebut tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan pencapaian target yang telah direncanakan, maka dipertanyakan dan dibahas apa yang menjadi kendala sehingga menyebabkan target-target tersebut tidak tercapai. Kemudian dicarikan solusinya untuk diambil langkah tindaklanjutnya”.(ADL, 19 Juni 2023).

Dalam wawancara diatas menguraikan peran BAPPELITBANGDA dalam mengelola dan mengawasi perencanaan pembangunan daerah sangat penting. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang direncanakan sesuai dengan visi pembangunan daerah yang lebih besar dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pendekatan secara berkala untuk melakukan pemantauan dan

evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian setiap 3 bulan adalah praktik yang sangat positif.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah pada sektor pertanian

Sumber daya manusia menurut Suwatno (Aswir & Misbah, 2018) bahwa selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi, karena sumber daya manusia merupakan perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Sumber daya manusia juga menjadi peran utama dalam setiap kegiatan organisasi. Senada dengan itu pengembangan sumber daya manusia dalam pemerintahan adaptif adalah suatu pengembangan sumber daya manusia yang telah dikelola pemerintah agar tetap diketahui pegawai dan masyarakat, meskipun di era global yang semakin pesat. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki kelompok tani dan masyarakat agar dapat mengembangkan ketarampilan dan *soft skill*. Sumber daya manusia sangat penting karena memiliki proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, serta melakukan memotivasi, terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan.

Training atau pelatihan adalah proses untuk melatih dan mengajarkan seseorang/pegawai tentang keterampilan atau pengetahuan yang belum diketahui yang nantinya akan dilakukan di dalam pekerjaan maupun usahanya. Pelatihan juga dapat diartikan sebagai program yang diberikan pimpinan atau instansi kepada tenaga kerja, pegawai atau karyawan untuk

meningkatkan kinerja dan kemampuan pegawai sesuai dengan tujuan dan harapan instansi. Pada sektor pertanian, terkait mengenai kegiatan pelatihan telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :

“Berbicara mengenai pemberian *training*/pelatihan tentunya selalu ada, yang jelasnya hal ini menjadi arah untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk kebaikan pertanian di Sidenreng Rappang terutama untuk meningkatkan produktivitas pertanian”. (IB, 13 Juni 2023)

Kegiatan *training* atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dipertegas oleh Kepala Bidang Penyuluhan yang menyatakan bahwa :

“Ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti yang baru-baru kami laksanakan di 3 kecamatan yakni Kecamatan Panca Rijang, Baranti, dan Kulo dalam bentuk kegiatan tematik temu usaha tani dan pelatihan terkait Gerakan Pengendalian (Gerdal) dan penanggulangan hama penyakit pertanian (gerdal). Dilaksanakan selama 3 hari dan masing-masing perwakilan kecamatan di hadiri 25

orang. Ada juga di Desa Bulu P4S Bukit Melintang. Pemateri kegiatan ini yaitu dari Kelompok Batang Kaluku, dan masing-masing penyuluh di tingkat kecamatan". (AN, Juni 2023)

Dari hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digarisbawahi pentingnya pelaksanaan training dan pelatihan dalam konteks peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ini mencerminkan kesadaran akan perlunya peningkatan kapasitas dan keterampilan petani serta pemangku kepentingan terkait dalam sektor pertanian. Pelatihan dan training menjadi instrumen untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam menjalankan pertanian yang lebih efisien.

Peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan sangat penting. Dinas ini bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau program pelatihan serta kebijakan pertanian lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara dinas ini dengan petani dan pemangku kepentingan pertanian lainnya akan menjadi kunci untuk keberhasilan program pelatihan yang dilaksanakan.

Pernyataan dari narasumber juga menunjukkan bahwa program pelatihan tersebut tidak hanya sekadar "cara baru" untuk berkegiatan, melainkan merupakan strategi untuk mengawal implementasi kebijakan pertanian yang berfokus pada kesejahteraan petani. Pemerintah daerah melihat pelatihan sebagai alat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas.

Peran penyuluh pertanian dalam kegiatan pelatihan juga sangat penting, sejatinya tugas seorang penyuluh pertanian atau yang lebih sering disebut dengan PPL adalah memberikan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama (petani) dan pelaku usaha beserta keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPL mendampingi petani yang tergabung dalam kelompok tani. Hal ini berdasarkan aturan yang tertuang dalam Permentan No 35 Tahun 2009 dan Permenpan No 13 Tahun 2019. PPL memberikan pendampingan mulai dari merencanakan budidaya seperti penyusunan RDKK, *entry simluhtan* dan menghitung e-alokasi pupuk bersubsidi, bahkan pelaksanaan penyuluhan sampai evaluasi kegiatan.

Menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :

“Terkait dengan tupoksinya, tugas pokok selaku penyuluh tentu saja ada, termasuk memberikan pemahaman untuk mengubah pola pikir kelompok tani untuk mengikuti teknologi terkait pertanian. Salah satu contoh yang kami lakukan adalah dengan adanya permasalahan kekurangan pupuk bersubsidi kami bersama penyuluh memberikan alternatif atau jalan keluar untuk disampaikan kepada petani untuk penggunaan pupuk organik”. (MGT, 17 Juni 2023)

Pernyataan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura menyoroti peran penting penyuluh pertanian dalam mendukung petani. Penyuluh pertanian berfungsi sebagai perantara yang membantu petani untuk mengubah pola pikir mereka dan memahami teknologi terkait pertanian. Penyuluh pertanian merupakan agen perubahan dalam mengedukasi dan

membimbing petani untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian. Salah satu contoh nyata dari peran penyuluh adalah penanganan kekurangan pupuk bersubsidi. Dalam situasi ini, penyuluh pertanian berkolaborasi dengan petani untuk memberikan alternatif atau solusi dengan mengenalkan konsep penggunaan pupuk organik. Ini adalah tindakan proaktif yang mencerminkan upaya penyuluh untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi petani, seperti ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas.

Untuk menguatkan penjelasan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan, Perekonomian, SDA & Pembangunan Manusia (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Sidenreng Rappang berkaitan dengan program-program pelatihan di sektor pertanian yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

“Pemberian pelatihan/ *training* kepada kelompok tani saya rasa selalu ada diberikan, peningkatan kapasitas penyuluh di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dan di tingkat pusat. Disetiap tahunnya ada undangan terkait pelatihan/training meskipun pesertanya itu terbatas. Tapi khusus di tingkat kabupaten selalu dilaksanakan di setiap tahunnya”. (ADL, 18 Juni 2023).

Pernyataan dari hasil wawancara diatas menunjukkan adanya kontinuitas dalam program pelatihan di sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas petani dan pemangku kepentingan terkait melalui pendidikan dan pelatihan. Meskipun program pelatihan dilaksanakan

setiap tahunnya, pernyataan ini juga mencatat bahwa jumlah peserta seringkali terbatas. Ini bisa menjadi tantangan dalam memastikan bahwa sebanyak mungkin petani dan pemangku kepentingan dapat mengikuti pelatihan yang bermanfaat. Upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi dan aksesibilitas mungkin diperlukan.

Pemberian *training* atau pelatihan ini juga didukung oleh pernyataan Ketua Kelompok Tani Mappadeceng yang menyatakan bahwa :

“Ya, saya pernah mengikuti program pelatihan/ training yang diberikan oleh pemerintah seperti pelatihan yang dilaksanakan di Rappang. Dalam pelatihan tersebut, kita diberikan edukasi tentang bagaimana petani supaya dapat mengelola hasil pertaniannya sendiri dengan konsep yang dikenal dengan istilah petik, olah, dan jual. Peningkatan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh petani sehingga memiliki nilai tambah dari hasil produksi pertaniannya”.(AYR, 29 Juni 2023)

Kelompok tani sebagai penerima manfaat membenarkan adanya pemberian pelatihan/*training* yang dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Mappadeceng mencerminkan partisipasi aktif petani dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan minat dan keterlibatan petani dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola pertanian. Konsep "Petik, Olah, Jual" yang diajarkan dalam pelatihan merupakan pendekatan yang penting dalam pengelolaan hasil pertanian. Petani tidak hanya belajar bagaimana menghasilkan panen yang baik (petik), tetapi juga bagaimana mengolah hasil pertanian mereka dan menjualnya dengan cara yang menguntungkan. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi pertanian.

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani. Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, seperti teknik pertanian yang lebih baik, manajemen usaha pertanian, dan pemahaman pasar. Peningkatan kapasitas ini memungkinkan petani untuk menghadapi tantangan pertanian dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas mereka. Program pelatihan yang mengarah pada peningkatan kapasitas petani dan pengelolaan pertanian yang lebih baik sejalan dengan visi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sektor agrobisnis yang maju serta berusaha untuk memberikan dukungan konkret kepada petani untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

- **Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah pada level organisasi diintervensi melalui 3 (tiga) kegiatan yakni manajemen organisasi, budaya kerja organisasi, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Manajemen organisasi diintervensi melalui sub kegiatan : Sinkronisasi program pemerintah daerah dengan target pencapaian visi misi dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, SOP terkait tugas dan fungsi struktur organisasi pertanian, serta pengawasan pengelolaan anggaran pada sektor pertanian. Memahami pentingnya perencanaan yang baik, penggunaan data dan analisis, sinkronisasi program, evaluasi anggaran secara berkala untuk memastikan bahwa

sumber daya dialokasikan dengan bijaksana sesuai skala prioritas dan respons terhadap isu-isu strategis dalam manajemen organisasi merupakan bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan manajemen organisasi pada sektor pertanian.

Budaya kerja organisasi diintervensi melalui sub kegiatan : Sosialisasi budaya kerja organisasi, Tingkat pemahaman SDM pertanian terkait budaya kerja organisasi yang telah ditetapkan, Peran pimpinan dalam menerapkan budaya kerja organisasi, serta Evaluasi secara berkala terkait kinerja organisasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Mengukur kinerja organisasi melalui berbagai indikator yang relevan dengan visi pembangunan daerah menjadi bukti dari pendekatan berbasis bukti dalam mengukur kinerja organisasi. Evaluasi kinerja organisasi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya didasarkan pada pengukuran internal, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan berbagai stackholder eksternal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diintervensi melalui sub kegiatan : *Training/* Pelatihan secara berkelanjutan kepada SDM pertanian, peran SDM pertanian dalam memberikan edukasi pertanian, serta penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan manfaat bagi petani, seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian.

3. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada level sistem dalam peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang diukur melalui pencapaian visi misi dan penguatan program kerja pemerintah daerah, perbaikan kebijakan pada sektor pertanian, serta sistem tata kelola pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengembangan kapasitas pada level sistem menyangkut juga kemampuan untuk melembagakan keseluruhan kapasitas individu dan organisasional sebagai sebuah prosedur, mekanisme, dan standar baku dalam kerja pemerintah daerah. Kepastian hukum dan kejelasan regulasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan visi dan misinya. Daerah yang memiliki regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten dan adil membuat birokrasi dapat bekerja dengan baik untuk mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.

Pengembangan kapasitas pada level sistem menjadi hal sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi mencapai visi dan misinya. Ketersediaan dokumen proses operasional menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari, sekaligus menjadi panduan dalam memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

1) Visi Misi dan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagian besar terkadang belum terumuskan secara tegas dan jelas. Visi dan Misi masih disalahartikan sebagai motto atau slogan pembangunan seperti tertulis di spanduk-spanduk pemerintah atau di atap-atap genting penduduk, dan walaupun tidak, masih berhenti dalam tataran filosofis saja. Padahal Visi pada dasarnya merupakan mental model masa depan, cara pandang ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Demikian pula Visi juga tidak boleh terlalu abstrak, tetapi benar-benar bisa dibayangkan bentuknya (*imaginable*), bisa dijangkau dan terukur (*tangible*) dan lebih penting benar-benar diinginkan (*desirable*). Untuk mewujudkan Visi tersebut, pemerintah daerah harus punya Misi yang jelas pula. Pernyataan Misi membawa organisasi pada sebuah fokus, Misi menjelaskan bagaimana melakukan Visi suatu organisasi (LAN, 2000:1). Ibarat jalan, Misi merupakan jalur yang harus dilalui agar tujuan dan sasaran organisasi dapat dilaksanakan, misalnya mempertimbangkan apa (*what*) yang akan dilakukan dan kapan (*when*) dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2023 maka ditetapkan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemerintahan Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si yakni Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai **Daerah Agribisnis yang Maju** dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan

Sejahtera”. Dengan Misi : 1). Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja) dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka peningkatan indeks kualitas hidup (kesejahteraan) masyarakat. **2). Memajukan usaha agrobisnis, UMKM, dan pengembangan industri pengolahan hasil usaha pertanian dengan penerapan konsep petik, olah, kemas, dan jual.** 3). Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama (*net working*) dalam rangka peningkatan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah. 4). Mengembangkan dan meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, pasar dan telekomunikasi) untuk memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. 5). Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep *good governance* dan *electronic governance* (gg+e gov). 6). Optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penerapan konsep desa cerdas (*smart village*) sehat, mandiri, serta pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 7). Mewujudkan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama yang religius, serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang, aman, kondusif dan harmonis.

Hasil observasi yang dilakukan dengan melihat fakta lapangan dan berbagai data terkait peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Hal tersebut

ditunjukkan pada turunnya tingkat produktiftas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tingkat produksi pertanian, khususnya pada tanaman padi sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika di kalkulasi, angka penurunan tingkat produksi padi dari tahun 2017 ke tahun 2020, dari jumlah produksi 665.287 Ton GKG turun menjadi 443.799 Ton GKG, berarti sekitar 221.488 Ton GKG yang gagal produksi. Jika harga Gabah Kering Giling (GKG) per kilogram sebesar Rp. 5.000, maka dapat di kalkulasi sebesar Rp. 1.107.440.000.000 uang yang gagal beredar di masyarakat terutama kalangan petani. Hal itu disebabkan karena menurunnya tingkat produktivitas pertanian pada tanaman padi.

Perkembangan produksi padi sawah daerah Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini :

Tabel. 4.16
Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Sidrap
tahun 2016 – 2022

No	Tahun	Produksi (Ton GKG)
1.	2016	587.983
2.	2017	665.287
3.	2018	536.050
4.	2019	515.012
5.	2020	443.799
6.	2021	480.002
7.	2022	535.316

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Data diatas menunjukkan terjadinya fenomena tingkat produktivitas pertanian yang turun secara signifikan selama 3 tahun terakhir, mulai tahun 2018 sampai tahun 2020, nanti pada tahun 2021 dan 2022 mulai kembali ada peningkatan. Sementara, salah satu visi misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang periode 2018 – 2023, Bapak Ir. H. Dollah Mando dan Bapak Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si yakni Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai **Daerah Agribisnis yang Maju**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Sidenreng Rappang mengatakan :

“Pemerintah Daerah tentu akan selalu memprioritaskan terkait kemajuan sektor pertanian. Selama ini saya selalu perintahkan ke Dinas terkait, terutama Dinas Pertanian untuk menjadikan pertanian sebagai skala prioritas. Apalagi Sidrap ini sebagai daerah pertanian, masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani. Pada dasarnya soal pertanian menjadi visi utama dalam pemerintahan yang saya pimpin” (DM, 03 Juni 2023).

Penjabaran Visi Misi Kabupaten Sidenreng Rappang juga dipertegas oleh Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, mengatakan bahwa :

“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 telah tertuang terkait Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai Agrobisnis yang Maju, bahkan secara spesifik di dalam misi point ke 2 telah di uraikan mengenai memajukan usaha agrobisnis, UMKM, dan pengembangan industri pengolahan hasil usaha pertanian dengan penerapan konsep petik, olah, kemas, dan jual ” (HRW, 14 Juni 2023).

Informasi terkait komitmen pencapaian visi Agrobisnis yang Maju juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa :

“Sebagai instansi yang berkaitan langsung dalam hal peningkatan dan kemajuan sektor pertanian, kami telah membuat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan Renstra ini tentunya akan menjadi pedoman dan acuan dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dalam menentukan langkah kebijakan untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dalam RPJMD tahun 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang” (IB, 13 Juni 2023).

Visi merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Penetapan visi tidak dilakukan secara kebetulan, akan tetapi memerlukan kajian dan pembahasan yang mendalam, terukur, spesifik, dan tentunya mencerminkan impian daerah akan arah pembangunan yang dicita-citakan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perspektif otonomi daerah sesungguhnya sebagai legitimasi dan amanah masyarakat melalui UU otonomi daerah, tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik.

Pemerintah Daerah yang mampu memandang jauh ke depan disebut pemerintahan visioner (*visionary governance*), pemerintahan yang memiliki visi. (Ndraha dalam Labolo,dkk, 2008:271). Dengan demikian, membangun pemerintahan yang visioner adalah membangun pemerintahan yang mampu memandang jauh kedepan, dengan segala kekuatan, kelemahan yang dimiliki dan segala peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam peningkatan di sektor pertanian.

Berdasarkan penjelasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa pemerintah daerah tetap berfokus pada peningkatan sektor pertanian, hal tersebut menunjukkan peran pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dalam upaya mendukung produktivitas pertanian yang menjadi komitmen bersama dan dituangkan dalam visi misi pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 dan ditindaklanjuti secara program dan Rencana Strategis (RENSTRA) oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah Daerah diwakili oleh beberapa narasumber dalam wawancara ini menegaskan bahwa sektor pertanian mendapatkan perhatian utama. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pertanian dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengutamakan sektor pertanian, diharapkan bahwa daerah dapat memanfaatkan potensi pertanian secara optimal. Pemerintah Daerah telah menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk fokus pada pengembangan pertanian sebagai skala prioritas menunjukkan upaya konkret dalam mewujudkan komitmen pemerintah terhadap sektor pertanian. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan akan memainkan peran sentral

dalam mengimplementasikan program-program yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan pertanian.

RPJMD yang berlaku selama tahun 2018-2023 memiliki visi yang jelas terkait dengan Agrobisnis yang Maju mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor agrobisnis di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pandangan jangka panjang terhadap pengembangan pertanian, yang melibatkan lebih dari sekadar produksi pertanian biasa. Agrobisnis mencakup rantai nilai tambahan seperti pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian, yang dapat menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi. Melalui penekanan pada produktivitas pertanian dan visi agrobisnis yang maju, pemerintah daerah berupaya mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk peningkatan pendapatan petani, diversifikasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja. Pernyataan narasumber bahwa pertanian merupakan visi utama dalam pemerintahan yang dipimpinnya menggambarkan konsistensi dan kontinuitas dalam kebijakan.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menekankan bahwa Renstra yang telah dibuat akan menjadi pedoman yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang yang tercantum dalam RPJMD tahun 2018-2023 menunjukkan pentingnya keterkaitan antara rencana strategis dengan arah dan tujuan lebih besar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Renstra yang telah disusun oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dokumen yang memiliki nilai strategis dalam mengarahkan langkah-langkah untuk pengembangan sektor pertanian. Renstra ini mencerminkan upaya pemerintah daerah menghadirkan perubahan positif dalam sektor pertanian.

Dalam pencapaian visi misi pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan. Kebijakan otonomi daerah melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan adanya asas desentralisasi menjadi pintu bagi pemerintah daerah untuk melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Hal itu penting untuk dilakukan agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat.

Penjelasan Bupati Sidenreng Rappang terkait keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan di sektor pertanian bahwa :

“Selama ini kami memfasilitasi agenda tahunan yang namanya “Musyawarah Tudang Sipulung (MTS)”, dalam kegiatan tersebut kami membahas secara bersama-sama terkait masalah pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dan bagaimana rencana tindaklanjut dari masalah tersebut. Secara spesifik masalah pertanian yang sering kami bahas diantaranya masalah OPT, bencana alam, distribusi pupuk, serta penggunaan benih oleh petani. Dan pada kesempatan itu, kami juga akan menerima masukan dan usulan dari para petani. Adapun yang terlibat dalam kegiatan MPS itu, diantaranya pemerintah provinsi, pihak Balai Pompa Jeneberang, Forkopimda Sidrap, OPD Sidrap, Camat, Lurah, Kepala Desa, Organisasi Profesi Petani seperti KTNA, pihak swasta yang berkaitan dengan pertanian serta kami juga melibatkan penyuluh pertanian dan kelompok tani” (DM, 03 Juni 2023).

Tudang Sipulung sebagai salah satu forum media komunikasi tradisional dimana sistem perencanaannya bersifat *bottom up* (perencanaan dari bawah ke atas). Seperti tertuang dalam SK Bupati Nomor: 47/III/1988, disebutkan bahwa Tudang Sipulung dan perencanaan pembangunan pertanian dilakukan secara terpadu (*bottom up*). Data lapangan (informan) menunjukkan bahwa, model penyusunan perencanaan dari bawah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap melalui tudang sipulung sangat besar artinya dalam proses pembangunan khususnya pembangunan di bidang pertanian. Dimana masyarakat secara langsung dapat mengetahui tujuan yang akan dicapai baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki program dan harus didukung dan disukseskan. Apalagi pelaksanaan tudang sipulung dilakukan melalui tiga tingkatan, yakni: pertama dilakukan di tingkat desa/kelurahan, kedua dilakukan pada tingkat kecamatan dan ketiga dilakukan pada tingkat kabupaten.

Musyawarah Tudang Sipulung (MTS) sebagai sarana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dialog dan diskusi tahunan terkait masalah pertanian. Ini adalah tindakan yang sangat positif, karena menggambarkan komitmen pemerintah dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pertanian. Pernyataan dari narasumber mencantumkan masalah-masalah utama yang sering dibahas pada kegiatan MTS, seperti masalah Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), bencana alam, distribusi pupuk, dan penggunaan benih oleh petani. Fokus pada masalah-masalah ini

mencerminkan pemahaman yang baik tentang tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian.

MTS melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, Balai Pempengasn Jeneberang, Forkopimda Sidrap, OPD Sidrap, Camat, Lurah, Kepala Desa, Organisasi Profesi Petani (seperti KTNA), pihak swasta terkait pertanian, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Partisipasi berbagai pihak ini menciptakan platform yang inklusif untuk merumuskan solusi dan rencana tindaklanjut. Melalui MPS dan penelitian yang dilakukan, pemerintah daerah menunjukkan kesinambungan dalam upaya pembangunan pertanian guna untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan tidak bersifat *ad hoc*, tetapi sesuai dengan visi jangka panjang.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu Organisasi Profesi Petani, Pengurus Kontak Nelayan Tani Andalan (KTNA) Kab. Sidrap mengatakan bahwa :

“Betul bahwa setiap tahun pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan Musyawarah Tudang Sipulung (MTS), tahun ini dilaksanakan pada bulan februari kemarin bertempat di Aula Kompleks SKPD Sidrap. Banyak hal yang dibahas dalam musyawarah tersebut, seperti jadwal musim tanam, hama dan penyakit yang perlu diwaspadai dan sebagainya. Perwakilan dari masing-masing kelompok tani dari desa/kelurahan juga terlibat langsung dalam kegiatan itu”. (AS, 25 Juni 2023).

Adapun rekomendasi Musyawarah Tudang Sipulung (MTS) tahun 2023 di tingkat Kabupaten Sidrap diantaranya :

1. Menjaga ketersediaan dan pendistribusian pupuk di tingkat petani.
2. Menggunakan timbangan yang telah ditera ulang oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat terkait harga dasar gabah kering panen.
4. Peningkatan peran BUMD dan BUMDes dalam mendukung peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian.
5. Peningkatan peran KTNA sebagai mitra pemerintah dalam penguatan kelembagaan petani.
6. Membangun kemitraan antara petani dengan PERPADI.
7. Tidak menggunakan alat tangkap terlarang untuk menangkap ikan.
8. Diharapkan petani disiplin waktu tanam dan penggunaan varietas yang disepakati serta melakukan tanam serempak dalam hamparan yang luas.
9. Untuk menghindari serangan eksplosif atau peledakan serangan OPT utama pada padi diharapkan petani tidak menanam varietas pemicu antara lain CL 220, Toyoarum dan Birma serta jenis padi galur lainnya.
10. Dianjurkan menggunakan varietas padi yang berlabel dan bersertifikat berdasarkan rekomendasi Musyawarah Tudang Sipulung.
11. Bagi petani yang menanam varietas yang tidak dianjurkan atau padi galur seperti CI 220, Birma, Toyoarum, Brahma 01, IF 8, IF 20, Jamon, Jafonica kasi Ikari, Padi Mas, MR 219, MR 308, Kalina, Kabir 7, Siam-Siam dan Tongkol 2 diharapkan melaporkan kepada petugas teknis pertanian di lapangan untuk dilakukan pengawalan bersama.
12. Melaksanakan gerakan pengendalian OPT tikus pratanam secara serentak, massal dan kontinu di setiap kecamatan sesuai surat edaran bupati.

13. Sebelum turun sawah dilakukan gerakan pembersihan saluran irigasi tersier dengan semangat budaya gotong royong (massepe).
14. Petani dianjurkan menggunakan jarak tanam dengan sistem legowo.
15. Pengembangan hortikultura dan perkebunan pada daerah yang sesuai agroklimat.
16. Gerakan pencapaian populasi ternak sapi potong melalui program Sikomandan (Sapi, Kerbau Komoditas Andalan Negeri) tahun 2023.
17. Penggunaan pupuk non subsidi jika terjadi kekurangan pupuk bersubsidi.
18. Pengembangan padi ramah lingkungan dan padi organik pada daerah yang sesuai.
19. Menggunakan pestisida sesuai kaidah prinsip PHT.
20. Membentuk tim pemantau hasil pelaksanaan MTS.
21. Pelaksanaan MTS tingkat desa/kelurahan tiap musim tanam.
22. Menyampaikan hasil rumusan musyawarah tudang sipulung tingkat kabupaten kepada para petani.



Gambar 4.9 : Dokumentasi Kegiatan Tudang Sipulung Kab. Sidrap Tahun 2023

Berdasarkan penjelasan dari salah satu Organisasi Profesi Petani, Pengurus Kontak Nelayan Tani Andalan (KTNA) Kab. Sidrap menyebutkan

beberapa isu yang dibahas dalam MPS, termasuk jadwal musim tanam dan masalah hama serta penyakit. Ini menunjukkan fokus pada perencanaan dan pengendalian risiko dalam pertanian. Pernyataan dari narasumber mencatat bahwa MTS juga menerima masukan dan usulan dari para petani. Ini adalah langkah yang sangat penting, karena memberi suara kepada para pemangku kepentingan utama dalam sektor pertanian, yaitu petani. Keterlibatan petani dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan keefektifan dan relevansi kebijakan pertanian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang berfokus pada kapasitas adaptif, karena pengendalian risiko adalah bagian integral dari adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, keterlibatan langsung perwakilan dari kelompok tani dari desa/kelurahan dalam kegiatan MPS merupakan praktik yang sangat positif. Ini memberikan suara langsung kepada petani, yang merupakan pemangku kepentingan utama dalam sektor pertanian. Mereka dapat menyampaikan pengalaman mereka, kebutuhan mereka, dan masukan yang berharga dalam pengambilan keputusan pertanian.

Untuk mendalami informasi terkait keterlibatan petani dalam kegiatan Musyawarah Tudang Sipulung (MTS), peneliti kemudian mewawancarai Ketua Kelompok Tani Tuju Wali-Wali 1 Desa Damai Kec. Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :

“Kami terlibat dalam kegiatan Tudang Sipulung, tapi hanya sampai di tingkat kecamatan. Kalau di tingkat kabupaten, kami sudah tidak terlibat. Hanya Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tingkat desa yang ikuti acara itu. Tapi beberapa aspirasi petani dari kelompok kami, sudah diusulkan lewat Musyawarah Tudang Sipulung tingkat desa dan kecamatan” (AAR, 01 Juli 2023).

Hasil wawancara diatas mengindikasikan bahwa partisipasi kelompok tani dalam Tudang Sipulung terbatas pada tingkat kecamatan. Hal ini bisa menjadi masalah jika ada isu atau masalah pertanian yang perlu dibahas atau disampaikan ke tingkat kabupaten. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tingkat desa menjadi perwakilan utama dalam kegiatan MTS tersebut. Meskipun ada upaya untuk menyampaikan aspirasi sampai ke tingkat kabupaten oleh Ketua Gapoktan tingkat desa, namun hal ini sebenarnya mencerminkan keterbatasan akses kelompok tani ke keputusan yang diambil di tingkat kabupaten. Ini dapat memiliki implikasi terhadap kemampuan petani untuk memengaruhi kebijakan dan program yang berdampak pada pertanian mereka. Kendati partisipasi kelompok tani di tingkat kabupaten terbatas, tetapi seharusnya pemerintah daerah memberikan peluang untuk memperbaiki komunikasi dan kerjasama antara tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Mungkin ada ruang untuk memperkuat peran dan partisipasi kelompok tani di tingkat kabupaten agar aspirasi mereka lebih efektif disampaikan dan direspons.

Dengan pertanyaan yang sama, peneliti juga mewawancarai Kelompok Tani dari kecamatan yang berbeda yaitu Ketua Kelompok Tani Mamminasae Desa Sereang, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap yang mengatakan bahwa :

“Saya ikut Tudang Sipulung waktu dilaksanakan di kantor Desa, Cuma biasanya apa yang menjadi usulan kami dari kelompok tani tidak ditindaklanjuti. Seperti perbaikan jalan tani yang kami usulkan. Persoalan pupuk untuk petani juga seringkali tidak terpenuhi padahal petani sudah butuhkan” (HTR, 04 Juli 2023).

Peran pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dapat dilihat dari berbagai aspek termasuk kebijakan

di sektor pertanian. Menurut Ndraha, peran dan fungsi pemerintahan diringkus menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Mamminasae Desa Sereang, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap mencerminkan perasaan anggota kelompok tani terkait dengan kurangnya respons dari pemerintah daerah terhadap usulan yang diajukan. Ini mencerminkan kurangnya efektivitas dalam memfasilitasi dan mengimplementasikan aspirasi petani. Usulan perbaikan jalan tani yang tidak ditindaklanjuti adalah contoh nyata tentang bagaimana infrastruktur pertanian yang baik dapat meningkatkan produktivitas. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperhatikan infrastruktur yang mendukung pertanian untuk mencapai visi agrobisnis yang maju. Masalah persediaan pupuk yang tidak terpenuhi, juga menjadi masalah serius yang dapat memengaruhi produktivitas petani. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk adalah faktor penting dalam mencapai tujuan peningkatan produktivitas pertanian. Meskipun pernyataan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan visi agrobisnis yang maju, isu-isu yang dibahas, seperti perbaikan infrastruktur dan persediaan pupuk, memiliki relevansi langsung dengan mencapai visi tersebut. Untuk

mewujudkan agrobisnis yang maju, penting bagi pemerintah daerah untuk merespons usulan dan kebutuhan petani dengan baik.

Peneliti kemudian menanyakan bentuk keterlibatan petani dalam perumusan kebijakan selain dalam bentuk Musyawarah Tudang Sipulung yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Mamminasae 4 Desa Timoreng Panua, Kec. Panca Rijang, Kab, Sidrap mengatakan bahwa :

“Kalau keterlibatan petani selain acara Tudang Sipulung untuk menyampaikan aspirasi, kami biasa juga sampaikan di acara Musyawarah Desa kepada Kepala Desa dan BPD. Biasa juga kami sampaikan kepada Anggota DPRD yang ada di Dapil kami lewat acara *reses*” (GWN, 08 Juli 2023).

Dalam wawancara diatas menunjukkan bahwa selain melalui kegiatan yang difasilitasi pemerintah daerah seperti Musyawarah Tudang Sipulung, masyarakat khususnya petani juga menyalurkan aspirasi melalui pemerintah desa dan anggota DPRD. Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah termasuk didalamnya pemerintah desa dan DPRD. Petani telah mengidentifikasi berbagai kanal komunikasi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ini mencakup acara Tudang Sipulung, Musyawarah Desa serta acara *reses* Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) mereka. Ini menunjukkan usaha aktif petani untuk menjalin komunikasi dengan berbagai

pihak yang dapat memengaruhi kebijakan pertanian. Artinya, masyarakat petani memiliki alternatif yang lain untuk dilibatkan dalam perumusan kebijakan dalam rangka menjawab kebutuhan mereka. Penyampaian aspirasi kepada pihak-pihak yang terkait, terutama Kepala Desa, BPD, dan Anggota DPRD, mencerminkan bahwa petani fokus pada isu-isu pertanian yang memengaruhi produktivitas mereka. Mencakup masalah seperti infrastruktur pertanian, persediaan pupuk, perizinan, atau perbaikan berbagai aspek dalam pertanian.

Pendapat berbeda justru disampaikan oleh pimpinan Komisi II DPRD Kab. Sidrap yang notabene sebagai mitra kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang berkaitan dengan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

“Perhatian pemerintah daerah selama ini terkait peningkatan produktivitas pertanian tidak terlalu menunjukkan keseriusannya. Banyak aspirasi petani, namun tidak di *follow up*. Seperti halnya, aspirasi petani soal kekurangan pupuk, jalan tani yang mau diperbaiki, rendahnya harga gabah dan lainnya. Selain itu, dari sisi dukungan anggaran juga sangat terbatas bahkan tergolong rendah. Ada bantuan selama ini untuk petani, tapi itu dari anggaran pemerintah pusat atau APBN melalui DAK dan aspirasi anggota DPR RI”. (B-PAS, 12 Agustus 2023).

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah pembangunan di sektor pertanian. Untuk itu peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sangat vital untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi.

Pernyataan dari H. Bahrul Appas selaku pimpinan Komisi II DPRD Sidrap mencerminkan keprihatinan atas kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah produktivitas pertanian. Ini adalah indikasi yang kuat bahwa peran pemerintah daerah dalam mendukung petani belum optimal. Kritik ini menunjukkan perlunya peningkatan komitmen dan responsivitas pemerintah daerah terhadap isu-isu pertanian. Pemerintah daerah dinilai kurang mengikuti dan mengambil tindakan yang tepat terhadap aspirasi petani. Isu-isu seperti kekurangan pupuk, kondisi jalan tani yang buruk, dan harga gabah yang rendah merupakan masalah penting bagi petani yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi konkret. Kurangnya tindak lanjut bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar di kalangan petani dan berpotensi menghambat perkembangan sektor pertanian. Selain itu, pentingnya keselarasan antara visi pemerintah daerah yang berfokus pada mewujudkan Agrobisnis yang maju, dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai visi ini, perlu adanya upaya konkret dan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah, termasuk peningkatan alokasi anggaran dan pemantauan yang lebih aktif terhadap masalah pertanian.

Dalam wawancara tersebut, narasumber juga menggarisbawahi terkait ketergantungan pemerintah daerah pada dana dari pemerintah pusat, seperti APBN dan DAK untuk mendukung pertanian. Hal ini menunjukkan perluasan sumber pendanaan yang lebih beragam dalam mendukung sektor pertanian di tingkat lokal. Pemerintah daerah seharusnya berusaha untuk menciptakan pendapatan lokal yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian. Dalam

konteks aspirasi anggota DPR RI yang turut berperan dalam memberikan bantuan kepada petani, ada potensi untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI untuk mengalokasikan sumber daya dan program yang lebih baik bagi pertanian. Kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah dan legislator dapat menghasilkan kebijakan dan anggaran yang lebih efektif untuk sektor pertanian.

2) Perbaikan Kebijakan pada Sektor Pertanian

Konsep kebijakan pertanian yakni serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Tujuan umum dari kebijakan pertanian adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efesiensi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat.

Kebijakan produksi menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pertanian. Kebijakan produksi pertanian yang dimaksud peneliti yaitu produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena luas wilayah pertanian didominasi oleh pertanian padi serta masalah yang dihadapi. Oleh Karena itu, kebijakan peningkatan produksi pertanian padi harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian. Pemerintah daerah sebagai sektor publik memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi pertanian padi.

Peran pemerintah daerah dan DPRD sebagai regulator (kebijakan), dimana pemerintah dapat menyiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Berkaitan dengan peran tersebut, pemerintah daerah dan DPRD telah membuat kebijakan dalam hal pemberdayaan petani, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok tani, peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani, peran pemerintah dalam membantu mengatasi masalah petani, peran pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pertanian telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Hasil temuan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait implementasi kebijakan dari Perda tersebut tidak berjalan sesuai dengan fakta lapangan. Masih banyaknya keluhan dari petani, menjadi indikasi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat petani. Sejatinya pemerintah daerah memaksimalkan potensi daerah di sektor pertanian sebagai pendapatan utama masyarakat, namun itu justru tidak terjadi.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu organisasi profesi petani, Anwar yang merupakan Sekretaris DPC Pemuda Tani HKTI Kabupaten Sidrap. Dalam wawancara tersebut, anwar mengakui jika selama ini pemerintah daerah kurang memperhatikan tingkat kesejahteraan petani.

“Sudah beberapa panen terakhir ini, petani mengalami gagal panen di beberapa lokasi. Biasanya dalam 1 hektar kita bisa dapat 7 ton, sekarang hanya 4 sampai 5 ton. Ditambah lagi pupuk yang langka saat dibutuhkan oleh petani, harga obat-obat pertanian naik sampai 100 persen, harga gabah yang tidak menentu, bahkan kami sebagai petani

biasanya mengalami kerugian dalam setiap kali panen. Sudah beberapa kali kami suarakan kepada pemerintah daerah, bahkan kami juga sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD untuk membahas terkait nasib petani, khususnya bagaimana peran pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Sidrap”. (ANW, 24 Juni 2023).



Gambar 4.10 : Kegiatan RDP DPC Pemuda Tani HKTI dengan DPRD Kab. Sidrap

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dikemukakan bahwa masyarakat petani belum merasakan kehadiran pemerintah secara totalitas dalam menjawab kebutuhan petani dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hasil produktivitas pertanian mengalami penurunan yang signifikan, dan kebutuhan dasar petani mengalami permasalahan yang menyebabkan petani mengalami kerugian. Pernyataan Anwar mencerminkan kesulitan yang dihadapi petani dalam beberapa panen terakhir. Penurunan produktivitas yang signifikan, dari 7 ton per hektar menjadi 4-5 ton, adalah masalah serius yang perlu segera ditangani. Gagal panen merupakan kerugian finansial bagi petani dan dapat berdampak pada kesejahteraan mereka.

Upaya para petani untuk mengkomunikasikan permasalahan tersebut telah dilakukan, seperti halnya menyampaikan secara langsung kepada

dinas terkait dan melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD, hal ini menunjukkan upaya aktif dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan petani di tingkat lokal. Namun upaya itu ternyata belum mampu memaksimalkan peran pemerintah untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh petani.

Dalam wawancara tersebut juga memunculkan ketidaksesuaian antara pengalaman petani dan visi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Agrobisnis yang maju. Ketidakcocokan ini menyoroti perluasan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengimplementasikan visinya. Sehingga pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas yang lebih baik dalam merespons perubahan kondisi pertanian dan permasalahan yang dihadapi petani.

Kebijakan pertanian diatur oleh institusi pemerintahan dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat petani dan secara umum di wilayah tersebut. Petani sebagai sekelompok masyarakat juga memiliki kepentingan untuk memajukan usahatani demi peningkatan kesejahteraan. Kebijakan tersebut dapat diturunkan melalui program-program atau kebijakan dalam mendukung sektor pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :

“Kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di Kab. Sidrap sudah ada. Tetap mengacu pada Visi pemerintah daerah dalam RPJMD yaitu Mewujudkan Sidrap sebagai Agrobisnis yang Maju.

Dalam bentuk peraturan daerah, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dan implementasi Peraturan Perlindungan Lahan Berkelanjutan tersebut, harapan pemerintah agar terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Keberadaan lahan baku sawah di Sidenreng Rappang rata-rata secara teknis berada pada sektor kota. Sekarang banyak yang beralih fungsi menjadi lahan perumahan karena memang adaptasinya. Tapi alhamdulillah dengan adanya perubahan-perubahan dan kebijakan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bersama OPD yang lainnya yang sejalan dengan kami khususnya pada pembangunan sektor pertanian, justru akan memunculkan urbanisasi. Artinya membuka lapangan kerja pertanian di tingkat desa sehingga diharapkan bisa berdampak positif peningkatan kesejahteraan petani” (RR, 19 Juni 2023).

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dijelaskan bahwa Kabupaten Sidrap telah memiliki kebijakan yang mengarah pada peningkatan produktivitas pertanian. Kebijakan ini sesuai dengan visi pemerintah daerah yang ingin menjadikan Sidrap sebagai Agrobisnis yang Maju. Pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diakui dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015. Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lahan pertanian sebagai sumber daya penting untuk ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas pertanian. Meskipun tantangan yang dihadapi karena banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan perumahan karena adaptasi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, dengan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah bekerja bersama dengan OPD lainnya secara terintegrasi pada sektor diharapkan bisa berdampak

pada peningkatan produktivitas pertanian. Dalam keseluruhan, wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian sesuai dengan visi dan kebijakan yang telah ada. Tantangan seperti perubahan fungsi lahan juga dianggap sebagai peluang untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kerjasama antara tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, bersama dengan OPD lainnya, menunjukkan pendekatan lintas sektoral yang penting untuk mendukung pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa luas tanam panen tanaman padi di Kabupaten Sidenreng Rappang secara signifikan berkurang, ditahun 2017 paling tertinggi seluas 106.328 Ha, sementara pada tahun 2020 luas lahan panen tanaman padi tersisa 88.296 Ha, dan pada tahun 2022 seluas 90.653 Ha. Hal ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan produktif pertanian menjadi non pertanian seperti bangunan pemukiman penduduk, fasilitas umum dan industri. Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani.

Tabel. 4.17
Luas Tanam Panen Tanaman Padi di Kabupaten Sidrap
tahun 2016-2022

No	Tahun	Hektar (Ha)
1.	2016	103.591
2.	2017	106.328
3.	2018	91.997
4.	2019	93.080
5.	2020	88.296
6.	2021	89.434
7.	2022	90.653

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tentang pengawasan alih fungsi lahan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :

“Dalam pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di kabupaten Sidrap selama ini kami mendata setiap tahunnya guna mengetahui kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) regional, agar pihak kami tidak merasa kecolongan terhadap sikap dari oknum yang tidak bertanggung jawab, apabila ada warga atau oknum yang melanggar aturan apa yang telah ditentukan maka kami memberikan sanksi sebagaimana yang telah di sepakati. Sekalipun kami menyadari bahwa pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan industri dan perumahan di Kabupaten Sidrap menjadi penyebab terjadinya alih fungsi lahan” (Wawancara, 19 Juni 2023).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Pemerintah daerah telah menetapkan aturan yang mengatur alih fungsi lahan, dan akan memberikan sanksi kepada warga atau oknum yang melanggar aturan tersebut. Hal ini

menunjukkan komitmen untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan dan menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan lahan. Namun adanya dinamika yang umum terjadi di banyak daerah, dimana pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi dapat berdampak pada penggunaan lahan pertanian. Faktor penyebab alih fungsi lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk, kebutuhan industri, dan perumahan.

3) Sistem Tata Kelola Pertanian

Tata kelola sistem pertanian adalah pendekatan yang berkaitan dengan cara pengelolaan, pengaturan, dan organisasi seluruh sistem pertanian dalam suatu wilayah atau negara. Tujuan utama dari tata kelola sistem pertanian adalah untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan, efisien, dan adil, yang dapat mendukung produksi pangan yang cukup, kualitas lingkungan yang baik, serta kesejahteraan petani dan masyarakat yang terlibat dalam pertanian. Pembuatan kebijakan dan peraturan oleh pemerintah merupakan bagian penting dari tata kelola sistem pertanian. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai hal, seperti subsidi pertanian, perlindungan lingkungan, atau standar keamanan pangan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengatur pertanian dengan baik.

Dalam tata kelola sistem pertanian, penting melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk petani, produsen, konsumen, peneliti, dan pemerintah. Partisipasi ini dapat membantu dalam pengambilan

keputusan yang lebih baik dan lebih adil. Selain itu, inovasi dan pengembangan teknologi pertanian juga menjadi elemen penting dalam tata kelola sistem pertanian. Mencakup pengenalan teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, ketahanan pertanian, pasar dan distribusi produk pertanian. Penting untuk diingat bahwa tata kelola sistem pertanian menjadi pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek kebijakan, praktik, dan partisipasi yang berkontribusi pada kelangsungan dan keberhasilan pertanian secara keseluruhan. Dengan tata kelola sistem pertanian yang baik, diharapkan pertanian dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang.

Berkaitan dengan Tata Kelola Sistem Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

“Kalau di daerah kita ini, secara umum petani telah menggunakan sistem tata kelola pertanian dengan teknologi modern. Seperti pada saat penggarapan sawah sudah menggunakan handtraktor roda dua dan roda empat, penyemprotan sudah menggunakan handsprayer bahkan beberapa wilayah sudah menggunakan drone pertanian, pada saat panen sudah menggunakan mesin panen padi combine. Bahkan sampai pasca panen, sudah banyak mesin penggilingan padi untuk di produksi jadi beras” (IB, 16 Juni 2023)

Pernyataan Kepala Dinas mengenai penggunaan teknologi modern dalam pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam sektor ini. Penggunaan handtraktor, handsprayer, drone pertanian, dan mesin-mesin modern lainnya adalah bukti bahwa petani di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memanfaatkan

teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan teknologi modern adalah langkah penting.

Penggunaan teknologi modern mencerminkan responsivitas terhadap perkembangan dalam sektor pertanian, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian. Tata kelola sistem pertanian yang adaptif dan responsif merupakan kunci untuk tetap bersaing dan memaksimalkan hasil pertanian. Kemampuan untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi pertanian modern juga mengindikasikan dukungan dari pemerintah daerah terhadap modernisasi pertanian. Pembaharuan organisasi yang berfokus pada integrasi teknologi dan peningkatan kapasitas petani dapat membantu mencapai visi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah agrobisnis yang maju.

Penggunaan teknologi modern dalam tata kelola sistem pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dibenarkan oleh Ketua Kelompok Tani Jatam, Desa Carawali, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap yang mengatakan bahwa :

“Selama kurang waktu beberapa tahun terakhir, hampir semua petani Sidrap sudah mengandalkan teknologi modern dalam mengelola pertaniannya. Ketersediaan teknologi tersebut pada dasarnya sangat membantu petani karena lebih efektif dan efisien” (AH, 23 Juni 2023)

Dari hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Jatam diketahui sejalan dengan pernyataan dari pihak pemerintah daerah jika rata-rata petani di Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengadopsi teknologi modern dalam pengelolaan pertanian mencakup penggunaan alat-alat pertanian modern. Penggunaan teknologi modern ini menjadi langkah yang positif dalam

meningkatkan produktivitas pertanian dan dapat membantu petani menghadapi tantangan yang semakin kompleks di bidang pertanian. Teknologi modern dalam pertanian juga dapat memberikan manfaat berupa efektivitas dan efisiensi. Penghematan waktu, tenaga, dan sumber daya yang dapat berdampak positif pada hasil pertanian.

Pengembangan tata kelola sistem pertanian sebenarnya masih menghadapi banyak masalah baik ditinjau dari jenis maupun kedalaman permasalahan. Pendekatan sistem pengembangan pangan, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan *off-farm*, baik pada tingkat hulu (sub-sistem pengadaan input faktor) maupun tingkat hilir (subsistem pengolahan dan pemasaran) tidak lebih sederhana dengan permasalahan yang dihadapi pada sub-sistem budidaya (*on-farm*). Demikian pula, permasalahan yang dijumpai dalam sub-sistem penunjangnya. Berbagai permasalahan yang dihadapi pada semua sistem agribisnis pertanian secara simultan berpengaruh pada kinerja industri pertanian. Pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melanjutkan revitalisasi pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Sarana dan prasarana pertanian seperti infrastruktur jalan tani, embung, waduk kami akui masih belum mampu menjangkau secara keseluruhan dari kebutuhan petani, itu karena anggaran daerah belum mampu memenuhi semua keinginan petani. Upaya kami untuk membuat proposal ke dinas pertanian ditingkat provinsi dan kementerian pertanian kami sudah usulkan agar petani ada bantuan sarana dan prasarana pertanian di Sidrap” (SRT, 18 Juni 2023)

Penjelasan dari Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang mengakui bahwa sarana dan prasarana pertanian, seperti infrastruktur jalan tani, embung, dan waduk, masih belum mampu mencukupi kebutuhan petani di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, yang tidak dapat memenuhi semua keinginan petani. Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Sidrap. Namun upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah telah mengambil langkah dengan mengusulkan proposal ke dinas pertanian tingkat provinsi dan kementerian pertanian. Langkah ini merupakan upaya untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pertanian yang lebih besar. Hal Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya dukungan dari pihak-pihak yang lebih tinggi dalam mengembangkan sektor pertanian.

Wawancara tersebut juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sarana dan prasarana pertanian yang memadai dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi pertaniannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi kebutuhan pangan lokal. Kendati terdapat kendala dalam pembiayaan sarana dan prasarana

pertanian, pernyataan dari narasumber juga mencerminkan langkah-langkah dalam mengembangkan kapasitas adaptif pemerintah daerah. Upaya untuk mencari dukungan dari pihak eksternal adalah salah satu bentuk pengembangan kapasitas yang positif dalam mendukung produktivitas pertanian.

Untuk mendalami informasi terkait sarana prasarana pertanian seperti infrastruktur jalan tani, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Bidang PPSPDAPM BAPPELITBANGDA Kab. Sidrap yang mengatakan bahwa :

“Sarana dan Prasarana pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang saya rasa sudah cukup optimal meskipun belum sempurna yang kita inginkan atau belum selengkap yang kita harapkan. Karena dalam beberapa tahun ini sudah banyak bantuan sarana dan prasarana pertanian yang telah diberikan baik itu kepada gapoktan, stekholder pertanian ataupun unsur-unsur pertanian yang lain mulai dari bantuan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat. Mengenai jalan tani dan irigasi, alhamdulillah beberapa tahun ini ada program IPDIMP yang merupakan program hibah di tingkat pusat terkait pertanian seperti pembangunan jalan tani, pembangunan irigasi, baik itu sifatnya fisik maupun non fisik. Untuk pembangunan sarana dan prasarana atau non fisik ada bantuan setiap tahunnya dianggarkan, baik melalui anggaran APBD Kab/Kota maupun di tingkat provinsi. Ada peningkatan perekonomian karena khusus untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan”(ADL, 23 Juni 2023)

Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

Dasar pemikiran kegiatan IPDMIP, ialah untuk secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Berdasarkan pengalaman pembangunan irigasi yang telah dilakukan selama ini, disadari bahwa terdapat faktor- faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani-penggarap di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain: (i) lemahnya kelembagaan petani, air dan irigasi; (ii) pemeliharaan prasarana sistem irigasi yang kurang; (iii) lemahnya penyuluhan pertanian; (iv) terbatasnya akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa; (v) kepemilikan lahan yang tidak jelas; (vi) kesenjangan teknologi, dan (vii) potensi komoditas bernilai tinggi yang terabaikan.

Petani sebagai penerima dampak dan manfaat dari peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Mamminasae, Desa Sereang, Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyatakan sebagai berikut :

“Tahun 2023 ini, di wilayah kami ada bantuan irigasi tersier dan jalan tani sepanjang 600 meter. Itu bantuan dari pemerintah pusat melalui Balai. Bantuan itu kami mengusulkan lewat kelompok tani. Dan ada juga sebagian bantuan irigasi, yang sumbernya dari dana desa yang telah diprogramkan oleh kepala desa. Namun, masih ada beberapa titik lokasi sebenarnya masih butuh bantuan perbaikan infrastruktur jalan tani dan irigasi dalam menunjang aktivitas pertanian kami” (HTR, 28 Juni 2023)

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Mamminasae, Desa Sereang, Kabupaten Sidenreng Rappang tentang sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan produktivitas pertanian menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kelompok Tani Mamminasae di Desa Sereang menerima bantuan irigasi tersier dan jalan tani sepanjang 600 meter dari pemerintah

pusat melalui Balai. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah pusat dalam mendukung infrastruktur pertanian di tingkat lokal. Pengusulan bantuan melalui kelompok tani juga mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam memperoleh bantuan sarana dan prasarana pertanian ini.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, sebagian bantuan irigasi berasal dari dana desa yang telah diprogramkan oleh kepala desa. Upaya dari pemerintah desa juga berperan dalam mendukung pengembangan sarana pertanian. Partisipasi dana desa adalah contoh penting dari upaya otonomi lokal dalam meningkatkan infrastruktur pertanian. Meskipun telah ada bantuan infrastruktur, Ketua Kelompok Tani Mamminasae mengungkapkan bahwa masih ada beberapa lokasi yang membutuhkan bantuan perbaikan infrastruktur jalan tani dan irigasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya, masih ada tantangan dalam memenuhi semua kebutuhan petani dalam hal sarana dan prasarana pertanian.

Untuk memahami lebih mendalam terkait bentuk pendekatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan produktivitas pertanian, maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengatakan bahwa :

“Ada kebiasaan atau tradisi masyarakat petani kita yang mulai hilang seperti budaya gotong royong dalam mengelola pertanian. Dan itu mesti kita bangun kembali. Dengan adanya semangat gotong royong, petani bisa saling bekerjasama satu sama lain. Kegiatan kearifan lokal di sektor pertanian seperti kegiatan *tudang sipulung*, *massepe*’ dan *mapalili* masih sering dilakukan, bahkan kami sebagai

pemerintah seringkali hadir diacara tersebut”. (Wawancara, 16 Juni 2023).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait Pendekatan Sosial Kemasyarakatan dan Kearifan Lokal terhadap Petani mengungkapkan keprihatinannya terhadap hilangnya budaya gotong royong dalam mengelola pertanian. Tradisi ini merupakan elemen kunci dalam keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani. Dengan mempromosikan kembali semangat gotong royong, pemerintah daerah dapat mendorong kolaborasi dan kerjasama yang lebih baik di antara petani, yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Kegiatan seperti tudang sipulung, massepe', dan mapalili yang merupakan bentuk nyata praktik kearifan lokal dalam sektor pertanian masih dilestarikan, bahkan pemerintah daerah secara rutin hadir dalam acara-acara kearifan lokal tersebut.

Bentuk koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat petani, sejatinya tidak hanya dilakukan dalam ruang-ruang formal, tapi dibutuhkan pendekatan berbasis kearifan lokal di ruang-ruang non formal. Sehingga petani akan merasa lebih dekat dengan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan.

Untuk mendapatkan respon dari petani terkait model pendekatan sosial kemasyarakatan yang efektif dalam menjawab kebutuhan petani, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Jatam Desa Carawali, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap, Abdul Hafid yang mengatakan bahwa :

“Terkadang kami biasanya mau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah terkait masalah yang kami hadapi. Cuma kami

merasa terbatas, kalau nanti ketemu di kantornya. Apalagi kalau pertemuan yang bersifat resmi” (AH, 25 Juni 2023).

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Jatam menyampaikan bahwa ada keterbatasan dalam berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait aspirasi dan masalah yang dihadapi oleh petani. Keterbatasan ini mencakup kendala akses dan rasa kurang nyaman ketika harus menghadiri pertemuan yang bersifat resmi di kantor pemerintah. Keterbatasan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan sosial kemasyarakatan dalam mendekati petani. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memahami bahwa petani mungkin merasa lebih nyaman dan terlibat dalam lingkungan yang lebih akrab dan santai. Menciptakan forum atau pertemuan yang lebih inklusif dan mendekatkan petani kepada pemerintah daerah adalah langkah yang positif. Tradisi, pengetahuan, dan praktik lokal dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan petani untuk mengidentifikasi, menghormati, dan mendukung kearifan lokal ini.

Di era digitalisasi saat ini, pendekatan sosial kemasyarakatan melalui media sosial sangat dibutuhkan, termasuk dalam sektor pertanian. Hal ini dapat memudahkan masyarakat petani dalam menjalin komunikasi dan mengkonfirmasi apabila menghadapi masalah-masalah seperti permasalahan kekurangan pupuk, hama dan masalah lainnya yang berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian.

Untuk mengkonfirmasi hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan,

Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Untuk pendekatan komunikasi dan edukasi kepada petani, kami saat ini masih mengandalkan para penyuluh yang ada di desa-desa. Kalau dalam bentuk media sosial itu belum ada. Terkadang memang kami masih sulit menjangkau secara keseluruhan permasalahan yang dihadapi petani, karena keterbatasan penyuluh kita di lapangan” (SYT, 19 Juni 2023)

Hasil wawancara diatas menerangkan bahwa pemerintah daerah belum memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi dan edukasi kepada petani. Padahal media sosial memiliki potensi besar untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memberikan informasi yang cepat dan mudah diakses. Kekurangan inisiatif dalam pemanfaatan media sosial bisa menghambat upaya komunikasi yang efektif. Saat ini pemerintah daerah masih mengandalkan penyuluh yang ada di desa-desa untuk melakukan komunikasi dan edukasi kepada petani. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mencapai komunikasi yang efektif dan edukasi yang merata kepada seluruh petani. Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan pemahaman tentang praktik pertanian yang baik.

Pemerintah daerah juga menghadapi kendala dalam pemahaman menyeluruh terhadap masalah yang dihadapi oleh petani. Ini disebabkan oleh keterbatasan penyuluh yang tersedia di lapangan. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam kemampuan pemerintah daerah untuk merespons dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin tidak terjangkau oleh penyuluh.

- **Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah pada level sistem dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang diintervensi melalui 3 (tiga) kegiatan yakni pencapaian visi misi dan program kerja, perbaikan kebijakan pada sektor pertanian, serta sistem tata kelola pertanian.

Pencapaian visi misi dan program kerja diintervensi melalui sub kegiatan : Ketersediaan Dokumen Visi Misi terkait sektor pertanian dalam RPJMD, Ketersediaan Dokumen Renstra, Keterlibatan Stackholder dalam perumusan, penyusunan dan pembahasan program kerja, serta monitoring dan evaluasi program kerja. Ketersediaan dokumen perencanaan yang ada belum konsisten dengan rencana aksi dan implementasi nyata dari visi dan misi pemerintah daerah serta realisasi program-program yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian, terkait keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan di sektor pertanian dalam bentuk kegiatan Musyawarah Tudang Sipulung (MTS) belum berjalan secara optimal, pihak swasta dan kelompok tani memiliki keterbatasan akses dalam menyampaikan aspirasi di forum tersebut.

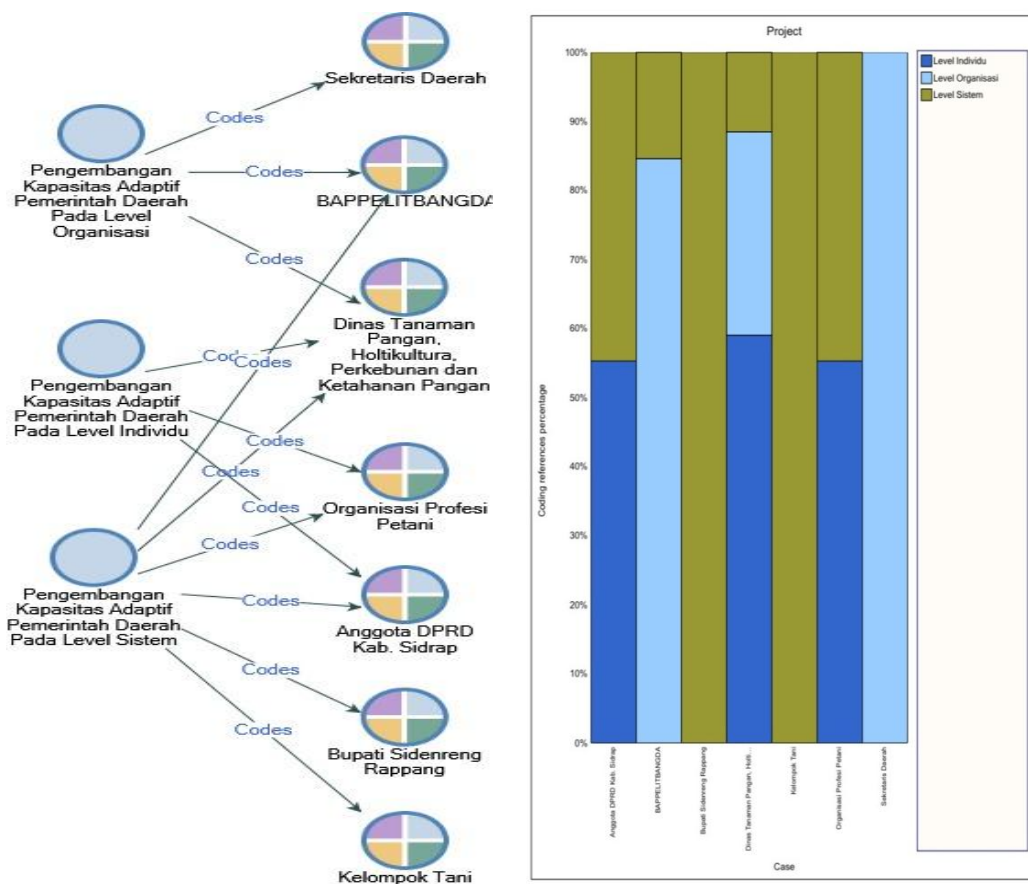
Perbaikan kebijakan pada sektor pertanian diintervensi melalui sub kegiatan : Peran pemerintah sebagai regulator, Kebijakan pencegahan alih

fungsi lahan pertanian (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Alih fungsi lahan produktif pertanian menjadi non pertanian masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti bangunan pemukiman penduduk, fasilitas umum dan industri. Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani.

Tata kelola sistem pertanian diintervensi melalui sub kegiatan : Penerapan teknologi pertanian, responsivitas petani dalam penggunaan teknologi pertanian modern, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, serta pola komunikasi dan koordinasi dalam pendekatan sosial kemasyarakatan pada sektor pertanian. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala utama dalam memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Menggunakan Aplikasi N Vivo.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan menggunakan aplikasi N Vivo tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu, Level Organisasi dan Level Sistem dalam mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat sebagai berikut :



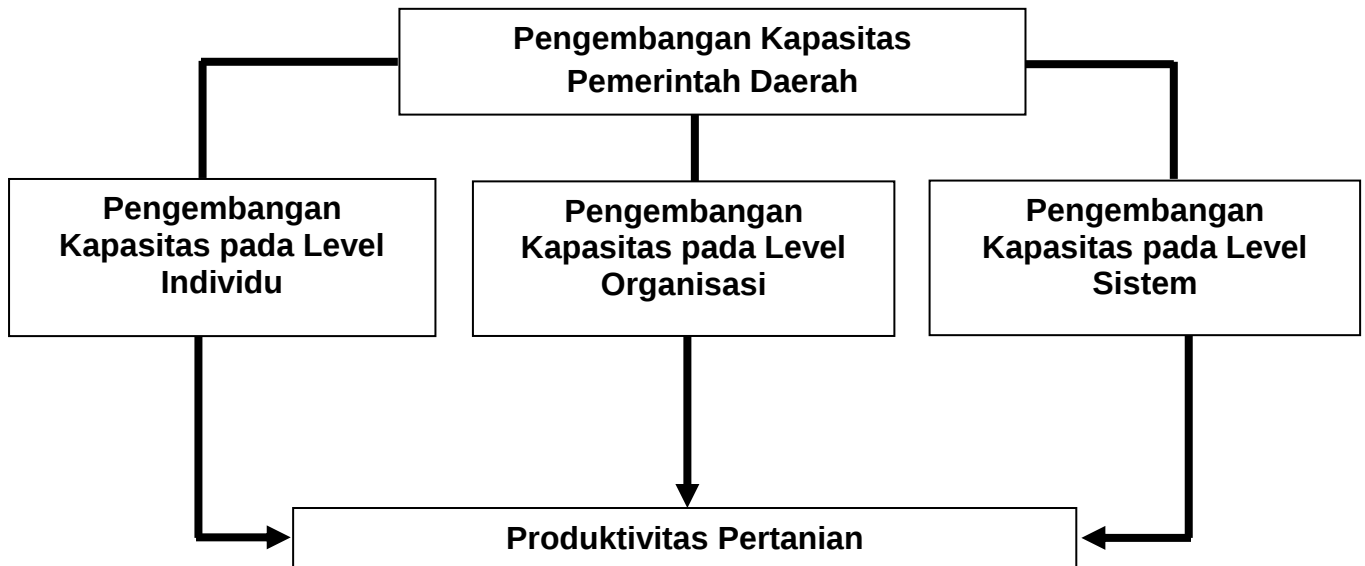
Gambar 4.11 : Hasil Olahan Data menggunakan aplikasi N VIVO

Berdasarkan hasil penelitian dan olahan data menggunakan aplikasi N Vivo, maka peneliti mengemukakan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan melalui 3 (tiga) level pengembangan, yaitu pada level individu, level organisasi, dan level sistem. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada 3 (tiga) level pengembangan tersebut dilaksanakan untuk mendukung produktivitas pertanian dan mencapai visi pemerintah daerah dalam mewujudkan Sidrap sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju.

Dalam hasil olahan data N Vivo menunjukkan bahwa Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai *leading sector* bidang pertanian memiliki relevansi peranan yang sangat besar dalam mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tiga level pengembangan kapasitas tersebut. Bupati Sidenreng Rappang memiliki relevansi peranan yang penting dalam hal pengembangan kapasitas pada level sistem, Sekretaris Daerah relevansi peranan pada pengembangan organisasi, Anggota DPRD relevansi peranan pada level sistem dan juga menyoroti pada level individu, BAPPELITBANGDA lebih cenderung memiliki relevansi peranan pada level sistem dan level individu. Sementara organisasi profesi petani dan kelompok tani lebih cenderung memiliki relevansi peranan pada level individu dan sistem, karena mereka sebagai objek dalam pengembangan kapasitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat dibutuhkan, karena pertanian menjadi pendapatan mayoritas masyarakat dan kontribusi pertanian sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh petani dan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan diharapkan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut, sehingga penelitian ini dianggap penting dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Gambar 4.12
Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang



C. Pembahasan

Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam sektor pertanian. Pengembangan Kapasitas bagi penyelenggaraan pemerintahan didefinisikan sebagai *“the extent to which they (staff) demonstrate concrete contribution to personal, organizational and community development”* (sampai seberapa jauh pemerintah mampu menunjukkan kontribusi yang nyata terhadap pengembangan personal, organisasi dan masyarakat) (Janet L. Finn & Barry Checksoway, 1998:4).

Dalam mengukur pengembangan kapasitas pemerintah daerah dapat diitinjau dari berbagai pandangan kajian pengembangan kapasitas secara

umum ditentukan berdasarkan pada 3 (tiga) level, yaitu level individu, level organisasi dan level sistem dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, *output*, *outcome* yang telah ditentukan, walaupun pada dimensi yang lebih luas mengalami sedikit perbedaan. Namun, jika diteliti secara seksama, konteks sistem, organisasi dan individu diuraikan oleh (UNDP, 1998; Brown, 2001; Morgan, 2006), Lingkungan (Bank Dunia, 2005 ; OECD, 2008), Institusi (Grindle, 1997; Morison, 2001) semuanya memiliki orientasi yang sama yakni bagaimana dimensi individu dan organisasi dapat berinteraksi dengan lingkungan dalam mengembangkan kapasitasnya, dan sistem merupakan lingkungan organisasi dan individu di dalam organisasi tersebut.

Pengembangan kapasitas menurut UNDP (1998) bermuara pada tiga level pengembangan kapasitas yakni : 1). Level individu, yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja sehingga berkemampuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). 2). Level organisasi, yaitu intervensi pada penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan atau jaringan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. 3). Level sistem, yaitu intervensi pada pengaturan program kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

1. Program Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis. Capaian kinerja tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.18
**Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2023**

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (%)	22,95	23,57*	102,70
		Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	1,23	1,03*	83,74
		Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	1,50	2,22*	148,00
		Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	1.048,66	907,85*	86,57
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Prediksi Nilai SAKIP	79 (BB)	72,40 (BB)	91,65

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DTPHPKP, 2024.
Data Sementara Menggunakan Data PDRB Tahun 2022 dan Angka Produksi Sementara (ASEM) Tahun 2023.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai Misi ke-2 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yaitu "Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat", dan tujuan "Meningkatkan pendapatan masyarakat".

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1	Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (%)	18,31	18,93	23,57
2	Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB (%)	1,06	1,20	1,03
3	Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB (%)	1,51	1,72	2,22
4	Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	852	932,03	907,85

Sumber : Data Diolah Subbagian Perencanaan DTPHPKP, 2024. Data Sementara Menggunakan Data PDRB Tahun 2022 dan Angka Produksi Sementara (ASEM) Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2021-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Indikator Kontribusi Subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB mengalami tren peningkatan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Pada tahun 2021 realisasi capaian sebesar 18,31% kemudian meningkat menjadi 18,93% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 juga meningkat menjadi 23,57%.
- Indikator Kontribusi Subsektor Hortikultura terhadap PDRB mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2021 realisasi capaian sebesar 1,06% kemudian meningkat menjadi 1,20% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1,03%.
- Indikator Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB mengalami tren peningkatan realisasi kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan nilai realisasi capaian masing-masing sebesar 1,51%, 1,72% dan 2,22%.

- Indikator Ketersediaan Pangan Utama mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2021 realisasi capaian sebesar 852 Kg kemudian meningkat menjadi 932,03 Kg pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 907,85 Kg.

Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB pada tahun 2023 telah melebihi target kinerja, yaitu tercapai sebesar 102,70% dari target yang ditetapkan. Pencapaian target kontribusi subsektor hortikultura dipengaruhi oleh peningkatan produksi beberapa komoditi tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah dan ubi kayu dan juga dipengaruhi oleh peningkatan harga rata-rata khususnya padi dan jagung di tingkat petani dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi kontribusi PDRB subsektor tanaman pangan.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja indikator kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian berupa pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) pra panen pada sentra produksi tanaman pangan sebanyak 16 unit yang terdiri dari 2 unit traktor roda 4, 4 unit traktor roda 2 dan 10 unit pompa air;
2. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian berupa Pembangunan jaringan irigasi usaha tani, embung dan jalan tani masing-masing sejumlah 1 unit;
3. Pengendalian dan penanggulangan serangan hama dan penyakit tanaman berupa gerakan pengendalian (gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman khususnya hama tikus, yang

dilakukan secara intensif dan massif di 11 Kecamatan bekerjasama dengan Instalasi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (IP3OPT) Wilayah V.

4. Peningkatan kualitas SDM bagi petani dan penyuluh pertanian melalui kegiatan sekolah lapang dan bimbingan teknis/pelatihan tematik.
5. Penambahan jumlah SDM Penyuluh Pertanian melalui Penyuluh Swadaya/Tenaga Penyuluh Bantu untuk mengatasi keterbatasan SDM untuk pengawalan dan pendampingan petani di lapangan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator kontribusi subsektor tanaman antara lain:

1. Dampak perubahan iklim ekstrim El Nino yang menyebabkan kekeringan sehingga mempengaruhi pola tanam dan potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air.
2. Terbatasnya alokasi anggaran APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian produksi komoditi tanaman pangan.

Dalam rangka mengatasi hambatan yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka alternatif/solusi sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kedepannya sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian waktu dan pola tanam untuk mengurangi atau menghindari dampak perubahan iklim;
2. Menetapkan prioritas pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang paling menunjang pencapaian target dan meminta penambahan alokasi anggaran melalui TAPD.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Peranan Pertanian dalam Perekonomian Daerah” terdiri dari 6 (enam) Program sebesar Rp. 3.329.606.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.080.150.950 atau 92,51%. Dibanding dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 105,25%. Berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini sebesar 12,74%. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis

No	Uraian Program	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	71.826.000	66.147.400	92,09
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	14.524.000	11.426.900	78,68
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.114.769.000	2.006.599.250	94,89
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	676.656.000	657.287.300	97,14
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	6.500.000	3.612.000	55,57
6	Program Penyuluhan Pertanian	445.331.000	335.078.100	75,24
	Jumlah	3.329.606.000	3.080.150.950	92,51

Sumber : Laporan Realisasi Kegiatan Pembangunan Fisik dan Keuangan DTPHPKP pada Aplikasi *e-monev* Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2023.

2. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada level individu dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang diintervensi melalui 3 (tiga) kegiatan yakni tingkat pendidikan SDM pertanian, keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian, serta rekrutmen SDM pertanian.

Teori Pembelajaran dan Pengembangan Individu (*Individual Learning and Development Theory*) menjelaskan bagaimana individu dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Teori pembelajaran dan pengembangan individu menekankan bahwa individu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi mereka melalui interaksi langsung dengan pengalaman, baik itu dalam bentuk aktivitas fisik maupun mental. Pendekatan ini dikenal sebagai pembelajaran berbasis pengalaman atau *experiential learning*, yang diperkenalkan oleh David A. Kolb dalam karyanya yang terkenal "*Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*" (1984).

Tingkat pendidikan SDM pertanian melalui sub kegiatan : Pendidikan formal SDM pertanian baik pejabat struktural maupun fungsional, Relevansi pendidikan formal dengan tugas pokok dan fungsi SDM pertanian, serta Program studi lanjut SDM pertanian. Tingkat pendidikan apatur pemerintah daerah pada Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu ditingkatkan, terutama yang lanjut studi untuk S2. Dan berdasarkan eselon di dominasi oleh pejabat fungsional. Relevansi bidang ilmu atau program studi pendidikan formal pejabat struktural dengan tugas strukturalnya sudah mencapai sekitar 88% sedangkan relevansi bidang ilmu atau program studi pendidikan formal staf dengan tugas fungsionalnya sudah mencapai sekitar 92%. Namun jumlah aparatur sebagai penyuluh yang perlu ditingkatkan, karena sudah ada beberapa yang pensiun sehingga ada penyuluh yang menangani 2 desa 1 penyuluh.

Keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian diintervensi melalui sub kegiatan : Pendampingan petani untuk peningkatan produktivitas pertanian, pemberian *reward*, serta mitigasi terhadap perubahan iklim. Pemberian *reward* atau penghargaan kepada SDM pertanian dan petani dapat memiliki dampak positif dalam memotivasi penyuluh serta petani untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada sektor pertanian.

Rekrutmen SDM pada sektor pertanian diintervensi melalui sub kegiatan : Rekrutmen SDM penyuluh pertanian, Rekrutmen kelembagaan petani, serta Rekrutmen Petani Milenial. Pengembangan sumber daya manusia dalam proses rekrutmen SDM pertanian dan kelembagaan petani oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sangat penting untuk dilakukan dalam mendukung

pengembangan SDM pertanian, kelompok tani dan petani milenial untuk mencapai tujuan visi pembangunan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan kapasitas pada level individu di pemerintah daerah merupakan hal penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian karena setiap individu memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perubahan dan inovasi. Memiliki SDM yang profesional, memiliki kemampuan beserta skill yang dibutuhkan, seperti pembelajaran, praktek dan rekrutmen. Konteks yang disampaikan oleh Grindle (1997) dalam mengembangkan sumber daya manusia berfokus pada menghadirkan serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pekerjaan.

Tingkat pendidikan formal SDM pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu ditingkatkan, terutama yang lanjut studi untuk S2. Pemerintah daerah memberikan dorongan kepada aparatur SDM pertanian untuk melakukan studi lanjut dalam meningkatkan kapasitas individunya. Menurut Sukmadinata (2007), relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut

keterpaduan komponen-komponen dalam kurikulum. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Muhson, dkk., juga mengatakan bahwa relevansi suatu program pendidikan (program studi) terkandung unsur: tujuan, input, proses, keluaran/hasil dan dampak (*out come*). Relevansi bidang ilmu atau program studi pendidikan formal pejabat struktural dengan tugas struktural pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai sekitar 88%, begitupun dengan relevansi bidang ilmu atau program studi pendidikan formal staf dengan tugas fungsionalnya sudah mencapai sekitar 92%. Namun jumlah aparatur sebagai penyuluh yang perlu ditingkatkan, karena sudah ada beberapa yang pensiun sehingga ada penyuluh yang menangani 2 desa 1 penyuluh.

Aspek keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengakui bahwa faktor utama yang menyebabkan turunnya tingkat produktivitas pertanian adalah ketidakpastian iklim cuaca, terkadang terjadi hujan lebat dan kemarau yang berkepanjangan. Selanjutnya untuk mengantisipasi perubahan iklim dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh petani, melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang menginstruksikan kepada penyuluh untuk fokus melakukan pendampingan secara langsung kepada petani. Kinerja pengembangan

kapasitas pemerintah daerah secara signifikan dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tindakannya (*action environment*). Karena pemerintah daerah sebagaimana sebuah organisasi tidak berada dalam situasi vakum. Artinya banyak faktor-faktor eksternal-internal lain yang mempunyai unsur-unsur kekuatan langsung dan kekuatan tidak langsung, disamping memberi kontribusi bagi munculnya *capacity gap* atau situasi *uncertainty* dalam pengembangan kapasitas. Dengan kata lain pemerintah daerah sangat membutuhkan suatu lingkungan yang kondusif, yang dari padanya dapat dimanfaatkan untuk berbuat terbaik baik daerah. Disini yang harus dilakukan adalah (1) memanfaatkan segala *resources* fisik dan non-fisik yang dimiliki secara terukur dan bertanggung jawab, 2) untuk menjamin kemampuan yang berkelanjutan maka perlu dihindari adanya peraturan perundangan yang tumpang tindih yang menjadi sumber kesimpang siuran, ketidakjelasan interpretasi dan rawan penyalahgunaan (*wanprestasi*), dan (3) memantapkan keamanan dan ketertiban di daerah secara mandiri, menegakkan kepatuhan kepada peraturan, pengawasan dan penegakkan hukum.

Dalam penyelenggaraan *capacity building* dalam pemerintahan daerah dibutuhkan pendekatan yang tepat. Pendekatan yang diarahkan kepada mengubah cara berpikir, sikap dan kebiasaan lama yang telah berurat akar dan memberikan wawasan baru atau nilai-nilai baru seperti nilai-nilai yang terdapat dalam *reinventing government* dan tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu, pendekatan ini ditujukan untuk

melakukan pembenahan-pembenahan organisasi, manajemen dan kebijakan serta sistem akuntabilitas publik dan pembinaan moral dan etos kerja. Dalam konteks otonomi daerah pendekatan ini diarahkan kepada pengurangan hambatan-hambatan struktural, memberi ruang untuk melakukan terobosan (*deregulasi, debirokrasi*) atau keleluasaan untuk bertindak, memberikan penghargaan terhadap prestasi, dan memberi kewenangan lebih luas kepada unit organisasi atau jabatan yang lebih rendah.

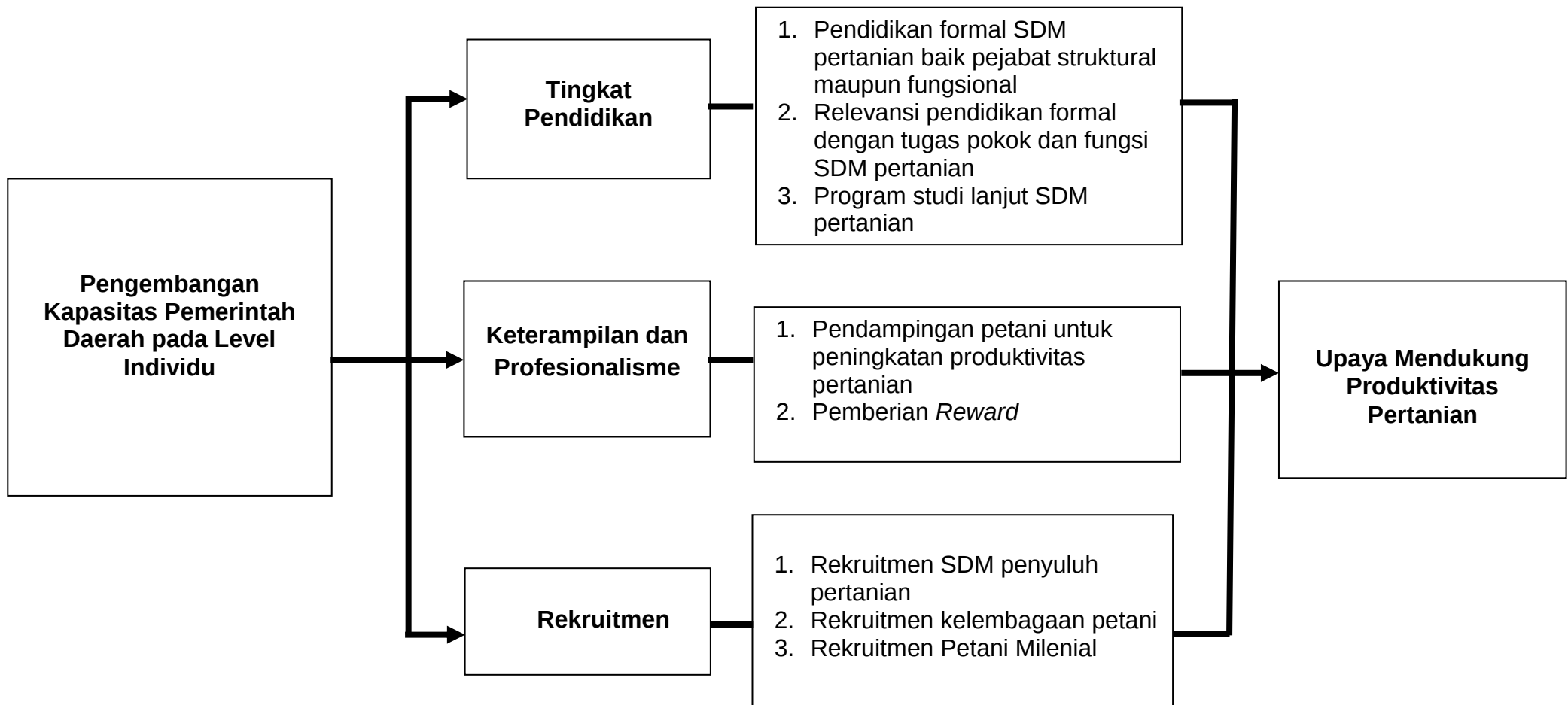
Pemberian *reward*/penghargaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng masih bergantung pada *reward* yang di programkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan salah satu penyuluh di Sidrap pada tahun 2023 ini telah mendapatkan *reward* sebagai penyuluh berprestasi atas kinerja yang telah dilakukan. Sementara, untuk pemerintah daerah sendiri memberikan *reward* dalam bentuk apresiasi kepada SDM pertanian yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pemberian *reward* kepada SDM pertanian dan petani itu sendiri, adalah keterbatasan anggaran. Teori motivasi A.H. Maslow yang merupakan suatu hirarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan kebersamaan, kebutuhan harga diri dan terakhir kebutuhan aktualisasi diri. A.H. Maslow berpendapat bahwa susunan hirarki kebutuhan itu merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia. Semakin individu itu mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya

yang relatif lebih tinggi, maka individu itu akan semakin mampu mencapai individualitasnya, artinya lebih matang kepribadiannya. A.H. Maslow juga membedakan motivasi menjadi dua yaitu motivasi defisiensi (*D-motives*) dan motivasi pertumbuhan (*B-motives*). Motivasi defisiensi adalah motivasi yang bersangkutan paut dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Sasaran utama dari motivasi defisiensi adalah mengatasi peningkatan tegangan organismik pada individu karena defisiensi. Berbeda dengan motivasi defisiensi, maka motivasi pertumbuhan (*metaneeds*) adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk merealisasi potensi-potensinya.

Dalam aspek rekrutmen SDM pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data diakui bahwa jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal. Hal itu disebabkan karena tidak sebanding jumlah SDM pertanian yang pensiun, dengan jumlah pengangkatan yang diterima baik pengangkatan ASN maupun P3K. Dampaknya, ada penyuluh yang masih merangkap sebagai PPK, BPP bahkan masih ada penyuluh yang menanganani sampai 2 desa 1 penyuluh. Rekrutmen menurut Sinambela dalam Nurhasanah (2019), adalah proses penarikan individu sesuai dengan kebutuhan pada waktu yang tepat, jumlah memadai, dengan kualifikasi yang ditentukan, dan mendorong mereka untuk melamar kerja ke organisasi. Lanjutnya rekrutmen adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mencari pelamar kerja dengan kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan

organisasi guna memenuhi kebutuhan SDM yang direncanakan organisasi. Rekrutmen kelembagaan petani, khusus untuk kelompok tani telah berjalan sesuai dengan standar prosedur yang ada. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah desa dalam proses pembentukannya. Yang juga menjadi kendala di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah rekrutmen petani milenial yang masih tergolong rendah, hal itu disebabkan kurangnya edukasi kepada generasi muda terkait dampak ekonomis dan kesejahteraan pada sektor pertanian. Sehingga diharapkan kedepan, pemerintah daerah mampu melibatkan petani-petani milenial dalam mengembangkan sektor pertanian, terutama dalam melakukan inovasi, penggunaan teknologi dan pemasaran produksi hasil pertanian.

Gambar 4.13
Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu dalam Upaya Mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang



Tabel 4.20

Matriks Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Individu dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang

Level	Indikator	Sub Indikator	Hasil	Kesimpulan
Individu	Tingkat Pendidikan	* Pendidikan Formal SDM Pertanian	* Jumlah SDM Pertanian sebanyak 106 Orang	* Tingkat pendidikan apatur pemerintah daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu ditingkatkan, terutama yang lanjut studi untuk S2.
			* ASN 92 Orang, yang terdiri dari : 20 Orang (S2), 66 (S1), 2 Orang (D3), 4 Orang (SMA)	
			* PPT-TK 14 Orang, yang terdiri dari : 12 Orang (S1), 1 Orang (D3), 1 Orang (SMA)	
		* Relevansi pendidikan formal dengan tugas pokok dan fungsi SDM pertanian	* Relevansi bidang ilmu atau program studi pendidikan formal pejabat struktural dengan tugas strukturalnya sudah mencapai sekitar 88%, dan relevansi bidang ilmu atau program studi pendidikan formal staf dengan tugas fungsionalnya sudah mencapai sekitar 92%. Namun jumlah aparatur sebagai penyuluh yang perlu ditingkatkan, karena sudah ada beberapa yang pensiun sehingga ada penyuluh yang menangani 2 desa 1 penyuluh	* Relevansi pendidikan formal dengan tugas pokok dan fungsi SDM pertanian sebagian besar sudah sesuai, yang perlu jadi perhatian adalah penambahan jumlah penyuluh pertanian di setiap desa/kelurahan.
		* Program studi lanjut SDM pertanian	* Tingkat pendidikan formal aparatur dalam bentuk dorongan studi lanjut mendapat dukungan dari pemerintah daerah	* Adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur pada sektor pertanian. Perlu adanya dukungan anggaran dalam bentuk beasiswa lanjut studi.
	Keterampilan dan Profesionalisme	* Pendampingan petani untuk peningkatan produktivitas pertanian	* Penyuluh pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang selalu diarahkan untuk melakukan pendampingan kepada petani. Dalam pendampingan kepada petani, terdapat penekanan pada beberapa aspek diantaranya penggunaan bibit yang bermutu, cara mengatasi hama, pendistribusian pupuk serta pelatihan langsung dengan formulator. Namun petani merasa kurang puas dengan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Mereka lebih membutuhkan pendampingan dalam bentuk praktek langsung atau studi lapang.	* Kebutuhan petani akan pengalaman nyata dalam menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Pentingnya praktik lapangan untuk membantu petani dalam mengatasi tantangan pertanian sehari-hari.

		* Pemberian Reward	* Bentuk reward yang diberikan pemerintah daerah dalam bentuk apresiasi kinerja, yang mencakup penghargaan verbal atau sertifikat. Terdapat keterbatasan anggaran untuk pemberian reward kepada SDM pertanian dan petani yang sumbernya dari APBD kabupaten.	* Perlunya dukungan anggaran dalam pemberian reward atau penghargaan kepada SDM pertanian dan petani, karena hal tersebut dapat memiliki dampak positif dalam memotivasi penyuluh serta petani untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada sektor pertanian
	Rekrutmen	* Rekrutmen SDM penyuluh pertanian	* Adanya ketidakseimbangan antara jumlah penyuluh pertanian yang diterima dengan jumlah penyuluh yang sudah pensiun. Jumlah penyuluh pertanian sangat kurang, adanya penyuluh pertanian yang merangkap sebagai PPK di tingkat kecamatan dan juga merangkap sebagai BPP, padahal aturan seharusnya memungkinkan satu penyuluh untuk satu desa.	* Kuantitas SDM penyuluh pertanian yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk menangani semua kebutuhan petani di Kabupaten Sidenreng Rappang
		Rekrutmen Kelembagaan Petani	* Proses rekrutmen kelompok tani dilakukan setiap tahun, dengan mempertimbangkan bahwa ada kelompok tani yang dapat melakukan perubahan (reshuffle) atau pemekaran.	* Kelompok tani telah menjadi saluran penting untuk pertukaran informasi antara petani, saling berbagi informasi dan pengetahuan, serta mendapatkan pendampingan dari penyuluh pertanian yang dapat meningkatkan praktik kerja pertanian, mendukung produktivitas, dan mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan
		Rekrutmen Petani Milenial	* Jumlah peminat dari generasi muda dalam sektor pertanian masih rendah	* Pentingnya edukasi dan pelatihan tentang inovasi teknologi, teknik pemasaran melalui media sosial dan dorongan untuk menjadi wirausaha pertanian kepada generasi muda di Sidenreng Rappang.

3. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada level organisasi diintervensi melalui 3 (tiga) kegiatan yakni manajemen organisasi, budaya kerja organisasi, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam Teori Kapasitas Organisasi (*Organizational Capacity Theory*) berfokus pada peningkatan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan mereka melalui pengembangan manajemen, struktur, proses, budaya, sumber daya manusia, dan teknologi. Teori Kapasitas Organisasi (*Organizational Capacity Theory*) merupakan kerangka konseptual yang mempertimbangkan bagaimana organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan strategisnya. Fokus utamanya adalah pada pengembangan berbagai aspek internal organisasi yang mendukung efektivitas dan kinerja jangka panjang.

Manajemen organisasi diintervensi melalui sub kegiatan : Sinkronisasi program pemerintah daerah dengan target pencapaian visi misi dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, SOP terkait tugas dan fungsi struktur organisasi pertanian, pengembangan organisasi serta pengawasan pengelolaan anggaran pada sektor pertanian. Memahami pentingnya perencanaan yang baik, penggunaan data dan analisis, sinkronisasi program, evaluasi anggaran secara berkala untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan

dengan bijaksana sesuai skala prioritas dan respons terhadap isu-isu strategis dalam manajemen organisasi merupakan bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan manajemen organisasi pada sektor pertanian.

Budaya kerja organisasi diintervensi melalui sub kegiatan : Sosialisasi budaya kerja organisasi, Tingkat pemahaman SDM pertanian terkait budaya kerja organisasi yang telah ditetapkan, Peran pimpinan dalam menerapkan budaya kerja organisasi, serta Evaluasi secara berkala terkait kinerja organisasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Mengukur kinerja organisasi melalui berbagai indikator yang relevan dengan visi pembangunan daerah menjadi bukti dari pendekatan berbasis bukti dalam mengukur kinerja organisasi. Evaluasi kinerja organisasi yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tidak hanya didasarkan pada pengukuran internal, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan berbagai stackholder eksternal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diintervensi melalui sub kegiatan : *Training/* Pelatihan secara berkelanjutan kepada SDM pertanian, peran SDM pertanian dalam memberikan edukasi pertanian, serta penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memberikan manfaat bagi petani,

seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian.

Teori Pengembangan Organisasi (*Organizational Development Theory*) menekankan pada proses perubahan terencana dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan karyawan/pegawai. Teori ini menggunakan pendekatan sistematis terhadap perubahan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan karyawan melalui perubahan terencana. Pendekatan ini mengakui bahwa organisasi adalah sistem kompleks yang memerlukan penyesuaian dan pengembangan kontinu agar tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Pengembangan kapasitas pada level organisasi yang dimaksud adalah berfokus kepada bagaimana tata manajemen yang bagus dan sesuai untuk meningkatkan dan menjadikan tujuan awal berhasil dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintah daerah, dengan fokus : manajemen organisasi, budaya kerja dan pengembangan SDM pemerintah daerah pada sektor pertanian.

Dengan meningkatkan kapasitas pada tingkat organisasi pemerintah daerah, akan terbentuk lingkungan yang mendukung untuk inovasi, pengembangan teknologi, dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan dalam sektor pertanian. Hal ini akan membantu menciptakan sistem yang lebih adaptif dan efisien dalam meningkatkan

produktivitas pertanian secara berkelanjutan. *Institutional Theory* (Teori Kelembagaan) adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Donaldson (1995) menyatakan bahwa suatu ide atau gagasan pada suatu lingkungan institusional yang membentuk bahasa dan simbol yang menjelaskan keberadaan organisasi dan diterima (*taken for granted*) sebagai norma-norma dalam konsep organisasi.

Yuwono, 2003 menyebutkan bahwa dalam mewujudkan otonomi daerah, maka strategi-strategi yang perlu dipersiapkan berdasarkan dimensi-dimensi, faktor pengaruh dan persyaratan dalam *capacity building* adalah (1) penentuan secara jelas visi dan misi daerah dan lembaga pemerintah daerah, (2) perbaikan sistem kebijakan publik di daerah, (3) perbaikan struktur organisasi pemerintah daerah, (4) perbaikan kemampuan manajerial dan kepemimpinan pemerintah daerah; (5) pengembangan sistem akuntabilitas internal dan eksternal pemerintah daerah; (6) perbaikan budaya organisasi pemerintah daerah; (7) pengembangan SDM aparat pemerintah daerah, (8) pengembangan sistem jaringan (*network*) antar kabupaten dan kota, serta (9) pengembangan, pemanfaatan, dan penyesuaian lingkungan pemerintah daerah yang kondusif.

Dalam aspek manajemen organisasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang menekankan keterkaitan dan integrasi visi misi Bupati Sidrap yang tercantum dalam RPJMD. Dinas Tanaman Pangan,

Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengambil langkah konkret dengan menyusun Renstra khusus yang mengakomodasi program-program yang mendukung visi agrobisnis yang maju. Struktur organisasi yang dirancang oleh pemerintah daerah kepada OPD yang menangani soal pertanian telah berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada SOP yang mengatur terkait tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dari struktur organisasi tersebut. Pemerintah daerah juga secara kontinyu melakukan pemetaan potensi wilayah pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai upaya menjawab permasalahan yang dihadapi pada sektor pertanian sekaligus untuk sinkronisasi program-program yang akan direncanakan.

Dalam pengembangan organisasi berdasarkan penjelasan dari anggota DPRD Sidrap bahwa pemerintah daerah belum mampu membangun *networking* (jaringan) pemerintahan di berbagai level termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kalangan organisasi pertanian dan sektor swasta, serta belum memaksimalkan potensi lokal pada sektor pertanian, selain itu masih terjadinya beberapa persoalan yang dihadapi oleh petani dan belum mampu ditangani oleh pemerintah daerah secara serius seperti keterbatasan pupuk, penanggulangan hama yang belum teratasi dan penyediaan bibit unggul kepada yang belum tersedia. Pengembangan network disini mungkin memiliki kedekatan makna dengan membangun kemitraan (*partnership*), *joint ventures* atau aliansi strategis. Pada intinya merupakan suatu strategi

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling pengertian dan membesarkan. Meskipun Rencana Strategis telah memberikan arah pengembangan SDM dan kelembagaan yang ada di daerah, untuk melakukan berbagai pengembangan tersebut daerah pasti memiliki berbagai keterbatasan. Karena itu harus dimungkinkan proses belajar sendiri dan kolaborasi dengan pihak lain (misalnya, *public-private partnership*). Seperti diuraikan Edward J. Blakely (1994) dalam Soeprapto (2006:30) “..No matter what organizational structure is selected, public agencies and private firms have to enter into new relationship to make the development process work...”. Disamping itu daerah juga punya kebebasan untuk belajar atau saling belajar dan membagi pengalaman (*action and learning by doing*) dengan; (1) Kabupaten atau Kota lain baik dari dalam maupun dari luar negeri. mengembangkan model sister city dengan kota di negara lain, sehingga akan terjadi *spillover* pengalaman dari tempat lain, (2) organisasi-organisasi profesional atau bisnis yang ada, dan (3) pusat- pusat studi dan pengembangan seperti perguruan tinggi, lembaga riset swasta, dan LSM yang sesuai dengan kebutuhan, melalui suatu “jaringan kerja” yang terencana. Kolaborasi antara mereka sangat membantu proses belajar cepat di daerah, menciptakan keterkaitan (*linkage*) kepentingan yang lebih luas (*broad-base*) namun dengan tetap memperhatikan prinsip “duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”.

Dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah, bidang-bidang strategis yang harus dikembangkan sangat menentukan jenis dan jangkauan kebijakan tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan yang perlu dikembangkan. Dalam perencanaan strategis formal berkaitan dengan tiga tipe perencanaan; *strategic plans*, *medium-range programs*, *short-range budgets and operating plans*. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini antara lain tipe, jumlah serta kualitas institusi pemerintahan yang diperlukan, jenis dan tingkat *managerial skills* yang dibutuhkan termasuk tipe kepemimpinannya, dan sistem akuntabilitas publik serta budaya organisasi pemerintahan. Dengan demikian dimensi yang perlu dikembangkan dalam penguatan kelembagaan meliputi : (1) pengembangan kebijakan, (2) pengembangan (*network*) organisasi, (3) pengembangan manajemen, (4) pengembangan sistem akuntabilitas publik, dan (5) pengembangan budaya organisasi.

Dalam aspek budaya kerja organisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum nilai-nilai Budaya Kerja yang terdiri dari: Proaktif, Disiplin, Inovasi, Kerja sama, dan Transparan setiap saat disosialisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Khusus di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang budaya kerja tersebut juga seringkali ditekankan dalam setiap aktivitas kegiatan organisasi. Sekalipun dalam implementasinya, masih butuh kesamaan persepsi dan gerakan dari seluruh *stackholder* pertanian sehingga

budaya kerja tersebut memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian target. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah membuat indikator-indikator pencapaian kinerja organisasinya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Dan untuk mengevaluasi dari hasil kinerja tersebut, dinasnya bekerjasama dengan berbagai stakeholder untuk menerima masukan dan saran seperti anggota DPRD, BPS dan arahan langsung dari Bupati. Selanjutnya, BAPPELITBANGDA secara berkala juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari program-program sektor pertanian yang telah direncanakan sebelumnya. Termasuk kendala-kendala yang dihadapi apabila ada program yang tidak terealisasi, maka segera akan dicarikan solusi.

Menurut Riyadi Soeprapto (2006:19) faktor *adaptive leadership* merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pembangunan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik (sebagaimana pemerintahan daerah), harus terus menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan juga realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Kepemimpinan adaptif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah

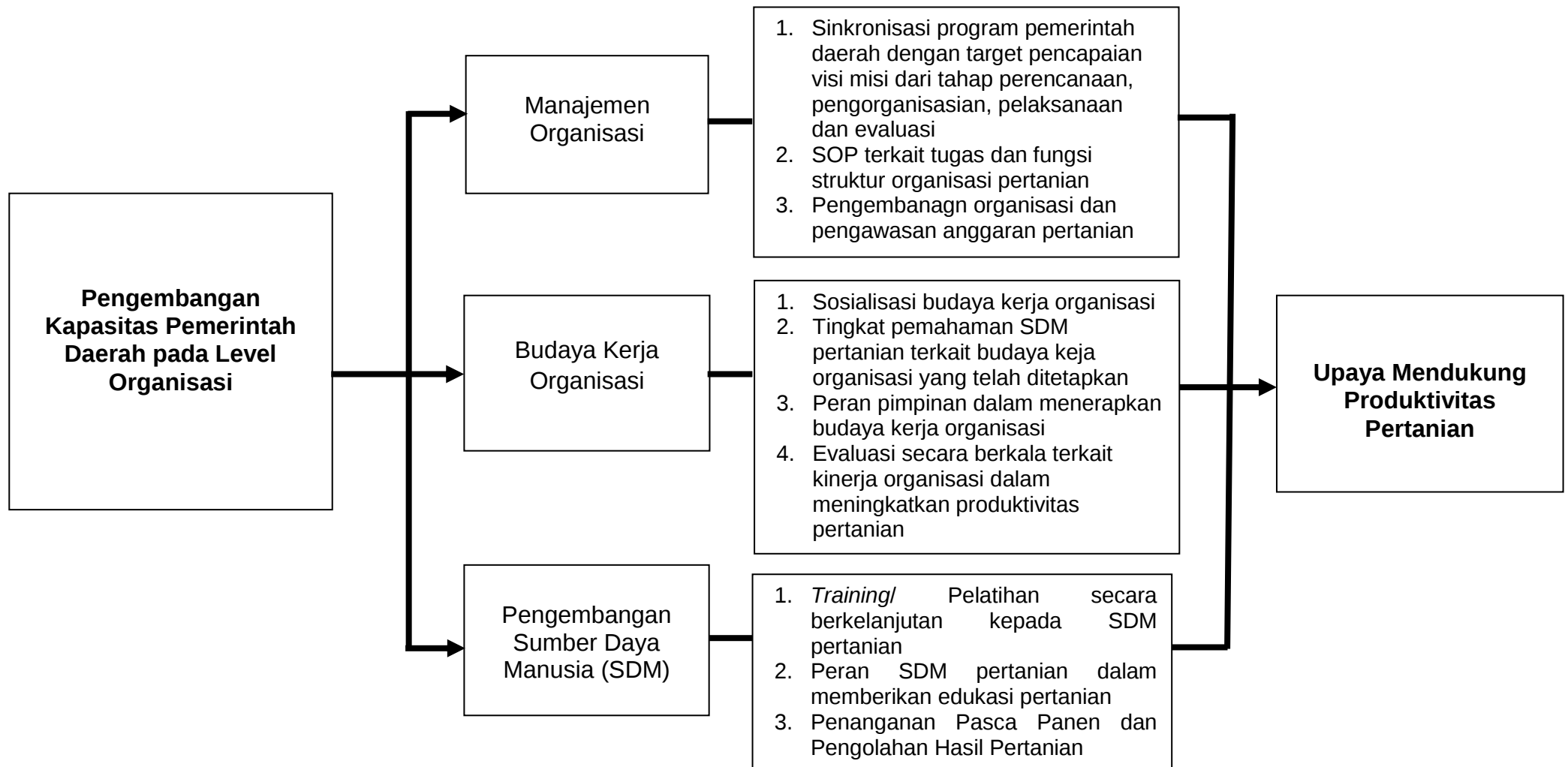
modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan. Teori Kepemimpinan Adaptif Menurut Fridayani (2021), suatu pendekatan kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, menghadapi tantangan yang kompleks, dan memimpin dengan cara yang responsif dan inovatif. Menurut Yuwono (2003) bahwa kepemimpinan memegang peranan penting dalam kesuksesan program pembangunan kapasitas organisasi. Kepemimpinan yang dipersyaratkan dalam pembangunan kapasitas antara lain adalah keterbukaan (*openness*), penerimaan terhadap ide-ide baru (*receptivity to new ideas*), kejujuran (*honesty*), perhatian (*caring*), penghormatan terhadap harkat dan martabat (*dignity*) serta penghormatan kepada orang lain (*respect to people*). Semakin pemimpin memberikan kepercayaan dan suasana kondusif pada staf untuk berkembang, maka akan semakin sukseslah program pengembangan kapasitas dalam sebuah organisasi.

Penelitian yang dilakukan Resia,O. (2019) dengan judul “Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Potensial di Kabupaten Kutai Timur”. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa terdapat keterbukaan ruang kerjasama dengan unsur swasta dalam pemanfaatan Sumber Daya Potensial khususnya pada bidang pertanian dan perkebunan. Selanjutnya dari tinjauan dimensi *learning capacity* ditemukan kendala dalam hal kekurangan SDM profesional terutama dalam bidang perencanaan sumber daya

potensial masih membutuhkan tenaga profesional yang mampu memaksimalkan potensi daerah. Selain itu kebijakan pemerintah pusat yang sering mengalami perubahan hal ini menjadi kendala dalam optimalisasi sumber daya potensial.

Dalam aspek pengembangan SDM pada sektor pertanian, kegiatan *training*/pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng kepada SDM pertanian dan petani itu sendiri melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut melibatkan petani dari berbagai kelompok, desa dan gabungan kelompok tani. Begitupun, dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian dalam hal ini penyuluh pertanian, pemerintah daerah telah memfasilitasi beberapa kegiatan pelatihan untuk meningkatkan *skill* (keterampilan) penyuluh dalam melakukan edukasi dan pendampingan kepada petani dalam upaya meningkatkan produktivitas pertaniannya. Adapun pelatihan yang telah dilakukan seperti Gerakan Pengendalian (Gerdal) dan penanggulangan hama penyakit pertanian, pelatihan penggunaan pupuk organik, pelatihan pengembangan kapasitas penyuluh dan pelatihan mengelola pertanian dengan Konsep "Petik, Olah, Jual". Namun, pada umumnya bentuk pelatihan/ pendampingan yang diharapkan oleh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Studi Lapang (Praktik Langsung).

Gambar 4.14
Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi dalam Upaya Mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambar 4.21 Matriks Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Organisasi dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang

Level	Indikator	Sub Indikator	Hasil	Kesimpulan
Organisasi	Manajemen Organisasi	* Sinkronisasi program pemerintah daerah dengan target pencapaian visi misi dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi	* Dalam perencanaan program, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sangat menekankan pengaitan dengan visi dan misi Bupati Sidrap yang tercantum dalam RPJMD.	* Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengambil langkah konkret dengan menyusun Renstra khusus yang mengakomodasi program-program yang tertuang dalam RPJMD untuk mendukung visi agrobisnis yang maju.
		* SOP terkait tugas dan fungsi struktur organisasi pertanian	* Telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.	* Struktur organisasi yang dirancang oleh pemerintah daerah kepada OPD yang menangani soal pertanian telah berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan Perda dan Perbup yang telah dibuat. Ada SOP yang mengatur terkait tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dari struktur organisasi.
		* Pengembangan organisasi dan pengawasan anggaran pertanian	* Tidak terjalin networking baik secara vertikal maupun horisontal serta tidak memadainya anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah seperti keterbatasan pupuk, penanggulangan hama dan penyediaan bibit unggul sehingga berdampak negatif pada produktivitas pertanian.	* Pemerintah daerah belum mampu membangun networking (jaringan) pemerintahan di berbagai level termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kalangan organisasi pertanian dan sektor swasta, serta belum memaksimalkan dukungan anggaran pada sektor pertanian.

	Budaya Kerja Organisasi	* Sosialisasi budaya kerja organisasi	* Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum menanamkan nilai-nilai Budaya Kerja yang terdiri dari: Proaktif, Disiplin, Inovasi, Kerja sama, dan Transparan setiap saat disosialisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	* Kebutuhan petani akan pengalaman nyata dalam menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh. Pentingnya praktik lapangan untuk membantu petani dalam mengatasi tantangan pertanian sehari-hari.
		* Tingkat pemahaman SDM pertanian terkait budaya kerja organisasi yang telah ditetapkan	* Budaya kerja yang terdiri dari : Proaktif, Disiplin, Inovasi, Kerja sama, dan Transparan sudah diterapkan dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan maupun aktivitas pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk dalam upaya pencapaian visi misi pemerintahan daerah. Sekalipun terkadang, dalam implementasinya masih membutuhkan kesamaan persepsi dan gerakan dari semua stackholder yang ada.	* Implementasi budaya kerja organisasi belum berjalan secara konsisten
		* Peran pimpinan dalam menerapkan budaya kerja organisasi	* Arahan terkait budaya kerja organisasi selalu disampaikan dalam setiap rapat sebagai upaya peningkatan kinerja dari seluruh SDM pertanian.	* Budaya kerja organisasi telah memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja seluruh SDM di bidang pertanian.
		* Evaluasi secara berkala terkait kinerja organisasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian	* Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah membuat indikator-indikator pencapaian kinerja organisasinya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Dan untuk mengevaluasi dari hasil kinerja tersebut, dinasnya bekerjasama dengan berbagai stackholder untuk menerima masukan dan saran seperti anggota DPRD, BPS dan arahan langsung dari Bupati.	* Perlunya dukungan anggaran dalam pemberian reward atau penghargaan kepada SDM pertanian dan petani, karena hal tersebut dapat memiliki dampak positif dalam memotivasi penyuluh serta petani untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada sektor pertanian

	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	* Training/ Pelatihan secara berkelanjutan kepada SDM pertanian	* Kegiatan training/pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng kepada SDM pertanian dan petani itu sendiri melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Adapun pelatihan yang telah dilakukan seperti Gerakan Pengendalian (Gerdal) dan penanggulangan hama penyakit pertanian, pelatihan penggunaan pupuk organik, pelatihan pengembangan kapasitas penyuluh dan pelatihan mengelola pertanian dengan Konsep "Petik, Olah, Jual".	* Bentuk pelatihan/ pendampingan yang diharapkan oleh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Studi Lapang (Praktik Langsung).
		* Peran SDM pertanian dalam memberikan edukasi pertanian	* Pemerintah daerah telah memfasilitasi beberapa kegiatan pelatihan untuk meningkatkan skill (keterampilan) penyuluh dalam melakukan edukasi dan pendampingan kepada petani dalam upaya meningkatkan produktivitas pertaniannya	* PPL memberikan pendampingan mulai dari merencanakan budidaya seperti penyusunan RDKK, entry simluhtan dan menghitung e-alokasi pupuk bersubsidi, bahkan pelaksanaan penyuluhan sampai evaluasi kegiatan.
		* Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	* Petani diberikan edukasi tentang bagaimana petani supaya dapat mengelola hasil pertaniannya sendiri dengan konsep yang dikenal dengan istilah petik, olah, dan jual. Peningkatan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh petani sehingga memiliki nilai tambah dari hasil produksi pertaniannya.	* Konsep "Petik, Olah, Jual" yang diajarkan dalam pelatihan merupakan pendekatan yang penting dalam pengelolaan hasil pertanian. Petani tidak hanya belajar bagaimana menghasilkan panen yang baik (petik), tetapi juga bagaimana mengolah hasil pertanian mereka dan menjualnya dengan cara yang menguntungkan.

4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada level sistem dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang diintervensi melalui 3 (tiga) kegiatan yakni pencapaian visi misi dan program kerja, perbaikan kebijakan pada sektor pertanian, serta sistem tata kelola pertanian.

Teori Sistem (*Systems Theory*) mengkaji bagaimana komponen-komponen dalam suatu sistem saling berinteraksi dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan. Dalam konteks pengembangan kapasitas pemerintah daerah, Teori Sistem dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis interaksi antara berbagai komponen yang berkontribusi pada kinerja keseluruhan pemerintah daerah. Beberapa komponen kunci yang harus dipertimbangkan meliputi visi misi, kebijakan, regulasi, sumber daya, dan teknologi.

Pencapaian visi misi dan program kerja diintervensi melalui sub kegiatan : Ketersediaan Dokumen Visi Misi terkait sektor pertanian dalam RPJMD, Ketersediaan Dokumen Renstra, Keterlibatan Stakeholder dalam perumusan, penyusunan dan pembahasan program kerja, serta monitoring dan evaluasi program kerja. Ketersediaan dokumen perencanaan yang ada belum konsisten dengan rencana aksi dan implementasi nyata dari visi dan misi pemerintah daerah serta realisasi program-program yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian, terkait keterlibatan pihak swasta

dan masyarakat dalam perencanaan, perumusan dan penetapan kebijakan di sektor pertanian dalam bentuk kegiatan Musyawarah Tudang Sipulung (MTS) belum berjalan secara optimal, pihak swasta dan kelompok tani memiliki keterbatasan akses dalam menyampaikan aspirasi di forum tersebut.

Perbaikan kebijakan pada sektor pertanian diintervensi melalui sub kegiatan : Peran pemerintah sebagai regulator, Kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian (Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Alih fungsi lahan produktif pertanian menjadi non pertanian masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti bangunan pemukiman penduduk, fasilitas umum dan industri. Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani.

Tata kelola sistem pertanian diintervensi melalui sub kegiatan : Penerapan teknologi pertanian, responsivitas petani dalam penggunaan teknologi pertanian modern, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, serta pola komunikasi dan koordinasi dalam pendekatan sosial kemasyarakatan pada sektor pertanian. Keterbatasan anggaran

juga menjadi kendala utama dalam memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan Kapasitas pada level sistem dipandang sebagai kemampuan untuk melembagakan keseluruhan kapasitas individu dan organisasional sebagai sebuah prosedur, mekanisme, dan standar baku dalam kerja pemerintah daerah. Kepastian hukum dan kejelasan regulasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan visi dan misinya. Daerah yang memiliki regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten dan adil membuat birokrasi dapat bekerja dengan baik untuk mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Raymond Mcleod (2001) “ Sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu “.

Pengembangan kapasitas pada level sistem menjadi hal sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi mencapai visi dan misinya. Ketersediaan dokumen proses operasional menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari, sekaligus menjadi panduan dalam memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek pencapaian visi misi dan penguatan program kerja dalam peningkatan produktivitas pertanian, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menjadikan pertanian sebagai salah satu titik fokus dalam pencapaian

visi misinya. Itu tergambarkan dari visi misi yang telah dicanangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2023 bahwa Visi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemerintahan Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si yakni Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai **Daerah Agribisnis yang Maju** dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”.

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang juga menegaskan jika telah membuat analisis dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai upaya dan langkah adaptasi yang dilakukan untuk menjawab peluang dan tantangan pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun ketersediaan dokumen perencanaan tersebut belum konsisten dengan rencana aksi dan implementasi nyata dari visi dan misi pemerintah daerah serta realisasi program-program yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian, dapat dilihat tidak adanya point tentang peningkatan sektor pertanian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Menurut Riyadi Soeprapto (2006:19) faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas pada level sistem adalah komitmen bersama. *Collective commitments* dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah

organisasi (termasuk pemerintahan daerah) sangat menentukan sejauh mana pembangunan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi.

Program tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam perumusan kebijakan pada sektor pertanian dilakukan melalui Musyawarah Tudang Sipulung (MTS). Namun berdasarkan penjelasan dari beberapa kelompok tani dan organisasi profesi petani, jika selama ini kegiatan MTS belum mampu mengakomodasi dan menindaklanjuti aspirasi dari petani, mereka memiliki keterbatasan akses dalam menyampaikan aspirasi di forum tersebut terutama yang ada ditingkat desa. Bahkan yang dilibatkan dalam kegiatan MTS di tingkat kabupaten, hanya perwakilan dari beberapa kelompok tani saja yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti turunnya tingkat produksi padi selama beberapa tahun terakhir, keterbatasan pupuk bersubsidi, harga pestisida yang tidak terkendalikan, harga gabah yang tidak menentu serta infrastruktur jalan tani yang masih banyak mengalami kerusakan. Hal ini menggambarkan jika pemerintah daerah belum mampu mendapatkan kepercayaan sepenuhnya oleh petani, belum mampu

mengakomodir kepentingan petani dan belum mampu membangun kolaborasi yang baik dengan petani sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Menurut Dwiyanto (2012:90) keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi menjadi sekedar kebutuhan, tetapi telah menjadi sebuah keharusan. Dalam pengembangan kapasitas di era *New Public Service* (NPS) menurut (Intam Kurnia:2010) masyarakat lebih dilibatkan secara langsung dalam setiap aktivitas proses kebijakan publik dan memberikan perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara (bukan sebagai pelanggan), mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berfikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai dan standar yang ada dan menghargai masyarakat dalam artian keterlibatan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Keterbukaan akses informasi merupakan persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan program pembangunan kapasitas dalam level sistem. Pada bentuk organisasi yang tradisional dan birokratis, semua informasi dipegang dan dikuasai oleh pimpinan. Kondisi seperti ini jelas tidak memungkinkan pembangunan kapasitas. Sebaliknya, pembangunan kapasitas salah satunya harus dimulai dengan memberikan akses dan kesempatan untuk memperoleh informasi secara cukup baik dan efektif guna mendukung program yang akan dilaksanakan.

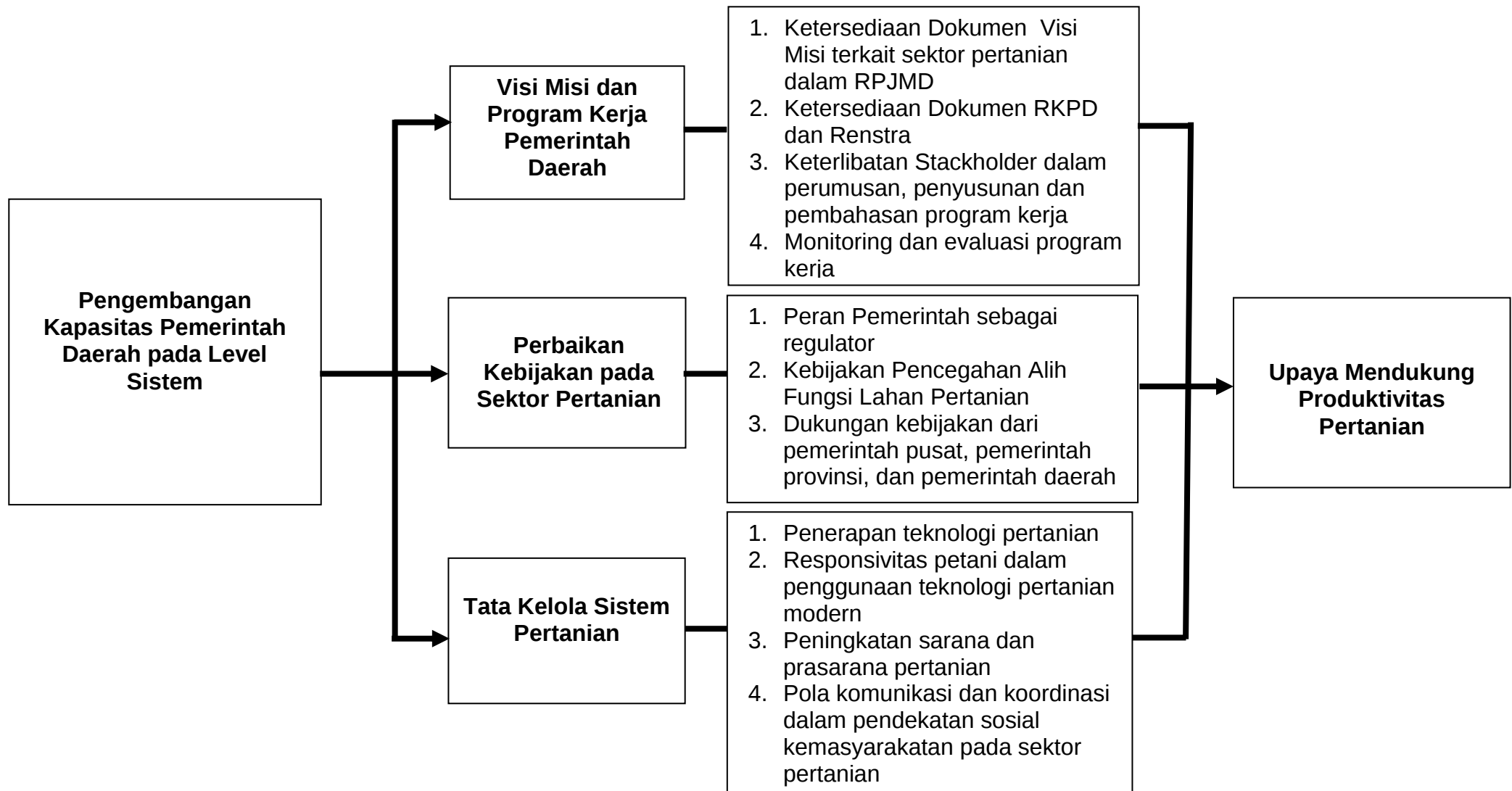
Dalam aspek perbaikan kebijakan pada sektor pertanian, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penggabungan beberapa instansi/dinas yang berkaitan dengan sektor pertanian, termasuk Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, memperkuat sektor pertanian dan mengurangi tumpang tindih tanggungjawab dalam peningkatan produktivitas pertanian. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lahan pertanian, dari aspek kebijakan telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sekalipun dalam implementasinya, soal alih fungsi lahan masih belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor termasuk penambahan jumlah penduduk, kebutuhan industri, dan perumahan. Menurut Riyadi Soeprapto (2006:16) dapat dikemukakan bahwa dalam tingkatan sistem pengembangan kapasitas adaptif pemerintah daerah menjadi kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu.

Dalam aspek sistem tata kelola pertanian, di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum telah menggunakan sistem tata kelola pertanian yang moderen. Mulai pada saat penggarapan, pengelolaan, panen hingga pasca panen dan hampir semua wilayah telah menerapkan sistem tersebut. Komitmen pemerintah daerah dan

petani di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap modernisasi pertanian melalui penggunaan teknologi dan tata kelola yang responsif telah dilakukan. Dukungan sarana dan prasarana pertanian seperti infrastruktur jalan tani, irigasi, waduk dan embung menjadi langkah adaptif untuk memudahkan akses petani dalam peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengakui belum mampu menjangkau secara keseluruhan dari kebutuhan petani, hal itu disebabkan keterbatasan anggaran daerah yang tidak dapat memenuhi semua keinginan petani. Namun upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah telah mengambil langkah dengan mengusulkan proposal kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pola komunikasi dan koordinasi dalam pendekatan sosial kemasyarakatan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam melakukan adaptasi terhadap peningkatan produktivitas pertanian, bentuk pendekatan kearifan lokal yang dilakukan dengan mendorong tradisi-tradisi seperti *tudang sipulung*, *massepe'* dan *mappalili'* sebagai rangkaian pesta panen oleh petani tetap harus dilestarikan, sekalipun pemerintah daerah mengakui budaya gotong royong antar petani sudah mulai terkikis. Selain pendekatan kearifan lokal, masyarakat petani juga mengharapkan adanya model pendekatan yang bersifat inklusif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ruang-ruang komunikasi tidak hanya secara formal, sehingga petani lebih leluasa dalam menyampaikan aspirasinya. Pendekatan melalui media sosial juga

ditekankan dalam temuan hasil penelitian ini, pemerintah daerah diharapkan menjadikan media sosial sebagai sarana atau alat komunikasi dalam merespon kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh petani.

Gambar 4.15
Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem dalam Upaya Mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambar 4.22 Matriks Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah pada Level Sistem dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang

Level	Indikator	Sub Indikator	Hasil	Kesimpulan
Sistem	Visi Misi dan Program Kerja Pemerintah Daerah	* Ketersediaan Dokumen Visi Misi terkait sektor pertanian dalam RPJMD	* Pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dalam upaya mendukung produktivitas pertanian yang dituangkan dalam visi misi pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 terkait dengan Agrobisnis yang Maju.	* Adanya dokumen Visi Misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2023 untuk mendukung visi agrobisnis yang maju.
		* Ketersediaan Dokumen RKPD dan Renstra	* Adanya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun ketersediaan dokumen perencanaan tersebut belum konsisten dengan rencana aksi dan implementasi nyata dari visi misi pemerintah daerah serta realisasi program-program yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian, dapat dilihat tidak adanya point tentang peningkatan sektor pertanian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.	* Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan rencana aksi, implementasi nyata dari visi misi pemerintah daerah serta realisasi program-program yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian menjadi hal yang perlu diperhatikan.
		* Keterlibatan Stackholder dalam perumusan, penyusunan dan pembahasan program kerja	* Program tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam perumusan kebijakan pada sektor pertanian dilakukan melalui Musyawarah Tudang Sipulung (MTS). Namun berdasarkan penjelasan dari beberapa kelompok tani dan organisasi profesi petani, jika selama ini kegiatan MTS belum mampu mengakomodasi dan menindaklanjuti aspirasi dari petani, mereka memiliki keterbatasan akses dalam menyampaikan aspirasi.	* Keterlibatan Stackholder dalam perumusan, penyusunan dan pembahasan program kerja dilakukan dalam bentuk kegiatan Musyawarah Tudang Sipulung (MTS). Adanya keterbukaan akses dalam mengajukan aspirasi petani menjadi hal penting dalam peningkatan produktivitas pertanian.
		* Monitoring dan evaluasi program kerja	* DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah pembangunan di sektor pertanian	* Pemerintah daerah dinilai kurang mengikuti dan mengambil tindakan yang tepat terhadap aspirasi petani. Isu-isu seperti kekurangan pupuk, kondisi jalan tani yang buruk, dan harga gabah yang rendah merupakan masalah penting bagi petani yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi konkret.

	Perbaikan Kebijakan pada Sektor Pertanian	* Peran Pemerintah sebagai regulator	* Peran pemerintah dalam membantu mengatasi masalah petani, peran pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pertanian telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	* Implementasi kebijakan dari Perda tersebut tidak berjalan sesuai dengan fakta lapangan. Masih banyaknya keluhan dari petani, menjadi indikasi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat petani.
		* Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	* Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dan implementasi Peraturan Perlindungan Lahan Berkelanjutan tersebut, harapan pemerintah agar terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.	* Faktor penyebab alih fungsi lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, kebutuhan industri, dan perumahan.
		* Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah	* Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah bekerja bersama dengan OPD lainnya secara terintegrasi pada sektor diharapkan bisa berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian	* Kerjasama antara tingkat pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, bersama dengan OPD lainnya, menunjukkan pendekatan lintas sektoral yang penting untuk mendukung pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	Tata Kelola Sistem Pertanian	* Penerapan teknologi pertanian	* Penggunaan teknologi modern dalam pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perkembangan positif	* Penggunaan handtraktor, handsprayer, drone pertanian, dan mesin-mesin modern lainnya adalah bukti bahwa petani di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
		* Responsivitas petani dalam penggunaan teknologi pertanian modern	* Rata-rata petani di Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengadopsi teknologi modern dalam pengelolaan pertanian mencakup penggunaan alat-alat pertanian modern	* Teknologi modern dalam pertanian dapat memberikan manfaat berupa efektivitas dan efisiensi. Penghematan waktu, tenaga, dan sumber daya yang dapat berdampak positif pada hasil pertanian.
		* Peningkatan sarana dan prasarana pertanian	* Sarana dan prasarana pertanian seperti infrastruktur jalan tani, embung, waduk kami akui masih belum mampu menjangkau secara keseluruhan dari kebutuhan petani, itu karena anggaran daerah belum mampu memenuhi semua keinginan petani	* Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Sidrap. Namun upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah telah mengambil langkah dengan mengusulkan proposal ke dinas pertanian tingkat provinsi dan kementerian pertanian.

		* Pola komunikasi dan koordinasi dalam pendekatan sosial kemasyarakatan pada sektor pertanian	* Ada keterbatasan dalam berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait aspirasi dan masalah yang dihadapi oleh petani. Keterbatasan ini mencakup kendala akses dan rasa kurang nyaman ketika harus menghadiri pertemuan yang bersifat resmi di kantor pemerintah. Keterbatasan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan sosial kemasyarakatan dalam mendekati petani.	* Bentuk koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat petani, sejatinya tidak hanya dilakukan dalam ruang-ruang formal, tapi dibutuhkan pendekatan berbasis kearifan lokal di ruang-ruang non formal. Sehingga petani akan merasa lebih dekat dengan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan.
--	--	--	---	---

5. Rekomendasi Kebaruan (*Novelty*) Hasil Temuan Penelitian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh UNDP (1999) bermuara pada tiga level pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas pertanian yakni : 1). Level individu, yaitu pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah melalui tingkat pendidikan SDM pertanian, keterampilan dan profesionalisme SDM pertanian serta rekrutmen SDM pertanian, ternyata dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian. 2). Level organisasi, yaitu pada manajemen organisasi, budaya kerja organisasi dan pengembangan SDM pada sektor pertanian. 3). Level sistem, yaitu pada pencapaian visi misi dan program kerja, perbaikan kebijakan pada sektor pertanian, serta sistem tata kelola pertanian. Hal ini bisa menjadi model pengembangan kapasitas pemerintah daerah bukan hanya di Kabupaten Sidenreng Rappang, namun bisa dikembangkan di daerah lain yang ada di seluruh Indonesia.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada masing-masing level pengembangan dilaksanakan melalui masing-masing kegiatan. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada level individu dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada level organisasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan. Serta Pengembangan kapasitas pemerintah daerah pada level sistem dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

Secara keseluruhan dari 3 (tiga) level yang dikemukakan oleh UNDP (1999) terkait Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam upaya mendukung produktivitas pertanian berdasarkan analisis hasil wawancara dan olahan data N Vivo maka dapat disimpulkan jika pada level individu, tingkat pendidikan SDM pertanian didukung oleh relevansi bidang ilmu dan jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aparatur, dorongan untuk studi lanjut, pemberian *reward* dalam bentuk apresiasi, keterampilan dan profesionalisme masih dipengaruhi oleh iklim kerja dan cuaca yang tidak menentu. Permasalahan lain yang ditemukan yakni tidak tercukupinya jumlah penyuluh pertanian, minat generasi muda disektor pertanian masih kurang serta terbatasnya dukungan anggaran pengembangan keahlian lokal. Dalam memahami permasalahan pengembangan kapasitas pada level individu, maka menurut analisis peneliti bahwa pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang harus mampu menciptakan lingkungan pemerintahan yang kondusif dan dukungan anggaran yang memadai dalam melakukan rekrutmen tenaga penyuluh pertanian, petani milenial dan pemberian *reward* kepada SDM pertanian berprestasi.

Pada level organisasi, manajemen organisasi pemerintah daerah didukung oleh terlaksananya beberapa program pemerintah daerah pada sektor pertanian, struktur organisasi yang telah memiliki SOP terkait tugas dan fungsinya, budaya kerja organisasi yang mampu meningkatkan disiplin dan motivasi kerja SDM pertanian, serta terlaksananya kegiatan-kegiatan pelatihan dalam pengembangan SDM pertanian. Namun, permasalahan yang ditemukan yakni pola kepemimpinan yang belum mampu melakukan penyesuaian terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian, *networking* (jaringan) pemerintahan yang masih terbatas pada sektor pertanian, serta pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait peningkatan produktivitas pertanian masih perlu ditingkatkan. Dalam memahami permasalahan pengembangan kapasitas pada level organisasi, maka menurut analisis peneliti bahwa pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang harus memiliki kemampuan kepemimpinan adaptif dalam memanaj risiko agar mampu menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan kebutuhan masyarakat terutama pada sektor peningkatan produktivitas pertanian. Untuk meningkatkan kinerja organisasi pada sektor pertanian, maka pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan *networking* (jaringan) pemerintahan di semua level stake holder.

Pada level sistem telah didukung oleh dokumen peraturan daerah terkait Visi Misi Pemerintah Daerah yang menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama yakni “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng

Rappang sebagai **Daerah Agribisnis yang Maju** dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”. Ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen RPJMD, dan Renstra Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, namun tidak menjadi prioritas dalam RKPD. Kebijakan tentang pertanian sudah ada dalam bentuk Perda dan Perbup, namun masih belum maksimal dalam sosialisasi ke masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dan kelompok tani dalam kegiatan Musyawarah Tudang Sipulung (MTS) belum optimal, dan berbagai permasalahan petani seperti keterbatasan pupuk bersubsidi, harga pestisida yang tidak terkendalikan, harga gabah yang tidak menentu serta infrastruktur jalan tani itu masih terjadi. Dalam memahami permasalahan pengembangan kapasitas pada level sistem, maka menurut analisis peneliti bahwa pemerintah daerah membutuhkan komitmen pada integrasi visi misi, program kerja dan kebijakan, serta memberikan keterbukaan akses informasi kepada semua stackholder dalam peningkatan produktivitas pertanian.

Untuk mengkompilasi berbagai hasil penelitian terdahulu, teori-teori yang menjadi literatur, aturan-aturan terkait sektor pertanian, hasil pengamatan di lapangan, hasil olahan data dengan aplikasi N Vivo serta hasil temuan penelitian yang mengkhususkan beberapa indikator yang menjadi acuan dalam meneliti setiap fokus yang dipilih, maka pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi pada sektor

pertanian dengan menerapkan pengembangan model *UNDP Capacity Development Framework*. Peneliti merumuskan beberapa point proposisi dan menawarkan *novelty* (kebaruan) dari apa yang didapatkan dalam penelitian dengan hal-hal baru yang diharapkan bisa memperbarui apa yang sudah ada.

Proposisi 1 : Pengembangan kapasitas level individu diarahkan pada terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan optimalisasi dukungan anggaran.

Proposisi 2 : Pengembangan kapasitas level organisasi diarahkan pada penguatan kepemimpinan dan pengembangan *networking* (jaringan) pemerintahan dengan berbagai stakeholder.

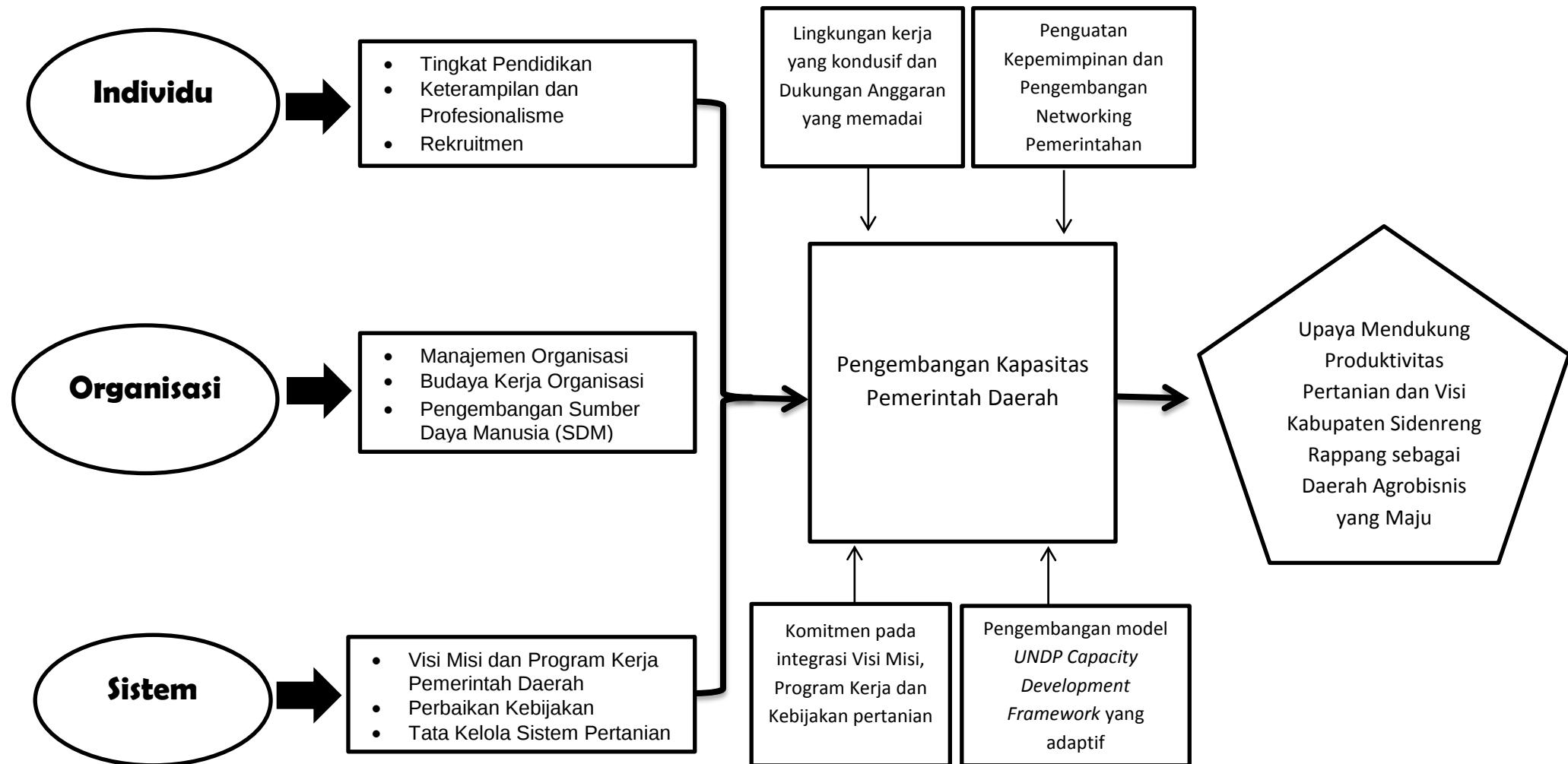
Proposisi 3 : Pengembangan kapasitas level sistem diarahkan pada komitmen pemerintah daerah dalam implementasi visi misi, program kerja dan kebijakan serta keterbukaan akses pada sektor pertanian.

Proposisi 4 : Jika pemerintah daerah mengembangkan model *UNDP Capacity Development Framework* yang lebih adaptif dalam pengembangan kapasitas pada sektor pertanian, maka dapat mendukung produktivitas pertanian secara berkelanjutan dan visi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju dapat diwujudkan.

Tabel 4.23 Kesimpulan Reduksi Data Pengembangan Kapasitas Model *UNDP Capacity Development Framework*

Level		
Individu	Organisasi	Sistem
Pada level individu, tingkat pendidikan SDM pertanian didukung oleh relevansi bidang ilmu dan jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aparatur, dorongan untuk studi lanjut, pemberian reward dalam bentuk apresiasi, keterampilan dan profesionalisme masih dipengaruhi oleh iklim kerja dan cuaca yang tidak menentu. Permasalahan lain yang ditemukan yakni tidak tercukupinya jumlah penyuluh pertanian, minat generasi muda disektor pertanian masih kurang serta terbatasnya dukungan anggaran pengembangan keahlian lokal. Dalam memahami permasalahan pengembangan kapasitas pada level individu, maka menurut analisis peneliti bahwa pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang harus mampu menciptakan lingkungan pemerintahan yang kondusif dan dukungan anggaran yang memadai dalam melakukan rekrutmen tenaga penyuluh pertanian, petani milenial dan pemberian reward kepada SDM pertanian berprestasi.	Pada level organisasi, manajemen organisasi pemerintah daerah didukung oleh terlaksananya beberapa program pemerintah daerah pada sektor pertanian, struktur organisasi yang telah memiliki SOP terkait tugas dan fungsinya, budaya kerja organisasi yang mampu meningkatkan disiplin dan motivasi kerja SDM pertanian, serta terlaksananya kegiatan-kegiatan pelatihan dalam pengembangan SDM pertanian. Namun, permasalahan yang ditemukan yakni pola kepemimpinan yang belum mampu melakukan penyesuaian terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian, networking (jaringan) pemerintahan yang masih terbatas pada sektor pertanian, serta pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait peningkatan produktivitas pertanian masih perlu ditingkatkan. Dalam memahami permasalahan pengembangan kapasitas pada level organisasi, maka menurut analisis peneliti bahwa pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang harus memiliki kemampuan kepemimpinan adaptif dalam memanaj risiko agar mampu menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan kebutuhan masyarakat terutama pada sektor peningkatan produktivitas pertanian. Untuk meningkatkan kinerja organisasi pada sektor pertanian, maka pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan networking (jaringan) pemerintahan di semua level stake holder.	Pada level sistem telah didukung oleh dokumen peraturan daerah terkait Visi Misi Pemerintah Daerah yang menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama yakni “Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”. Ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen RPJMD, dan Renstra Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, namun tidak menjadi prioritas dalam RKPd. Kebijakan tentang pertanian sudah ada dalam bentuk Perda dan Perbup, namun masih belum maksimal dalam sosialisasi ke masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dan kelompok tani dalam kegiatan Musyawarah Tudang Sipulung (MTS) belum optimal, dan berbagai permasalahan petani seperti keterbatasan pupuk bersubsidi, harga pestisida yang tidak terkontrol, harga gabah yang tidak menentu serta infrastruktur jalan tani itu masih terjadi. Dalam memahami permasalahan pengembangan kapasitas pada level sistem, maka menurut analisis peneliti bahwa pemerintah daerah membutuhkan komitmen pada integrasi visi misi, program kerja dan kebijakan, serta memberikan keterbukaan akses informasi kepada semua stakeholder dalam peningkatan produktivitas pertanian.

Gambar 4.16 Rekomendasi Pengembangan Model *UNDP Capacity Development Framework* yang Adaptif



Deskripsi Singkat : Dalam penelitian ini, Pengembangan Model *UNDP Capacity Development Framework* menjadi temuan model pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuannya sebagai strategi adaptif pemerintah daerah dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor pertanian sekaligus sebagai langkah inisiatif secara holistik yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengoptimalkan sektor pertanian yang produktif dan berkelanjutan demi terwujudnya visi sebagai daerah Agrobisnis yang Maju. Model ini menjadikan konsep pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian baik pada level individu, level organisasi dan level sistem sebagai komponen utama.

Komponen utama Pengembangan Model *UNDP Capacity Development Framework* sebagai bentuk penguatan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1) Pengembangan Kapasitas pada Level Individu :

- a. **Lingkungan Kerja yang Kondusif** : Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di tingkat individu, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat membantu memperkuat kapasitas aparatur SDM pertanian secara keseluruhan meningkatkan produktivitas dan

keberlanjutan sektor pertanian. Program ini dapat dilakukan dengan mendorong inisiatif dan kreativitas aparatur SDM pertanian untuk mencari solusi inovatif dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta memberikan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi individu, serta menciptakan mekanisme untuk berbagi ide dan pengalaman antarstaf.

- b. **Optimalisasi Dukungan Anggaran** : Pemerintah Daerah mendukung penganggaran dalam pengembangan keahlian lokal dengan melakukan pelatihan pengembangan kapasitas SDM Pertanian secara berkelanjutan, rekrutmen SDM Pertanian (penyuluh), petani milenial dan pemberian reward kepada SDM Pertanian dan petani yang berprestasi.

2) Pengembangan Kapasitas pada Level Organisasi :

- a. **Kepemimpinan** : Pendekatan kepemimpinan yang menekankan kemampuan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, menghadapi tantangan yang kompleks, dan memimpin dengan cara yang responsif dan inovatif. Pemerintah daerah Pemerintah daerah dapat memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemerintah daerah memiliki

kemampuan manajemen risiko dalam mengantisipasi segala bentuk hambatan yang terjadi dalam peningkatan produktivitas pertanian, serta dalam pro aktif dalam melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan program-program yang dijalankan sebagai pendekatan berbasis bukti dalam mengukur pencapaian visi sebagai Daerah Agribisnis yang Maju.

- b. **Pengembangan *Networking* Pemerintahan** : Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dalam pengembangan kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan dan produktif. Program ini akan memfasilitasi kolaborasi antarorganisasi baik secara internal maupun eksternal dengan berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk melakukan sinkronisasi program-program pertanian. Program ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dalam bentuk MoU dan MoA antara lembaga pemerintah baik ditingkat lokal, regional, dan nasional dan juga lembaga non pemerintah pemerintah. Hal ini mencakup kolaborasi dengan kementerian pertanian, dinas pertanian provinsi, lembaga riset pertanian, universitas, lembaga keuangan, pihak swasta, organisasi profesi petani dan organisasi masyarakat petani lainnya.

3) Pengembangan Kapasitas pada Level Sistem :

a. **Komitmen pada Integrasi Visi Misi, Program Kerja dan**

Kebijakan : Upaya yang dilakukan pemerintah daerah secara terintegrasi dengan berkomitmen pada visi misi yang telah ditetapkan, ditindaklanjuti dengan program kerja serta dukungan kebijakan disektor pertanian. Mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah, DPRD, OPD pertanian, petani, organisasi pertanian, dan pihak swasta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pertanian. Program ini dapat dilakukan dengan melibatkan pada penyelenggaraan forum terbuka (*tudang sipulung*), fakta integritas, koordinasi dan komunikasi aktif antar OPD dan pembentukan tim transformasi agrobisnis pertanian.

b. **Keterbukaan Akses** : Pemerintah daerah harus menjaga komunikasi terbuka yang inklusif dan responsif dengan masyarakat, serta menyediakan informasi yang mudah diakses tentang program dan kebijakan pertanian. Sehingga masyarakat dapat berkontribusi dengan ide, masukan, dan umpan balik terhadap kebijakan dan program pertanian yang dirancang oleh pemerintah daerah terkait pertanian. Program ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan dialog inklusif, membangun MoU dengan perguruan tinggi, pihak swasta

dan mengaktifkan media sosial, website dan sarana informasi terkait pertanian.

Manfaat yang dapat diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penerapan Pengembangan Model *UNDP Capacity Development Framework* ini sebagai berikut :

1. Terwujudnya visi organisasi pemerintah Kabupaten Sidenreng sebagai Daerah Agribisnis yang Maju.
2. Terciptanya sistem tata kelola pertanian yang kolaboratif, maju dan modern.
3. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan organisasi pertanian yang kuat.
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pemangku kepentingan dalam pertanian.
5. Meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan kesejahteraan petani.

Pengembangan Model *UNDP Capacity Development Framework* akan membantu pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengembangkan kapasitas adaptifnya baik dari level individu, level organisasi dan level sistem untuk mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan Visi pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Mewujudkan Daerah Agribisnis yang Maju.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang pada level individu, tingkat pendidikan SDM pertanian didukung oleh relevansi bidang ilmu dan jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aparatur, dorongan untuk studi lanjut, pemberian reward dalam bentuk apresiasi, keterampilan dan profesionalisme masih dipengaruhi oleh iklim lingkungan kerja. Permasalahan lain yang ditemukan yakni lemahnya motivasi kerja SDM pertanian, tidak tercukupinya jumlah penyuluh pertanian, minat generasi muda disektor pertanian masih kurang serta terbatasnya dukungan anggaran pengembangan keahlian lokal.

2. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang pada level organisasi, manajemen organisasi pemerintah daerah didukung oleh terlaksananya beberapa program pemerintah daerah pada sektor pertanian, struktur organisasi yang telah memiliki SOP terkait tugas dan fungsinya, budaya kerja organisasi yang mampu meningkatkan disiplin dan motivasi kerja SDM pertanian, serta terlaksananya kegiatan-kegiatan pelatihan dalam pengembangan SDM pertanian. Namun, permasalahan yang ditemukan yakni gaya kepemimpinan yang belum mampu beradaptif terhadap perubahan secara signifikan,

antisipasi terhadap perubahan iklim yang tidak terkendalikan, serta bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi terkait peningkatan produktivitas pertanian belum berjalan secara optimal.

3. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang pada level sistem telah didukung oleh dokumen peraturan daerah terkait Visi Misi Pemerintah Daerah, ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen RPJMD, dan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang, namun belum menjadi prioritas dalam dokumen RKPD, sehingga belum konsisten terhadap aksi nyata dalam program-program peningkatan produktivitas pertanian. Keterlibatan pihak swasta dan kelompok tani dalam kegiatan Musyawarah Tudang Sipulung (MTS) belum optimal, dan berbagai permasalahan petani seperti keterbatasan pupuk bersubsidi, harga pestisida yang tidak terkendalikan, harga gabah yang tidak menentu serta infrastruktur jalan tani itu masih terjadi.
4. Pengembangan Model *UNDP Capacity Development Framework* dijadikan sebagai strategi adaptif pemerintah daerah dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor pertanian sekaligus sebagai langkah inisiatif secara holistik yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas adaptif pemerintah

daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada level sistem, level organisasi dan level individu dalam meningkatkan produktivitas pertanian yang berkelanjutan demi terwujudnya visi sebagai daerah Agrobisnis yang Maju

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kapasitas pada level individu dengan menciptakan iklim lingkungan kerja pemerintahan yang kondusif dan dukungan anggaran yang memadai dalam melakukan pelatihan kepada SDM Pertanian secara berkelanjutan, rekrutmen tenaga penyuluh pertanian, petani milenial dan pemberian *reward* kepada SDM pertanian berprestasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kapasitas pada level organisasi dengan menerapkan gaya kepemimpinan adaptif dalam mengelola risiko untuk mengantisipasi dampak pada penurunan tingkat produktivitas pertanian akibat cuaca ekstrem dan pengembangan *networking* (jaringan) pemerintahan di semua level.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kapasitas pada level

sistem dengan membangun penguatan pada aspek komitmen bersama dalam intergrasi visi misi, program kerja dan kebijakan di sektor pertanian dan memiliki keterbukaan akses informasi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjadikan Pengembangan Model *UNDP Capacity Development Framework* sebagai alternatif solusi dan strategi adaptif pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus dalam upaya pencapaian Visi sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju. Model ini memberikan penguatan dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam peningkatan produktivitas pertanian baik pada level individu, level organisasi dan level sistem.

Daftar Pustaka

- Armitage, Derek dan Ryan Plummer (Eds). (2010). *Adaptive Capacity and Environmental Governance*. New York: Springer.
- Abdullah, R., & Firmansyah, A. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Agribisnis dan Pembangunan*, 2(2), 67-78.
- Abraham H. Maslow. (2013). *Motivasi dan Kepribadian (Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. PT. PBP, Jakarta
- Adger, N., 2003. Aspek sosial kapasitas adaptif, dalam: Smith, J., Klein, J., Huq. S. (Eds), *Perubahan iklim, kapasitas adaptif dan pembangunan*. Imperial College Press, London, hlm. 29-49.
- Alaufa, G. A., Nitria, Y. H., & Zakiyuddin, M. H. Pengembangan Komunitas Berbasis *Adaptive Governance* (Studi Kasus Kampung Batik Semarang). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 164-176.
- Astuti, R., & Haryanto, T. (2019). Analisis Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 135-144.
- Arifin, Z., & Supriyanto, B. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 12(1), 34-45.
- Bevir, Mark. (2007). *Encyclopedia of Governance*. London: Sage Publications.
- Boedhi (2000). *Pengembangan Organisasi: Upaya Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*. Jakarta: FISIP UT.
- Brunner, R., & Lynch, A. (2010). *Adaptive governance and climate change*. Berlin: Springer Science & Business Media.
- Brunner, R. D., Steelman, T. A., Coe-Juell, L., Cromley, C. M., Tucker, D. W., & Edwards, C. M. (2005). *Adaptive governance: integrating science, policy, and decision making*. New York: Columbia University Press.
- Brooks, N., Adger, W. N., & Kelly, P. M. (2005). *The determinants of vulnerability and adaptive capacity at the national level and the implications for adaptation*. *Global Environmental Change*, 15(2), 151-163.

- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2016). *A decade of adaptive governance scholarship: synthesis and future directions*. *Ecology and Society* 19(3).
- Cheema, G. Shabbir (2005). *From Public Administration To Governance: The Paradigm Shift In The Link Between Government And Citizens*, 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance 24 – 27 May 2005, Seoul, Republic of Korea
- C, Folke, dkk. (2005). Tata kelola adaptif dari sistem sosial-ekologis. *Annu. Rev. Environ. Sumber daya*, 30, 441-473
- Darnaz, R. (2021). *Adaptive Governance Dalam Pengelolaan Objek Taman Wisata Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman* (Disertasi Doktor Universitas Muhammadiyah Malang).
- Denhardt, J. V., & Robert, B. D. 2003. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk New York : ME. Sharpe.
- Denhardt, KG, 1988. *The ethics of public service: resolving moral dilemmas in the public organizations*. New York: Greenwood Press.
- Denhardt, R.B. & J.V. Denhardt, 2000. *"The New Public Service"*, dalam *Public Administration Review*, Vol 60, No. 6
- Denhardt, Kathryn G, 1988. *The ethics of Public Service*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. USA.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. UGM-Yogyakarta.
- Elton, Mayo. (2003). *The Human Problems Of An Industrial Civilization*. Routledge
- Engle, N. L. (2011). Kapasitas adaptif dan penilaiannya. *Perubahan lingkungan global*, 21(2), 647-656.
- Eriksen, S. H., Nightingale, A. J., & Eakin, H. (2015). *Reframing adaptation: The political nature of climate change adaptation*. *Global Environmental Change*, 35, 523-533.
- Etzioni, Amitai, 1986. *Organisasi-Organisasi Modern*, UI-Press, Jakarta.

- Farmer, E., & Weston, K. M. (2002). Model konseptual untuk pengembangan kapasitas dalam penelitian perawatan kesehatan primer Australia. *Dokter keluarga Australia*, 31(12), 1139.
- Fajar, A. 2016. Kapasitas Penyuluhan Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Jawa Timur. *Agriekonomika*, Vol. 5 No. 2, 125-136.
- Fayol, Henry. 2010. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Farnham, D., & Horton, S. (1996). *Managing the new public services. Macmillan International Higher Education*.
- Ferlie E., dkk, 1996, *The New Public Management in Action, Oxford University Press, Oxford*, 9-15.
- Flynn, Norman. 1993. *Public Sector Management. New York: Harvester Wheatsheaf*
- Foster, Bill & Seeker, Karen R. 2001. Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit PMM.
- Frederickson, H. George. and K. Smith. 2004. *Public Administration Theory Primer. USA. Kumarin Press*.
- Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). *Adaptive governance of social-ecological systems. Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441-473.
- Fischhendler, I., & Heikkila, T. (2007, November). IWRM mendukung tata kelola adaptif: Suatu perspektif kebijakan. Dalam konferensi akhir Freude am Fluss, Universitas Radboud, Nijmegen (NL) (pp. 22-24).
- Grindle, M. (1997). *Getting good government: capacity building the public sector of de-veloping countries. Boston: Harvard Insti-tute for International Development*.
- Grindle, M. S. (1997). *Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries. World Development*, 25(4), 481-495.
- Gupta, J., C. Termeer, J. Klostermann, S. Meijerink, M. Brink, P. Jong, Nooteboom dan E. Bergsma. (2010). *The Adaptive Capacity Wheel: A Method To Assess The Inherent Characteristics Of Institutions To Enable The AdaptiveCapacity Of Society. Environmental science & Policy* 13:459-471.
- Gunawan. 2004. Pengaruh Reformasi Sistem Birokrasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kendari. Disertasi. Tidak

- Diterbitkan. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung.
- Hatfield-Dodds, dkk. (2007). Pemerintahan adaptif: Pengantar dan implikasi untuk kebijakan publik. (No. 418-2016-26492).
- Hasanuddin, A., & Nasution, A. B. (2017). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 8(2), 78-89.
- Hui, Glenn and Mark Richard Hayllar, 2010, "*Creating Public Value in E-Government: A Public-Private-Citizen Collaboration Framework in Web 2.0*", *The Australian Journal of Public Administration*, Vol. 69, No. S1, pp. S120– S131
- Ibrahim, Amin. 2008. Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- I Nyoman Norken, I Nyoman Yudha Astana, Luh Komang Ayu Manuasri, 2012. Manajemen Risiko pada Proyek Konstruksi di Pemerintah Kabupaten Jembrana. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* Vol. 16, No. 2, Juli 2012.
- James, V. U. (Ed.). (1998). Pengembangan kapasitas di negara berkembang: Dimensi manusia dan lingkungan. Grup Penerbitan Greenwood.
- Janssen, M., & Van Der Voort, H. (2016). *Adaptive governance: Towards a stable, accountable and responsive government. Government Information Quarterly*. https://www.researchgate.net/publication/298330489_Adaptive_governance_Towards_a_stable_accountable_and_responsive_government.
- Jan Kooiman (ed.), 1993. *Modern Governance: New Government-Society Interactions* (London: Sage Publications, 1993), p.258.
- Jusnaeni, Sri. 2017. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sektor Petanian. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Karhi Nisjar, 1997. Beberapa Catatan tentang *Good Governance*, *Jurnal Administrasi Pembangunan* No Vol 1 No2 :119, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta
- Keban, Y. (1999). *Capacity Building* sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis bagi Perwujudan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta:UGM.
- Keban, Yeremias.T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Kickert WJM, Klijn EH and Koppenjan JFM. (eds), 1997, *Managing Complex Networks*. London: Sage.
- Kusuma, Charvin. 2014. Membedah Anatomi ISO 31000:2009 *Risk Management Principles and Guidelines*. Diakses pada tanggal 19 Februari 2016. <http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/membedah-anatomi-iso31000-2009-risk-management-%E2%80%93-principles-and-guidelines>.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: The University of Chicago Press, 1970).
- Lan, Zhiyong and Rosenbloom, David H. 1992. *Editorial, Public Administration Review*, 52
- Lebel, L., Anderies, J. M., Campbell, B., Folke, C., Hatfield-Dodds, S., Hughes, T. P., ... & Wilson, J. (2006). *Governance and the capacity to manage resilience in regional social-ecological systems*. *Ecology and Society*, 11(1), 19.
- M. Farid Wajdi, Anton Agus Setyawan Syamsudin, dkk. 2012. Manajemen Risiko Bisnis UMKM di Kota Surakarta. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume 16, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 116-126
- Milen, A. (2015). *What Do We Know About Capacity Building?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*, World Health Organization. Geneva: De-partement of Health Service Provision.
- Moorhead, G. dan R.W. Griffin. 2013. *Organizational Behavior: Managing People and Organizations*. Terjemahan D. Angelica. 2013. *Perilaku Organisasi: Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Moleong, Lexy. J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Munawwaroh, Zahrotul. 2017. Analisis Manajemen Risiko pada pelaksanaan Program Pendidikan dalam upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan* ISSN: p.1412-8152 e.2580-1007.
- Mustofa, M. 2010. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Untuk Menunjang Otonomi Daerah*. Diakses Januari 2010.
- Moore, K. L. (2010). *Clinically Oriented Anatomy*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

- Ndrada, Talizuduhu. 1999. Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Newman, M.C. dan A.W. McIntosh. (1991). *Metal Ecotoxicology Concepts & Applications*. Lewis Publishers. Michigan.
- Nicholas Henry, *Public Administration and Public Affairs* (diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh), Rajawali, Jakarta, 1988.
- Nugroho D, Riant. 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Norman, NA, Razak, AR, & Kasmad, R. (2020). *Adaptive Governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1(1), 145-161.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. New York: Routledge.
- Osborne, David & Plastrik. Peter. 2012. Memangkas Birokrasi. PPM. Jakarta. (terjemahan).
- Patilima, Hamid. (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Pradana, Yana Ayu., dan Braddy Rikumahu. "Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Asuransi," Trikonomika ISSN 1411-514X. Volume 13, No. 2, hal 3-4, Desember 2014
- Pfeffer, J. 1982. *Organizations and organization theory*. Boston, MA: Pitman.
- Pratiwi, I., & Rahmawati, E. (2016). Studi Tentang Adaptasi Pemerintah Daerah terhadap Perubahan Iklim dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 7(3), 234-245.
- Pratikno. 2005. *Good Governance dan Governability*. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 8. No 3. Hal 231-248
- Pollitt , C . and G . Bouckaert . 2004 . *Public Management Reform: A Comparative Analysis , 2nd . Oxford : Oxford University Press*

- R. Nelson, dkk (2008). Menggunakan pemerintahan adaptif untuk memikirkan kembali cara sains mendukung kebijakan kekeringan Australia. *ilmu & kebijakan lingkungan*, 11(7), 588-601.
- Ramadhana, AN (2021). *Pemerintahan Desa Adaptif (Studi Pada Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)* (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga).
- Resia, O. (2019). Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Potensial Di Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Publik*, 2(3), 1629-1639.
- Robbins, P. Stephen. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi*. (Terjemahan). Jakarta: Penerbit Arcan.
- Sari, D. P., & Putra, D. E. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(1), 45-56.
- Setyawati, Endang Budi & HNS Tangkilisan. 2005. *Responsivitas Kebijakan Publik*. Yogyakarta: *Wonderfull Publishing Company*
- Siagian, S.P. 2000. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, H, (2007), *Manajemen Resiko ; Konsep, Kasus dan Implementasi*, Penerbit PT ElexMedia Komputindo, Jakarta.
- Simon, A. Herbert. 2004. *Administrative Behavior*, Perilaku Administrasi : Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Jakarta: Alih Bahasa ST. Dianjung, Bumi Aksara
- Smit, B., & Wandel, J. (2006). *Adaptation, adaptive capacity and vulnerability*. *Global Environmental Change*, 16(3), 282-292.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Soeprapto, H.R.Riyadi. 2010. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Diakses Januari 2010.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta: Erlangga.
- Tahir, M. M., Nahrudin, Z., & Ekawaty, D. (2016). *Adaptive Governance: Implementation of Green Open Space Program*. Official Publisher, 2.
- Thoha, Miftah. 2009. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

- Thoha, Miftah, 2011, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Termeer, C., Gupta, J., Klostermann, J., Meijerink, S., Brink, M. V., Jong, P., et al. 2015. *The Adaptive Capacity Wheel: A Method to Assess the Inherent Characteristic of Institutions to Enable The Adaptive Capacity of Society. Environmental Science and Policy*, pp. 459-471.
- UNDP, Bappenas. (2010). *Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Vigoda, E., Cohen, A. (2003). *Work Congruence and Excellence in Human Resource Management: Empirical Evidence from the Israel Non-profit Sector. Review of Public Personnel Administration*. Vol. 23, p: 192-216.
- Weber, Max. 1971. *The Interpretation of Social Reality, Edit and with an introductory essay by JET. Eldridge*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Wexley, Kenneth N. dan Gary A. Yukl. 2003. *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personal* (Jakarta: Rineka Cipta).
- White, R.E. 2003. *The Effective Leader*. Yogyakarta: Penerbit Kogan Page Limited, Garailmu.
- Wallace, Lisa Sharma., Velarde, Sandra J., Wreford, Anita. (2018) *Adaptive Governance Good Practice: Show Me the Evidence!*. *Journal of Environmental Management*. 22. 174-184.
- Wursanto, Drs. Ig, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- World Bank. (2008). *World Development Report 2008: Agriculture for Development. World Bank Publications*.
- Zaenuri, M. (2012). *Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance*. 157–168.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang. 2018. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021. Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2021.

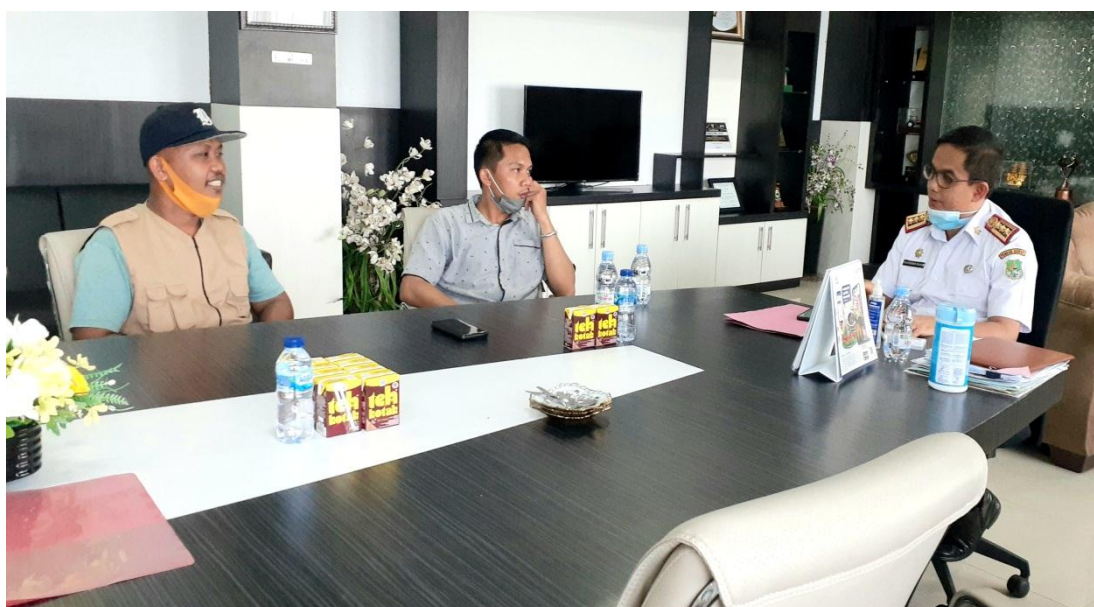
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021. Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021. Data Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

Dokumentasi Wawancara



Bersama Bupati Sidrap dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidrap



Wawancara bersama Sekretaris Daerah Kab. Sidrap



Wawancara Anggota DPRD Kab. Sidrap



Wawancara Penyuluh Pertanian Kab. Sidrap



Wawancara bersama Kepala Bidang DTPHPKT Kab. Sidrap



Wawancara bersama Ketua Kelompok Tani Kab. Sidrap



Wawancara bersama Ketua Kelompok Tani Kab. Sidrap



Wawancara bersama Organisasi Pemuda Tani HKTI Kab. Sidrap